

TATA KELOLA Corporate Governance PERUSAHAAN

Sebagai wujud dari komitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG, seluruh unsur di dalam Perusahaan dilibatkan mulai dari tahap persiapan, internalisasi, implementasi hingga evaluasi.

As a form of commitment to apply the principles of GCG, all elements of the Company are engaged in the preparation, internalization, implementation until evaluation.





TATA KELOLA PERUSAHAAN

Corporate Governance

PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) selalu diberlakukan di lingkungan Perusahaan. Dalam praktik yang berlaku di Perusahaan, implementasi GCG bukan sekadar untuk memenuhi ketentuan regulator. Lebih dari itu, manajemen menyadari bahwa penerapan prinsip-prinsip GCG sangat mendukung Perusahaan untuk meraih pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan, serta mencapai target jangka panjang yang sudah ditetapkan.

KERANGKA PENERAPAN GCG

Prasyarat yang harus dipenuhi oleh perusahaan yang ingin memperoleh manfaat jangka panjang dari penerapan GCG adalah adanya suatu sistem yang didukung integritas dan komitmen tinggi dari seluruh pihak yang terlibat. Oleh karenanya, setiap perusahaan harus memiliki pedoman perilaku sebagai acuan bagi organ perusahaan dan semua karyawan dalam menerapkan nilai-nilai dan etika bisnis sehingga menjadi bagian dari budaya perusahaan.

Untuk meningkatkan manfaat dari penerapan GCG, Bakrieland secara bertahap melengkapi diri dengan berbagai perangkat pendukung GCG. Selain visi, misi dan nilai-nilai Perusahaan yang telah ditetapkan pada awal berdirinya, Bakrieland memiliki Pedoman Perilaku, Sistem Pelaporan Pelanggaran, Panduan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan, Peraturan Perusahaan, Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi, serta berbagai *Standard Operating Procedures* (SOP). Semua ini merupakan kesatuan sistem yang menunjang tercapainya keberhasilan penerapan GCG di Bakrieland.

Pelaksanaan GCG di Bakrieland menggunakan pendekatan *top-down*, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, *best practice*, dan budaya perusahaan. Seluruh unsur di dalam Perusahaan dilibatkan mulai dari tahap persiapan, internalisasi, implementasi hingga evaluasi.

THE IMPLEMENTATION OF CORPORATE GOVERNANCE

The principles of Good Corporate Governance (GCG) have long been applied in the Company. In all of the practices performed in the Company, the application of GCG is not merely defined as complying with the regulators. Moreover, the management realizes that through the application of the principles of good corporate governance the Company is able to achieve sustainable business growth, and also achieve long-term targets that have been set.

GCG IMPLEMENTATION FRAMEWORK

Requirement to be met by companies that need to gain long-term benefits of the GCG implementation is by having a system supported with integrity and high commitment from all parties involved. Thus, every company should have a code of conduct as a reference for the company organs and all employees in applying the values and business ethics to become part of the corporate culture.

To increase the benefits of the application of GCG, Bakrieland gradually equips the Company with a variety of GCG supporting tools. In addition to the vision, mission and values of the Company which have been set from the beginning of its establishment, Bakrieland developed and has implemented the Code of Conduct, Violation Reporting System, Corporate Governance Implementation Guidelines, Company Regulations, Guidelines for the Board of Commissioners and Board of Directors, as well as a variety of Standard Operating Procedures (SOP), all of which have been formulated into an integrated system that supports the overall achievement of GCG in Bakrieland.

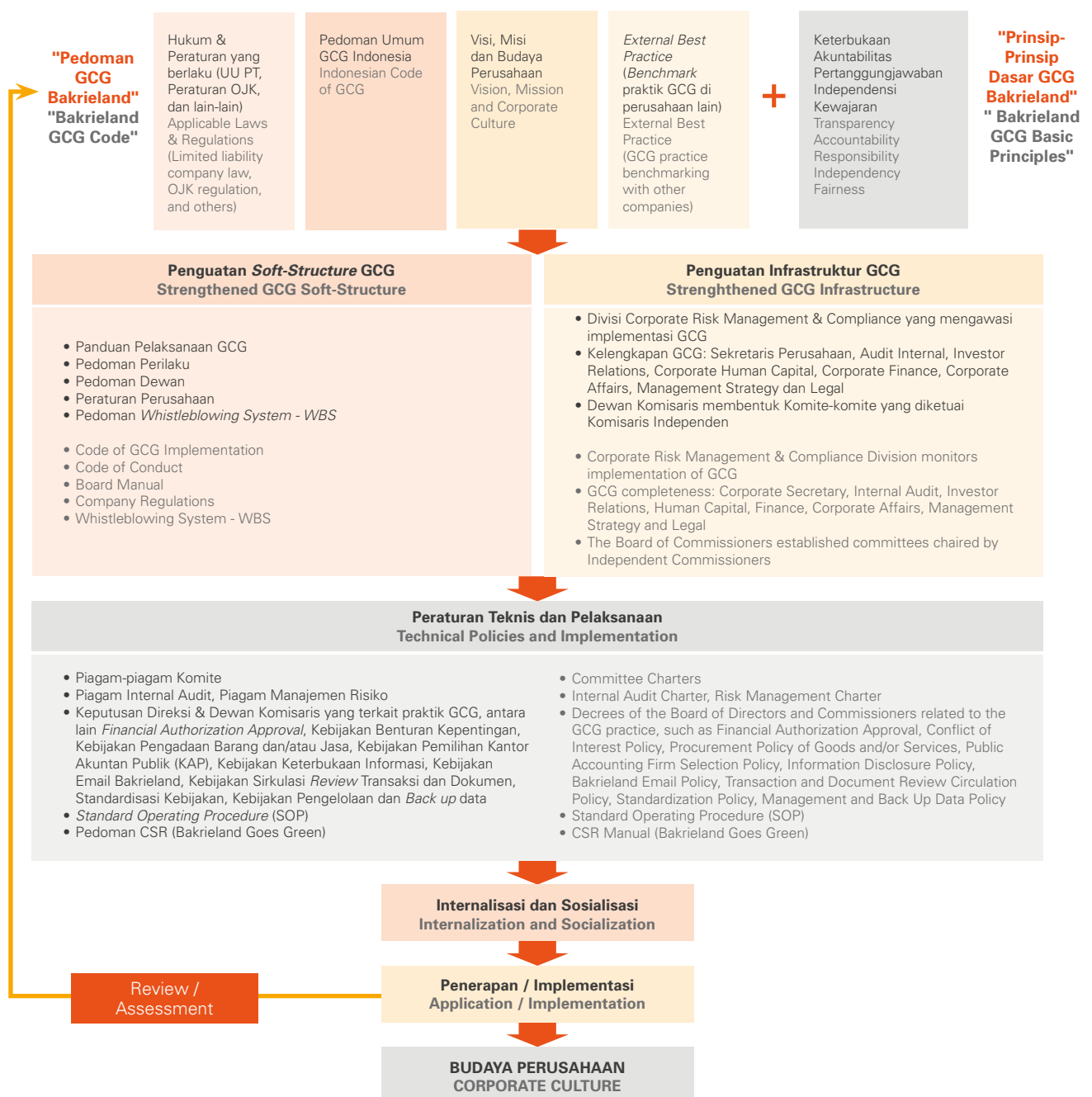
The Company's GCG implementation uses a top-down approach, with due regard to the legislations in force, best practices, and corporate culture. All elements in the Company are involved beginning with the preparation, through to implementation, internalization, and evaluation. This is visualized from the Diagram

Hal itu tergambar pada Bagan Proses Pencapaian Tujuan GCG di Bakrieland sampai dengan tahun 2014 berikut ini.

on the Achievement Process of GCG Objectives in Bakrieland up until the year 2014.

Bagan Proses Pencapaian Tujuan GCG di Bakrieland

Diagram on the Achievement Process of GCG Objectives in Bakrieland



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Corporate Governance

LANDASAN PENERAPAN

Bakrieland menerapkan prinsip-prinsip GCG ke dalam setiap aspek bisnis dan operasionalnya dengan mengacu pada pemenuhan 5 (lima) prinsip dasar GCG sesuai Pedoman Umum yang disusun oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) serta praktik bisnis terbaik yang ada. Prinsip tersebut adalah:

A. Transparansi

Bakrieland menerapkan asas keterbukaan dalam menjalankan bisnisnya dengan menyediakan informasi yang bersifat material dan relevan serta dengan mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Informasi yang seluas-luasnya diberikan kepada publik dan pemegang saham, dengan memperhatikan peraturan OJK dan Bursa Efek Indonesia. Laporan yang diterbitkan secara berkala dalam dua bahasa (Inggris dan Indonesia), yang mencakup antara lain Laporan Keuangan Triwulan, Laporan Keuangan Semester, dan Laporan Keuangan Tahunan yang diaudit, serta Laporan Tahunan. Informasi juga diberikan melalui paparan publik, media cetak dan elektronik, serta forum investor.

B. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ Perusahaan sehingga tujuan pengelolaan Perusahaan terlaksana secara efektif. Prinsip akuntabilitas diterapkan oleh Bakrieland, antara lain melalui langkah-langkah pelaporan Direksi kepada Dewan Komisaris mengenai rencana anggaran tahunan dan evaluasi bersama atas kinerja keuangan Perusahaan, penyampaian laporan keuangan pada RUPS Tahunan, pembentukan Audit Internal dan penunjukan auditor eksternal, serta pemberlakuan etika bisnis dan pedoman perilaku Perusahaan.

C. Responsibilitas

Manajemen mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tanggung jawab kepada masyarakat dan lingkungan untuk menjaga kesinambungan Perusahaan. Perusahaan merealisasikan hal ini melalui pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam berbagai bidang.

BASIS OF IMPLEMENTATION

Bakrieland applies the GCG principles in every aspect of its business and operations with reference to the fulfillment of the five (5) basic principles of good corporate governance based on the General Guidelines drafted by the National Committee on Governance Policy (KNKG) and the existing best business practices that exist. These principles are:

A. Transparency

Bakrieland applies the principle of transparency in its business by providing information that is material and relevant and easily accessed and understood by stakeholders. The broadest possible information is provided to both the public and shareholders, having full regard for the FSA and the Indonesia Stock Exchange rules. Reports are published regularly and in a timely manner in two languages (English and Indonesian), which include, among others, Quarterly Financial Report, Semester Financial Statements, audited Annual Financial Statements, and the Annual Report. Information is also provided through public exposure, printed and electronic media, as well as investor forums.

B. Accountability

Accountability is providing the clarity of function, structure, system, and accountability of the Company's organs in order that the Company's objectives are effectively met. The principle of accountability is applied by Bakrieland through reporting measures to the Board of Commissioners on the annual budget plan and the joint evaluation of the Company's financial performance, financial reporting at the Annual General Meeting of Shareholders, the establishment of an internal audit unit and the appointment of an external auditor, as well as the implementation of the business ethics and Corporate behavior guidelines.

C. Responsibility

The Management abides by all of the applicable rules and regulations and also implements our responsibilities regarding society and the environment to maintain the continuity of the Company through the implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) in a variety of fields.

D. Kemandirian/Independensi

Di Bakrieland, pengelolaan Perusahaan dilakukan secara independen, masing-masing organ Perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai contoh, Dewan Komisaris dan Direksi Bakrieland memiliki pendapat yang independen dalam setiap keputusan yang diambil, namun dimungkinkan untuk mendapatkan saran dari konsultan independen, hukum, sumber daya manusia dan komite-komite untuk menunjang kelancaran tugasnya. Selain itu, saat ini Dewan Komisaris Bakrieland beranggotakan 2 (dua) orang Komisaris Independen untuk menjamin independensi Dewan Komisaris dalam pengawasan Perusahaan.

E. Kewajaran dan Kesetaraan

Bakrieland menerapkan prinsip keadilan di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. Perusahaan juga selalu menerapkan perlakuan yang setara baik kepada publik, otoritas pasar modal, komunitas pasar modal, maupun para pemangku kepentingan. Sementara itu hubungan dengan karyawan dijaga dengan memperhatikan hak dan kewajibannya secara adil dan wajar. Untuk memastikan bahwa penerapan asas-asas GCG dalam setiap aspek bisnis Bakrieland, diperlukan peran aktif serta dukungan dari Dewan Komisaris dan Direksi. Peran aktif dan dukungan ditunjukkan melalui :

- Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.
- Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian internal Perusahaan.
- Penerapan fungsi kepatuhan dan manajemen risiko.
- Rencana strategis Perusahaan menjadi acuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
- Transparansi informasi, termasuk di antaranya Laporan Keuangan Perusahaan.

D. Independence

In Bakrieland, the management of the Company is performed independently, the organs of the Company do not dominate each other and intervention violating the regulations and legislation in force will be disregarded. For example, the Board of Commissioners and Board of Directors of Bakrieland have independent views in every decision, however it is also possible to obtain advice from independent legal and human resources consultants and also the various committees to support the duties. In addition, the current Board of Commissioners of Bakrieland consists of 2 (two) Independent Commissioners to ensure the independence of the Board of Commissioners in monitoring the Company.

E. Fairness

Bakrieland applies the principle of fairness in meeting the rights of stakeholders arising under agreement and all applicable laws and regulations. The Company also strives to apply equal treatment to the public, capital market authorities, capital market community, as well as stakeholders. Meanwhile the relationship with the employees is maintained with close attention to the rights and obligations in a fair and reasonable manner. To ensure that the principles of good corporate governance are applied in every aspect of Bakrieland's business, the active participation and support from the Board of Commissioners and Board of Directors is necessary. The active participation and support may be demonstrated through:

- Duties and responsibilities carried out by the Board of Commissioners and Board of Directors.
- Completeness and the implementation of the tasks of committees and work units performing the function of internal control.
- Implementation of the function of compliance and risk management.
- Establishing the Company's strategic plan as the point of reference for the Work Plan and Budget.
- Transparency of information, including the Company's Financial Statements.

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Corporate Governance

Sebagai realisasi dari kerangka aturan yang sudah ada, Perusahaan juga telah memiliki Panduan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan. Panduan ini sekaligus menjadi landasan bagi Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi terkait proses GCG dalam menyusun berbagai kebijakan yang menjiwai praktik bisnis Perusahaan tanpa mengabaikan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika. Panduan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Bakrieland mencakup berbagai aspek, antara lain kebijakan Tata Kelola Perusahaan, pedoman Tata Kelola bagi organ Perusahaan, prinsip-prinsip dan tujuan, struktur pengelolaan Perusahaan, serta kebijakan transparansi.

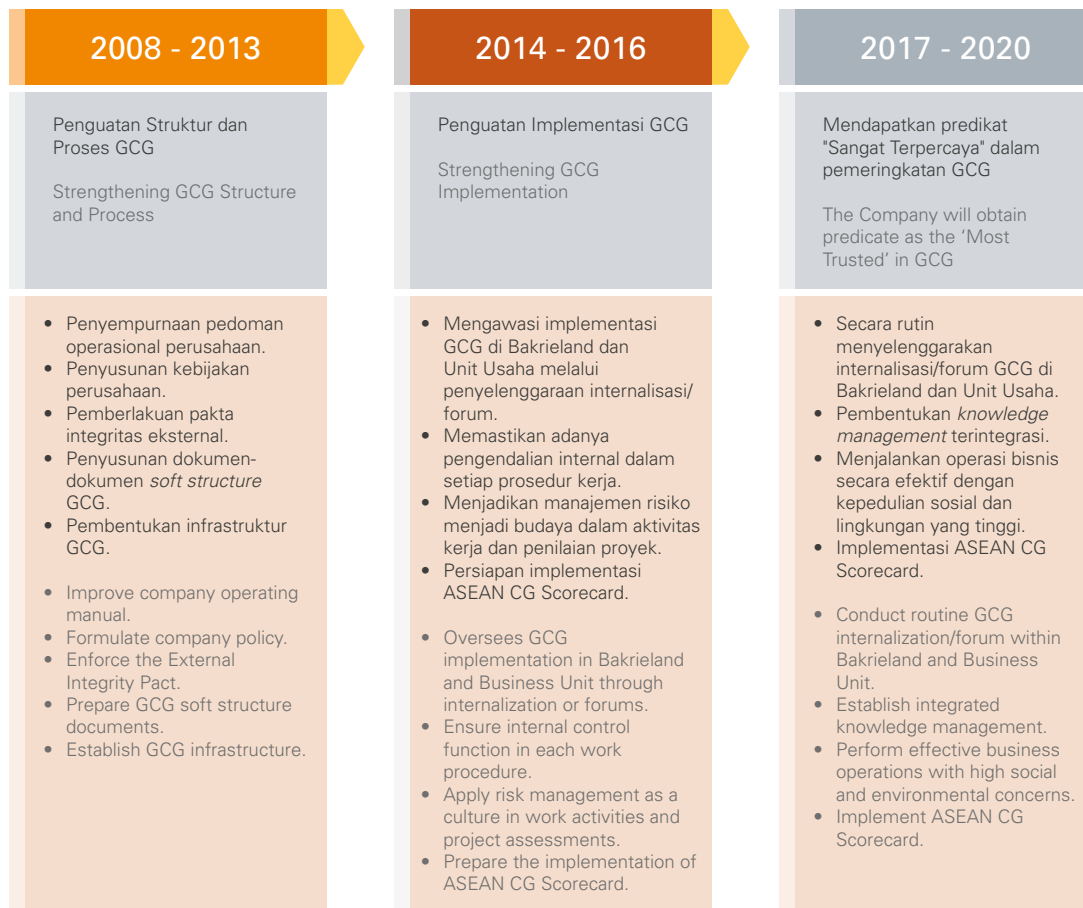
As the realization of the existing regulatory framework, the Company also possesses the Guidelines for the Application of Good Corporate Governance. This guideline also acts as the foundation for the Shareholders, the Board of Commissioners and Board of Directors related to the process of corporate governance in formulating policies that animates the Company's business practices without ignoring the laws and ethical values. Bakrieland's Corporate Governance Implementation Guidelines cover various aspects, such as corporate governance policies, Corporate Governance guidelines for the Company's organs, principles and objectives, the management structure of the Company, as well as the policy of transparency.

ROAD MAP GCG

Road Map GCG dirumuskan sebagai pedoman untuk mencapai tujuan jangka panjang Perusahaan dan sebagai sarana untuk memantau perkembangan praktik GCG saat ini dan masa datang. Bakrieland merumuskan Road Map GCG dengan periode rencana implementasi dimulai sejak tahun 2008.

GCG ROAD MAP

The GCG Road Map has been formulated as the guide for the Company to achieve its long-term goals and also as a means to monitor the development of corporate governance practices today and into the future. Bakrieland formulated the GCG Road Map with the implementation starting in 2008.



Roadmap GCG dibagi menjadi 3 (tiga) periode waktu, yaitu:

1. 2008 – 2013 dengan tema Penguatan Struktur dan Proses GCG.
2. 2014 – 2016 dengan tema Penguatan Implementasi GCG.
3. 2017 – 2020 dengan tema Dikenal sebagai Perusahaan dengan GCG ‘Sangat Terpercaya’ bagi *Stakeholders*.

Setiap periode dilaksanakan sesuai dengan rencana program yang telah disusun dan dilakukan peninjauan untuk mengetahui pencapaian implementasi GCG di Bakrieland dan penyempurnaan apa saja yang perlu dilakukan.

Road Map GCG Bakrieland dirumuskan selaras dengan “Big Bang Bakrieland 2020” agar tema dan program yang dijalankan mendukung percepatan pencapaian visi Bakrieland.

PERATURAN PERUSAHAAN

Hak dan kewajiban karyawan Bakrieland tercantum pada Peraturan Perusahaan, yang bertujuan untuk membina hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang dalam usaha meningkatkan efisiensi, produktivitas dan prestasi kerja yang optimal. Peraturan Perusahaan Bakrieland untuk periode tahun 2013- 2015 telah disahkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No.KEP.496/PHIJSK-PKKAD/PP/VI/2013 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Bakrieland Development Tbk.

PEDOMAN DEWAN

Dalam melaksanakan tugasnya untuk mencapai visi dan misi Perusahaan, Dewan Komisaris dan Direksi Bakrieland berpedoman kepada petunjuk tata laksana kerja yang dituangkan dalam Pedoman Dewan. Pedoman Dewan menjelaskan tahapan aktivitas secara terstruktur, sistematis, mudah dipahami dan dapat dijalankan dengan konsisten.

Pedoman Dewan disusun berdasarkan prinsip-prinsip hukum korporasi, ketentuan Anggaran Dasar, peraturan perundangundangan yang berlaku, arahan pemegang saham, serta praktik-praktik terbaik GCG. Pelaksanaan Pedoman Dewan merupakan

GCG Roadmap is divided into 3 time frames, which are:

1. 2008 – 2013 with the theme of GCG Structure and Process Strengthening.
2. 2014 – 2016 with the theme of GCG Implementation Strengthening.
3. 2017 – 2020 with the theme known as the Company with a GCG rating of “Most Trusted” for the Stakeholders.

Each period is carried out in accordance with the predetermined plans and reviews are conducted to identify the achievements in the implementation of GCG in Bakrieland and also any required refinements.

Bakrieland’s GCG Road Map is formulated in line with the “Big Bang Bakrieland 2020” in order for the theme and program to support the acceleration of the achievement of the vision of Bakrieland.

COMPANY REGULATIONS

The rights and obligations of the employees of Bakrieland are contained in the Company’s Regulations, which aims to foster harmonious relations, and balance in an effort to improve efficiency, productivity and optimum performance. Bakrieland’s Company Regulations for the period 2013- 2015 has been approved through the Decree of the Director General of Industrial Relations and Labor Social Security No. No.KEP.496/PHIJSK-PKKAD/PP/VI/2013 on the Ratification of the Company’s Regulations of PT Bakrieland Development Tbk.

BOARD MANUAL

In performing its duties to achieve the vision and mission of the Company, the Board of Commissioners and Board of Directors of Bakrieland are guided by the work guidelines as outlined in the Board Manual. The Board Manual explain the stages of activities in a structured, systematic, easily understood manner that may be implemented consistently.

The Board Manual are prepared based on the principles of corporate law, the Articles of Association, the applicable laws and regulations, directions from the shareholders, as well as the best corporate governance practices. The application of Board Manual is one of

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Corporate Governance

salah satu bentuk komitmen dari Dewan Komisaris dan Direksi untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG, sekaligus sebagai penjabaran lebih lanjut dari Panduan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang telah dimiliki Bakrieland.

Pedoman Dewan Bakrieland pertama kali disahkan pada tanggal 31 Juli 2009 melalui Kesepakatan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi dalam Penerapan Pedoman Dewan. Karena sifatnya yang dinamis dan berkembang, pedoman ini telah disempurnakan pada akhir tahun 2011.

Pedoman Dewan disusun dengan tujuan:

1. Menjadi rujukan/ pedoman tentang tugas pokok dan fungsi kerja masing-masing organ.
2. Meningkatkan kualitas dan efektivitas hubungan kerja antar organ.
3. Semakin memperjelas tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi maupun hubungan kerja diantara keduanya.
4. Semakin memudahkan bagi organ Dewan Komisaris dan Direksi untuk memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing.
5. Menerapkan asas-asas GCG yakni transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran.

ETIKA PERUSAHAAN

Etika Perusahaan yang berlaku di Bakrieland dituangkan dalam Pedoman Perilaku Bakrieland. Pelaksanaan Etika Perusahaan yang berkesinambungan diharapkan dapat membentuk budaya Perusahaan yang mengandung nilai-nilai Perusahaan.

Pedoman Perilaku

Pengesahan dan Sosialisasi

Pengesahan dan Sosialisasi Pedoman Perilaku Bakrieland telah disahkan melalui Surat Keputusan Direksi No. 047/SK-Dir/IV/07. Seluruh manajemen dan karyawan wajib memahami Pedoman Perilaku ini sebagai dasar penerapan perilaku yang mengatur hubungan antara karyawan dengan Perusahaan, sesama karyawan, konsumen, pemasok, pemegang saham, pemangku kepentingan, pemerintah dan masyarakat.

the commitments of the Board of Commissioners and Board of Directors to implement the principles of good corporate governance, as well as further elaboration of the Bakrieland's Corporate Governance Implementation Guidelines.

The Board Manual were first ratified on 31st July, 2009 through an Agreement of the Board of Commissioners and Directors on the implementation of the Board Guidelines. Because of its dynamic and evolving nature, the Board Guidelines were refined at the end of 2011.

The Board Manual were formulated with the following objectives:

1. To become the reference/ guidance on the duties and functions of each organ.
2. To improve the quality and effectiveness of work relations between the organs.
3. To clarify the duties and responsibilities of the Board of Commissioners and Board of Directors as well as the work relations between them.
4. To clarify understanding for the Board of Commissioners and Board of Directors in carrying out their respective duties and responsibilities.
5. To apply the principles of good corporate governance namely transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness.

CORPORATE ETHICS

The corporate ethics applicable in Bakrieland is forth in the Code of Conduct. Sustainable implementation of corporate ethics is expected to form the Company culture that contains the values of the Company.

Code of Conduct

Endorsement and Socialization

Endorsement and Socialization of Bakrieland's Code of Conduct was ratified through the Decree of the Board of Directors No. 047/SK-Dir/IV/07. The entire management and also employees must understand the Code of Conduct as the basis for the application of the behaviors that govern the relations between the employees and the Company, fellow employees, customers, suppliers, shareholders, stakeholders, government and society.

Sosialisasi Pedoman Perilaku dilakukan antara lain dengan mewajibkan seluruh manajemen dan karyawan untuk menandatangani Surat Pernyataan Ketaatan terhadap Pedoman Perilaku tersebut setiap tahun sekali. Surat Pernyataan tersebut merupakan bukti komitmen karyawan dan akan disimpan di *personnel file* yang bersangkutan.

Penandatanganan tersebut juga sebagai bukti komitmen Perusahaan bahwa Pedoman Perilaku berlaku untuk karyawan di seluruh level organisasi di Induk Perusahaan dan Unit Usaha, sampai dengan karyawan yang bersangkutan berhenti bekerja dari Perusahaan.

Pedoman Perilaku diharapkan mampu menjadi pedoman dan pengarah perilaku karyawan dalam pencapaian visi misi Perusahaan, yang di dalamnya terkandung nilai-nilai dan budaya Perusahaan. Di dalam Pedoman Perilaku juga diatur mengenai sanksi tindakan penyimpangan dan mekanismenya.

Penanganan Penyimpangan atas Pedoman Perilaku

Penanganan Penyimpangan atas Pedoman Perilaku Penyampaian terhadap penyimpangan atas Pedoman Perilaku dapat dilakukan melalui mekanisme Sistem Pelaporan Pelanggaran (SPP). Penanganan terhadap tindak penyimpangan Pedoman Perilaku dilakukan melalui penyelidikan yang mendalam dan didasari fakta-fakta, sedangkan keputusannya dibuat dan diberikan berdasarkan pertimbangan akibat tindakan, derajat kesengajaan dan motif tindakan.

Melalui pertimbangan yang cermat dan obyektif, Komite Sumber Daya Manusia memutuskan jenis sanksi yang disesuaikan dengan bobot penyimpangan dan hirarki organisasi (pangkat atau jabatan karyawan). Sanksi kepada karyawan dapat berbentuk teguran lisan, surat peringatan (I, II, III), tidak diberikan kenaikan gaji, pangkat atau bonus, hingga pemutusan hubungan kerja (PHK). Khusus pemutusan hubungan kerja, setelah mendapatkan persetujuan Direksi, dilanjutkan dengan pengajuan permohonan izin kepada Departemen Tenaga Kerja sesuai Undang-undang Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

The socialization of the Code of Conduct is performed among others by requiring the management and employees to sign a Statement of Compliance with the Code of Conduct once-a-year. The statement letter is a testament to the commitment of employees and is stored in the employee's personnel file.

The signing is also as evidence of the Company's commitment that the Code of Conduct applies to all employees at all levels of the organization in the parent company and business units, until the employee in question stops working for the Company.

The Code of Conduct is expected to be the guideline and direction of the behavior of employees in achieving the Company's vision and mission, in which contains the values and culture of the Company. The Code of Conduct also regulates the sanctions for violations and its mechanism.

Handling Violations against the Code of Conduct

The handling of violations against the Code of Conduct and reporting on violations can be performed through the mechanism of Violation Reporting System (or the Whistleblowing System). The treatment of the violations against the Code of Conduct is performed through an in-depth investigation and based on the facts; decisions are made and given the due consideration with regards to the action, the degree of intention and motive.

Through careful and objective consideration, the Human Resources Committee decides the type of sanctions that are to be tailored to the weight of the violation and the organizational hierarchy (rank or position of the employee). Sanctions to employees can take the form of an oral reprimand, warning letters (I, II, III), salary reduction, promotion or bonus recinded, as well as the possible termination of employment (PHK). Termination of employment, after the approval by the Board of Directors is followed by the submission of the permit from the Ministry of Labor in accordance with the Labor Law of the Republic of Indonesia.

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Corporate Governance

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

Penyampaian Laporan Pelanggaran

Sistem Pelaporan Pelanggaran (SPP) merupakan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan tata kelola Perusahaan di Bakrieland. SPP memfasilitasi semua pihak baik pimpinan, karyawan, maupun pihak luar yang terkait dengan Perusahaan untuk melakukan pelaporan pelanggaran. Pelanggaran dimaksud meliputi penyimpangan atas etika bisnis, etika kerja, kebijakan Perusahaan, peraturan perundangan yang berlaku, anggaran dasar Perusahaan, perjanjian kontrak Perusahaan dengan pihak luar, rahasia Perusahaan, atau perbuatan lainnya yang dapat merugikan Perusahaan maupun pemangku kepentingan yang dilakukan oleh karyawan atau pimpinan Perusahaan.

Pelaporan ditujukan kepada pimpinan Perusahaan atau kelembagaan lain yang dapat mengambil tindakan atas pelanggaran tersebut. Bakrieland telah mulai menerapkan SPP sejak tahun 2009.

Mekanisme SPP

Pelapor menyampaikan laporan dalam bentuk surat dengan disertai dokumen pendukung yang diperlukan. Laporan ini ditujukan kepada Tim Khusus Pelaporan Pelanggaran (TKPP) dan disampaikan melalui salah satu diantara cara berikut:

1. Surat ke TKPP di Wisma Bakrie 1, Lantai 6
2. Email: whistleblowing@bakrieland.com
3. PO BOX BAKRIELAND JKTM 12700

Jika dokumen telah lengkap, TKPP melaporkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit. Pada saat yang bersamaan, TKPP juga melakukan investigasi terhadap pihak-pihak terlapor. Laporan yang tidak terbukti akan dikembalikan kepada pelapor. Namun apabila terbukti, TKPP akan melaporkan hasil temuannya tersebut kepada Komite Audit untuk ditindaklanjuti oleh Dewan Komisaris dan Direksi.

Laporan yang berkaitan dengan TKPP disampaikan dalam bentuk surat dan ditujukan kepada Direktur Utama, sedangkan laporan-laporan yang berkaitan dengan Direktur Utama ditujukan kepada Komisaris Utama.

WHISTLE BLOWING SYSTEM

Violation Reporting

The Violation Reporting System (SPP) is an effort to improve the quality of corporate governance in Bakrieland. SPP facilitates all parties, both officers, employees, or external parties related to the Company to report violations. The violations mentioned are violations in business ethics, work ethics, company policies, applicable laws and regulations, the Articles of Association of the Company, the Company contractual agreements with outside parties, company secrets, or other actions that could harm the Company and stakeholders conducted by employees or the Management of the Company.

Reporting is submitted to the CEO of the Company or any other institution, which may take action regarding the reported violations. Bakrieland began to implement SPP in 2009.

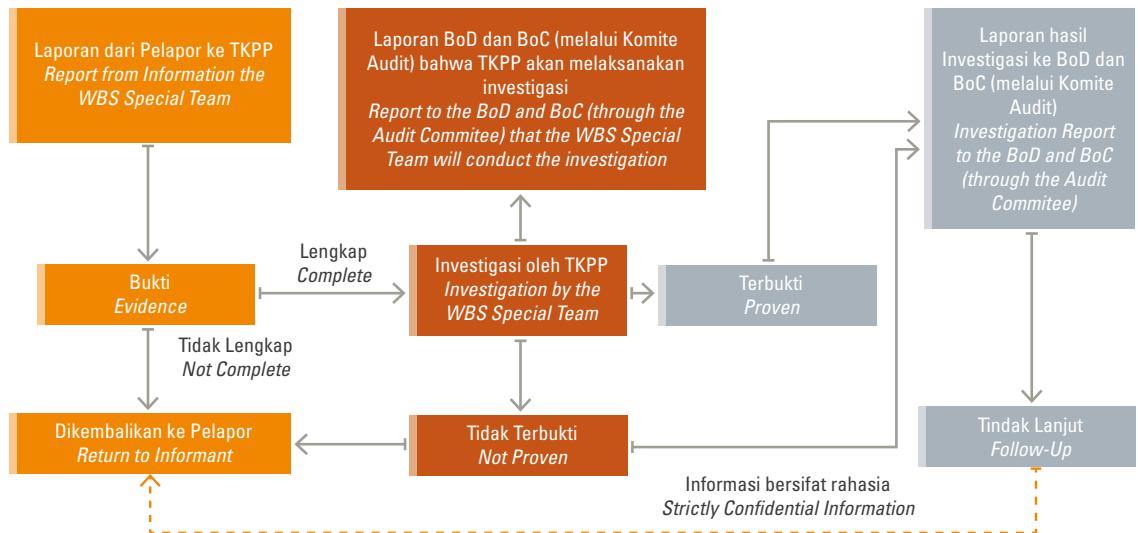
The Mechanism of SPP

The whistleblower submits a report in the form of a letter, accompanied by the necessary supporting documents. This report is addressed to the Violation Reporting Special Team (TKPP) and delivered through one of the following ways:

1. Letter to TKPP at Wisma Bakrie 1, 6th Floor
2. Email: whistleblowing@bakrieland.com
3. PO BOX BAKRIELAND JKTM 12700

If the documents are complete, TKPP will report to the Board of Directors and Board of Commissioners through the Audit Committee. At the same time, TKPP will also conduct an investigation of the party reported. Unproven reports will be returned to the complainant. However, if proven, TKPP will report its findings to the Audit Committee to be followed up by the Board of Commissioners and Board of Directors.

The report related to TKPP shall be delivered in the form of a letter and addressed to the President Director, while the report related to the President Director shall be addressed to the President Commissioner.



Sistem Perlindungan Pelapor

Bakrieland menyediakan fasilitas saluran pelaporan P.O. Box (surat, email) yang independen, bebas, dan rahasia bagi pelapor, agar terlaksana proses pelaporan yang aman. Selain itu, SPP juga menjaga kerahasiaan identitas pelapor dengan tujuan memberikan perlindungan kepada pelapor dan anggota keluarga atas tindakan balasan dari terlapor atau organisasi.

Informasi pelaksanaan tindak lanjut laporan akan disampaikan secara rahasia kepada pelapor yang identitasnya lengkap. Sementara itu pelapor yang terbukti melakukan pelaporan palsu dan/atau fitnah tidak diberikan perlindungan. Pelapor yang memberikan laporan palsu dapat dikenai sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku, misalnya KUHP pasal 310 dan 311 atau peraturan internal Perusahaan.

Insentif bagi Pelapor

Pelaksanaan SPP menuntut perubahan dari “budaya diam” menjadi “budaya kejujuran dan keterbukaan.” Oleh karena itu, Bakrieland memberikan insentif berupa penghargaan bagi pelapor dalam bentuk material atau piagam, dengan perhitungan sebesar dua per seribu (dua permil) dari kerugian Perusahaan yang berhasil dikembalikan.

Implementasi SPP Tahun 2014

Selama tahun 2014 TKPP tidak menerima laporan atas penyimpangan apapun di Bakrieland.

Whistleblower Protection System

Bakrieland provides an independent, free, and confidential reporting channel through PO Box (letter, email) in order to ensure the safety of the reporting process. In addition, SPP also maintains the confidentiality of the identity of the whistleblower in order to provide protection to the whistleblower and his/ her family members.

Information on the follow-up of the report will be submitted confidentially to the whistleblower who has submitted a complete identity. Meanwhile a whistleblower convicted of false reporting and/or slander will not be given protection. Whistleblowers who provide false statements may be subjected to sanctions according to the applicable legislations, namely Article 310 and 311 of the Criminal Law or the Company’s internal regulations.

Incentives for the Whistleblower

The implementation of SPP requires transformation from the “culture of silence” to the “culture of honesty and openness”. Therefore, Bakrieland provides incentives in the form of rewards for the whistleblower, materially or in the form of charter, with the calculation of two per thousand (two per mil) of the company’s loss that is successfully returned.

Implementation of SPP in 2014

Throughout 2014 TKPP did not receive any reports of irregularities in Bakrieland.

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Corporate Governance

Rencana SPP Tahun 2015

Mensosialisasikan kembali kebijakan sistem pelaporan pelanggaran ini kepada seluruh pemangku kepentingan internal Perusahaan.

SPP Plan for 2015

Re-socialize the policy on the violation reporting system to all internal stakeholders of the Company.

SISTEM MANAJEMEN MUTU

Pada tahun 2014 dilakukan 2 (dua) kali *surveillance audit* terhadap implementasi Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001:2008) di Bakrieland. Proses audit dilaksanakan oleh Badan Sertifikasi SGS Indonesia pada tanggal 5 Maret dan 12 September 2014. Dari hasil audit tersebut Bakrieland berhasil mempertahankan sertifikasi ISO 9001:2008 tanpa adanya temuan yang bersifat minor maupun major.

Lima kriteria utama standar ISO 9001:2008 adalah sistem manajemen mutu, tanggung jawab manajemen, manajemen sumber daya, realisasi produk & layanan dan pengukuran, analisa dan perbaikan. Keberhasilan mempertahankan sertifikasi tersebut menunjukkan komitmen Bakrieland dalam memastikan Perusahaan menjadi organisasi yang berorientasi memberikan kepuasan pada pelanggan dengan pelayanan yang bermutu.

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

In 2014 the Company conducted 2 (two) surveillance audits of the implementation of the Quality Management System (ISO 9001: 2008) in Bakrieland. The process of audit was conducted by the SGS Indonesia Certification Board on 5th and 12th March, 2014. From the results of the audit, Bakrieland managed to maintain the ISO 9001: 2008 certification without any minor or major findings.

There are five main criteria of ISO 9001: 2008 which are a quality management system, management responsibility, human resources management, realization of products and services as well as measurement, analysis and improvement. The success of maintaining the certification demonstrates Bakrieland's commitment to ensure that the Company becomes an organization oriented to provide customer satisfaction through services with quality.

Aktivitas / Activity	Keterangan / Description
<p>Audit Eksternal <i>Surveillance Audit</i> oleh SGS Indonesia telah dilaksanakan dan Bakrieland berhasil mempertahankan sertifikasi ISO 9001:2008.</p> <p>External Audit <i>Surveillance Audit</i> by SGS Indonesia has been performed and Bakrieland managed to maintain the certification of ISO 9001:2008.</p>	<p><i>Surveillance Audit</i> adalah proses audit mutu yang dilaksanakan oleh Badan Sertifikasi SGS Indonesia untuk melihat efektivitas dari implementasi Sistem Manajemen Mutu di Bakrieland.</p> <p><i>Surveillance Audit</i> is a quality audit process conducted by the Board of Certification SGS Indonesia to see the effectiveness of the implementation of the Quality Management System in Bakrieland.</p>
<p>Audit Mutu Internal (AMI)</p> <ul style="list-style-type: none"> - AMI Periode ke 1 tahun 2014 dilaksanakan pada tanggal 27 s/d 30 Januari 2014. - AMI Periode ke 2 tahun 2014 dilaksanakan pada tanggal 7 s/d 11 Juli 2014 <p>Internal Quality Audit (AMI)</p> <ul style="list-style-type: none"> - AMI Period 1 Year 2014 was performed on 27th-30th January -, 2014. - AMI Period 2 Year 2014 was performed on 7th-11th July-, 2014 	<p>Audit Mutu Internal dilaksanakan untuk melihat efektivitas dari implementasi Sistem Manajemen Mutu dan juga merupakan persiapan menghadapi <i>Surveillance Audit</i>. Proses audit dilakukan dengan cara silang antar divisi dimana auditor berasal dari beberapa divisi. Hal tersebut selain untuk menjaga independensi dari AMI, juga untuk menambah sudut pandang dari proses audit itu sendiri.</p> <p>Internal Quality Audit is conducted to see the effectiveness of the implementation of Quality Management System and is also the preparation for the <i>Surveillance Audit</i>. The audit process is conducted by a cross-auditing between divisions where auditors are from various divisions. Furthermore, this notonly maintain the independence of AMI, but it also adds view point of the audit process itself.</p>

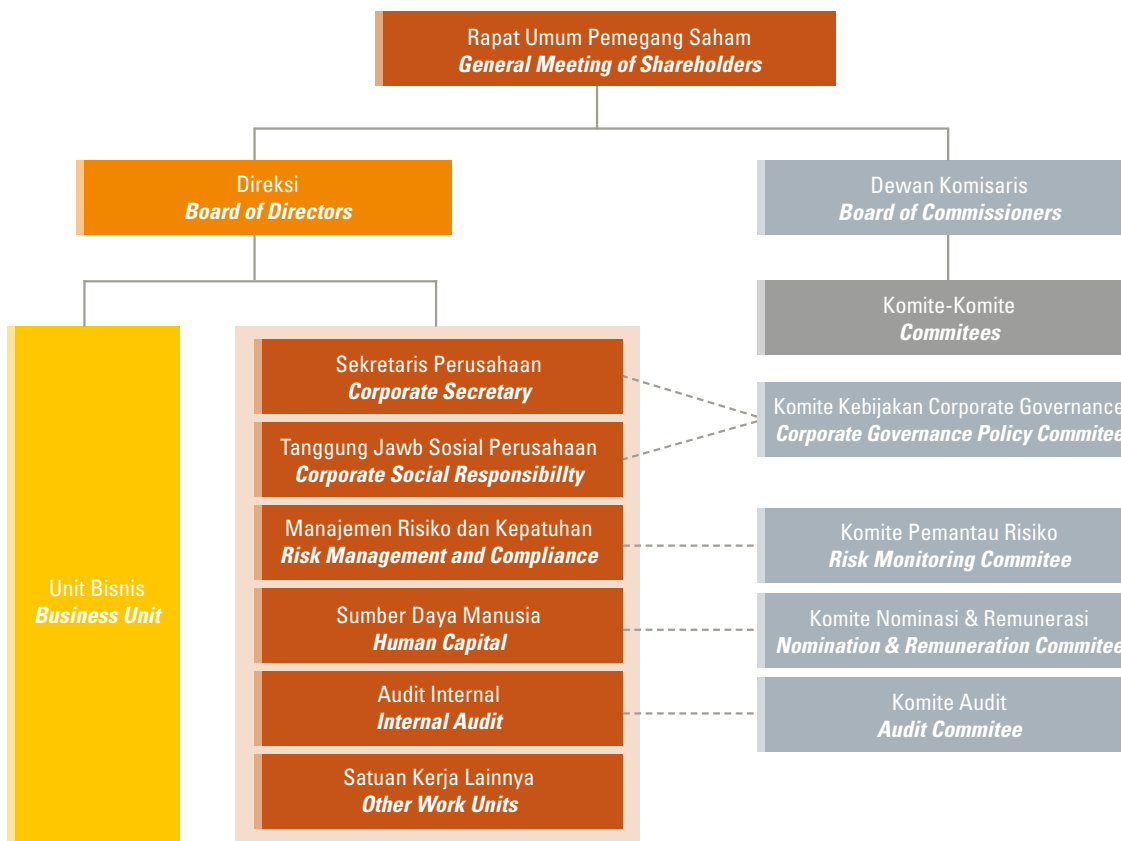
Aktivitas / Activity	Keterangan / Description
<p>Tinjauan Manajemen Rapat Tinjauan Manajemen telah dilaksanakan pada bulan 13 Februari dan 23 Juli 2014.</p> <p>Management Review The report on management review was performed on 13th February, 2014.</p>	<p>Tinjauan Manajemen merupakan sarana komunikasi internal antara Direktur dengan manajemen senior untuk membahas permasalahan strategis terkait implementasi ISO 9001:2008.</p> <p>Management Review is a means of internal communication between the Board of Directors with the senior management to discuss strategic issues related to the implementation of ISO 9001: 2008.</p>
<p>Pelatihan Auditor Telah dilakukan pelatihan untuk mendapatkan sertifikasi auditor internal ISO 9001:2008 pada tanggal 15 - 16 April 2014 yang diikuti oleh 12 (dua belas) orang karyawan Bakrieland.</p> <p>Training for Auditor Training was performed to achieve internal auditor certification namely ISO 9001:2008 on 15th - 16th April, 2014 which was participated in by 12 (twelve) employees of Bakrieland.</p>	<p>Salah satu persyaratan dari AMI adalah pihak auditor harus merupakan karyawan yang telah mendapatkan pelatihan dan bersertifikat Internal Quality Auditor.</p> <p>One of the requirements of AMI is the auditor must be a worker who has been trained and certified as an Internal Quality Auditor.</p>

STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN

Struktur tata kelola Bakrieland terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite yang membantu Dewan Komisaris serta satuan kerja yang membantu Direksi.

CORPORATE GOVERNANCE STRUCTURE

The Corporate Governance Structure of Bakrieland consists of the General Meeting of Shareholders, Board of Commissioners, Board of Directors, various Committees assisting the Board of Commissioners and the work units assisting the Board of Directors.



TATA KELOLA PERUSAHAAN

Corporate Governance

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

Sesuai Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ Perusahaan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.

Selama tahun 2014, Bakrieland menyelenggarakan 1 (satu) kali RUPS Tahunan (RUPST) pada tanggal 27 Juni 2014. Perusahaan juga telah mempublikasikan seluruh Surat Pemberitahuan penyelenggaraan RUPST itu melalui:

1. Pengumuman Pemberitahuan RUPS di 2 (dua) media cetak yaitu koran Bisnis Indonesia dan Investor Daily.
2. Pengumuman Panggilan RUPS di 2 (dua) media cetak yaitu koran Sinar Harapan dan Suara Pembaruan.
3. Pengumuman Keputusan RUPS di 2 (dua) media cetak yaitu koran Sinar Harapan dan Suara Pembaruan.

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (GMS)

According to Law No. 40 of 2007 regarding Limited Liability Companies, the General Meeting of Shareholders (GMS) is an organ of the Company which has authorities that are not granted to the Board of Directors or Board of Commissioners within the limits specified in this Act and/ or the Articles of Association.

In 2014, Bakrieland held 1 (one) Annual General Meeting (AGM) on 27th June, 2014. The Company published all Notification Letters regarding the AGM, which are as follows:

1. AGM Announcement Notice in 2 (two) printed media outlets, which were Bisnis Indonesia and Investor Daily.
2. Announcement on the AGM Invitation in 2 (two) printed media outlets, Sinar Harapan and Suara Pembaruan.
3. Announcement of the decisions of the AGM in 2 (two) printed media outlets, Sinar Harapan and Suara Pembaruan.

RUPS GMS	Agenda Agenda	Hasil Keputusan Decision	Realisasi Realization
RUPST 27 Juni 2014 / AGM 27th June, 2014	<p>Agenda Pertama dan Kedua</p> <ol style="list-style-type: none"> Persetujuan atas laporan pertanggungjawaban Direksi tentang jalannya Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013. Persetujuan dan pengesahan atas Neraca dan perhitungan Laba/ Rugi Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013. <p>First and Second Agenda</p> <ol style="list-style-type: none"> Approval of the Board of Directors accountability report on the operations of the Company for the fiscal year ending 31st December, 2013. Approval and ratification of the Balance Sheet and the calculation of profit/ loss of the Company for the fiscal year ending 31st December, 2013. 	<p>Agenda Pertama dan Kedua</p> <p>Memberikan persetujuan atas Laporan pertanggung jawaban Direksi tentang jalannya Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perusahaan serta pengesahan atas Neraca dan Perhitungan Laba/ Rugi Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal yang sama berikut pemberian pembebasan tanggung jawab serta pelunasan kepada Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013.</p> <p>First and Second Agenda</p> <p>Approved the accountability Report of the Board of Directors on the operations of the Company for the fiscal year ending 31st December, 2013 and the Supervisory Report of Board of Commissioners as well as the ratification of the Balance Sheet and the calculation of Profit/ Loss of the Company for the financial year ending on the same date, following the provision of disclaimer and acquittance to the Board of Directors for the actions of management and the Board of Commissioners on supervisory measures undertaken during the fiscal year ending 31st December, 2013.</p>	<p>Agenda Pertama dan Kedua</p> <p>Sesuai Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bakrieland Development Tbk Nomor : 140 tanggal 27 Juni 2014 dari Kantor Notaris Aryanti Artisari, S.H. M.Kn., rapat telah menyetujui keputusan agenda pertama dan kedua yaitu laporan pertanggung jawaban Direksi tentang jalannya Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perusahaan serta pengesahan atas Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal yang sama berikut pemberian pembebasan tanggung jawab serta pelunasan kepada Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013.</p> <p>First and Second Agenda</p> <p>According to the Deed of the General Meeting of Shareholders of PT Bakrieland Development Tbk No. 140 dated 27th June, 2014 from the Notary Office of Aryanti Artisari, SH MKn, the meeting has approved the decision of the first and second agenda namely the report of the Board of Directors on the operations of the Company for the fiscal year ending 31st December, 2013 and the Supervisory Report of the Board of Commissioners as well as the ratification of the Balance Sheet and the calculation of Profit/ Loss of the Company for the financial year ending on the same date, following the provision of disclaimer and acquittance to the Board of Directors for the actions of management and the Board of Commissioners on supervisory measures undertaken during the fiscal year ending 31st December, 2013.</p>
	<p>Agenda Ketiga</p> <ol style="list-style-type: none"> Persetujuan penunjukkan Kantor Akuntan Publik Independen untuk melakukan audit atas buku Perusahaan untuk tahun buku 2014. <p>Third Agenda</p> <ol style="list-style-type: none"> Approval of the appointment of an independent public accounting firm to audit the books of the Company for the financial year 2014. 	<p>Agenda Ketiga</p> <p>Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perusahaan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit terhadap buku Perusahaan untuk tahun buku 2014 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2014, serta menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut berikut persyaratan-persyaratannya.</p> <p>Third Agenda</p> <p>Approved the granting of authority to the Board of Commissioners of the Company to appoint an independent public accounting firm to audit the books of the Company for the financial year 2014 and other periods in the fiscal year 2014, and determine the honorarium of the Public Accountant as well as the requirements.</p>	<p>Agenda Ketiga</p> <p>Dewan Komisaris menyetujui penunjukan KAP Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan (KNTR) untuk dapat mengaudit laporan keuangan konsolidasian Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dengan fee yang diajukan berdasarkan rekomendasi Komite Audit PT Bakrieland Development Tbk sesuai surat Perusahaan tertanggal 7 Oktober 2014 perihal Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Audit Tahun Buku Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2014.</p> <p>Third Agenda</p> <p>The Board of Commissioners approved the appointment of the Public Accounting Firm Kosasih, Nurdiyaman Tjahjo & Partners (KNTR) to audit the Company's consolidated financial statements for the year ending on 31st December, 2014 with the fee based on the recommendation of the Audit Committee of PT Bakrieland Development Tbk based on the company letter dated 7th October, 2014 regarding the agreement to appoint the Public Accounting Firm to audit in the Financial Year Ending 31st December, 2014.</p>

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Corporate Governance

RUPS GMS	Agenda Agenda	Hasil Keputusan Decision	Realisasi Realization
	<p>Agenda Keempat 4. Persetujuan penetapan Direktur Independen.</p> <p>Fourth Agenda 4. The approval of the determination of Independent Directors.</p>	<p>Agenda Keempat Menyetujui penetapan Bapak Charles Marc Dressler sebagai Direktur Independen Perusahaan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini untuk periode 2014-2015 dengan tanpa mengurangi masa pengurusan beliau sejak pengangkatan sebagai Direksi Perusahaan.</p> <p>Sehingga selanjutnya susunan pengurus Perusahaan adalah sebagai berikut :</p> <p>Dewan Komisaris : Presiden Komisaris : Bambang Irawan Hendradi Komisaris : Supartono Komisaris : Armansyah Yamin Komisaris Independen : Lukman Purnomosidi Komisaris Independen : Kanaka Puradiredja</p> <p>Direksi : Presiden Direktur : Ambono Janurianto Direktur : Agus Jayadi Alwie Direktur Independen : Charles Marc Dressler</p> <p>Fourth Agenda Approved the appointment of Mr. Charles Marc Dressler as an Independent Director of the Company effective from the closing of this meeting for the period of 2014-2015 without reducing his work tenure since his appointment as a Director of the Company.</p> <p>Thus the composition of the Company's Management becomes:</p> <p>Board of Commissioners : President Commissioner : Bambang Irawan Hendradi Commissioner : Supartono Commissioner : Armansyah Yamin Independent : Lukman Purnomosidi Independent Commissioner : Kanaka Puradiredja</p> <p>Board of Directors : President Director : Ambono Janurianto Director : Agus Jayadi Alwie Independent Director : Charles Marc Dressler</p>	<p>Agenda Keempat Sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bakrieland Development Tbk Nomor : 141 tanggal 27 Juni 2014 dari Kantor Notaris Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., susunan pengurus Perusahaan sebagai berikut :</p> <p>Dewan Komisaris : Presiden Komisaris : Bambang Irawan Hendradi Komisaris : Supartono Komisaris : Armansyah Yamin Komisaris Independen : Lukman Purnomosidi Komisaris Independen : Kanaka Puradiredja</p> <p>Direksi : Presiden Direktur : Ambono Janurianto Direktur : Agus Jayadi Alwie Direktur Independen : Charles Marc Dressler</p> <p>Fourth Agenda In accordance to the Statement Deed of PT Bakrieland Development Tbk on the Decision of the Meeting No. 141 dated 27th June, 2014 from the Notary Office Aryanti Artisari, SH, MKn, the composition of the Company's management is:</p> <p>Board of Commissioners : President Commissioner : Bambang Irawan Hendradi Commissioner : Supartono Commissioner : Armansyah Yamin Independent Commissioner : Lukman Purnomosidi Independent Commissioner : Kanaka Puradiredja</p> <p>Board of Directors : President Director : Ambono Janurianto Director : Agus Jayadi Alwie Independent Director : Charles Marc Dressler</p>

DEWAN KOMISARIS

Undang-Undang Perseroan Terbatas juga menyebutkan bahwa Dewan Komisaris adalah Organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Hal itu dilakukan dengan itikad yang baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab.

Persyaratan, Keanggotaan dan Masa Jabatan

Persyaratan, keanggotaan dan masa jabatan anggota Dewan Komisaris Bakrieland secara keseluruhan telah memenuhi persyaratan formal dan material yang berlaku. Persyaratan formal bersifat umum,

BOARD OF COMMISSIONERS

The Law on Limited Liability Companies states that the Board of Commissioners is the organ in charge of supervising the Company in general and/ or specifically based on the Articles of Association and provides advice to the Board of Directors. This shall be conducted in good faith, prudently, and responsibly.

Requirements, Membership and Terms of Office

Bakrieland's Board of Commissioners has met the requirements, membership and term of office stated by the applicable formal and material requirements. The formal requirements are general, according to

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sementara persyaratan material bersifat khusus, disesuaikan dengan kebutuhan dan sifat bisnis Perusahaan.

Dewan Komisaris Bakrieland terdiri dari 5 (lima) anggota, yaitu: 1 (satu) Presiden Komisaris, 2 (dua) Komisaris dan 2 (dua) Komisaris Independen. Anggota Dewan Komisaris diseleksi oleh Komite Nominasi dan Remunerasi dan diangkat melalui mekanisme RUPS, dengan periode jabatan masing-masing 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali sesuai keputusan RUPS. Jabatan anggota Dewan Komisaris akan berakhir apabila mengundurkan diri, tidak lagi memenuhi persyaratan, meninggal dunia, atau diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

Susunan Dewan Komisaris per 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

1. Bambang Irawan Hendradi (Presiden Komisaris)
2. Supartono (Komisaris)
3. Armansyah Yamin (Komisaris)
4. Lukman Purnomosidi (Komisaris Independen)
5. Kanaka Puradiredja (Komisaris Independen)

Periode Jabatan Dewan Komisaris Bakrieland

Work Tenure of Bakrieland's Board of Commissioners

No	Nama Name	Jabatan Position	Periode Jabatan Work Tenure
1	Bambang Irawan Hendradi	Presiden Komisaris President Commissioner	Juni 2012 - Mei 2015 June 2012 - May 2015
2	Supartono	Komisaris Commissioner	Juni 2012 - Mei 2015 June 2012 - May 2015
3	Armansyah Yamin	Komisaris Commissioner	Juni 2012 - Mei 2015 June 2012 - May 2015
4	Lukman Purnomosidi	Komisaris Independen Independent Commissioner	Juni 2012 - Mei 2015 June 2012 - May 2015
5	Kanaka Puradiredja	Komisaris Independen Independent Commissioner	Juni 2012 - Mei 2015 June 2012 - May 2015

Tugas dan Tanggung Jawab

Dewan Komisaris Bakrieland mempunyai tanggung jawab mengawasi manajemen operasional yang dilaksanakan oleh Direksi. Selain itu, Dewan Komisaris juga memberikan saran serta nasihat kepada Direksi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar, Keputusan RUPS Perusahaan, peraturan serta undang-undang yang berlaku.

the laws and regulations in force, while the material requirements are specific, tailored to the needs and nature of the Company's business.

Bakrieland's BOC consists of five (5) members, which are: 1 (one) President Commissioner, 2 (two) Commissioners and 2 (two) Independent Commissioner. Members of the Board of Commissioners are selected by the Nomination and Remuneration Committee and appointed through the mechanism of GMS, with respective period of office of 3 (three) years and may be reappointed according to the decision of the GMS. The work tenure of the Board of Commissioners will end upon resignation, or should they no longer meet the requirements, death, or dismissal by the GMS.

The Composition of the Board of Commissioners of Bakrieland as of 31st December, 2014 is:

1. Bambang Irawan Hendradi (President Commissioner)
2. Supartono (Commissioner)
3. Armansyah Yamin (Commissioner)
4. Lukman Purnomosidi (Independent Commissioner)
5. Kanaka Puradiredja (Independent Commissioner)

Duties and responsibilities

Bakrieland's Board of Commissioners has the responsibility of supervising the operational management conducted by the Board of Directors. In addition, the Board also provides advice and counseling to the Board of Directors in accordance with the provisions set out in the Articles of Association, the Company AGM Decisions, as well as the applicable regulations and laws.

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Corporate Governance

Sepanjang tahun 2014, Dewan Komisaris tidak menemukan pelanggaran hukum dan peraturan di sektor properti yang dilakukan oleh manajemen Perusahaan.

The Board of Commissioners did not find any violations of the laws and regulations in the property sector performed by the Company's Management during 2014.

Pengungkapan Prosedur Penetapan Remunerasi

Kebijakan penetapan remunerasi bagi Dewan Komisaris mengacu pada Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 006/KOM-BLD/SK/XII/2011, yang mengatur mengenai prosedur remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris. Surat Keputusan ini merupakan penyempurnaan dari Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 197/Kom-BLD/SK/XII/09. Sesuai Anggaran Dasar Bakrieland, remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan melalui RUPS. Sedangkan komponen penghasilan Dewan Komisaris terdiri dari gaji dan tunjangan.

Disclosure of the Procedure to Decide Remuneration

The policy on remuneration for the Board of Commissioners refers to the Decree of the Board of Commissioners No. 006/KOM-BLD/SK/XII/2011, which regulates the remuneration for the Board of Directors and Board of Commissioners. This Decree is a refinement of the Decree of the Board of Commissioners No. 197/Kom-BLD/SK/XII/09. In accordance to the Articles of Association of Bakrieland, the remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors is determined through the GMS. The components of the income of the Board of Commissioners are salary and allowances.

Struktur remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi tahun 2014

The Board of Commissioners and Board of Directors Remuneration Structure in 2014

Komponen Remunerasi Remuneration Component	Gaji (Rp)/tahun Salary (Rp)/year
Dewan Komisaris Board of Commissioners	6.519.000.000
Direksi Board of Directors	8.708.139.084
Total (Rp)	15.227.139.084

Rapat Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2014, Dewan Komisaris telah melakukan rapat 5 (lima) kali. Berikut ini agenda rapat tersebut.

Board of Commissioners Meeting

Throughout 2014, the Board of Commissioners held 5 (five) meetings. Below is the agenda of the meetings:

No	Tanggal Date	Agenda Agenda	Kehadiran Attendance				
			IHS	LP	KP	SP	AY
1	4-Mar-14	1. Kinerja Keuangan 31 Desember 2013 2. <i>Up-date</i> Restrukturisasi <i>Equity-Link Bonds</i> 3. Masa Jabatan Komisaris Independen dan Direktur Independen 1. Financial Performance December 31, 2013 2. Up-date Restructuring of Equity-Link Bonds 3. Tenure Independent Commissioner and Independent Director	√	√	√	-	√
2	13-Mei-14	1. Pembahasan Laporan Keuangan 31 Desember 2013 2. <i>Up-date</i> Restrukturisasi <i>Equity-Linked Bonds</i> 3. Rencana RUPS BLD 1. Discussion of Financial Statements as of December 31, 2013 2. Up-date Restructuring of Equity-Link Bonds 3. BLD RUPS Plan	√	√	√	√	√
3	8-Jul-14	Presentasi Transaksi BNS BNS Transaction Presentation	√	√	√	-	√

No	Tanggal Date	Agenda Agenda	Kehadiran Attendance				
			IHS	LP	KP	SP	AY
4	9-Sept-14	Pembahasan Laporan Keuangan Q3 per 30 September 2014 Discussion of Financial Report Q3 as of 30 September 2014	√	√	√	-	√
5	2-Des-14	<i>Budget & Business Plan 2015 – 2019</i>	√	√	√	-	-

Keterangan :

IHS: Bambang Irawan Hendradi, **KP:** Kanaka Puradiredja, **LP:** Lukman Purnomosidi, **AY:** Armansyah Yamin, **SP:** Supartono

Jabatan Rangkap Komisaris di Luar Perusahaan

Anggota Komisaris telah menandatangani Surat Pernyataan Rangkap Jabatan untuk memenuhi prinsip independensi dan transparansi dalam GCG.

Concurrent Positions of the Commissioners in Positions outside the Company

Members of the Board of Commissioners signed the Statement Letter on Concurrent Positions in order to meet the principles of independence and transparency in the application of GCG

Hubungan Afiliasi dengan Anggota Direksi, Komisaris, dan Pemegang Saham Pengendali

Dewan Komisaris Bakrieland tidak ada yang memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, antar sesama anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Pengendali. Hal ini dinyatakan melalui Surat Pernyataan Tidak Memiliki Benturan Kepentingan yang telah ditandatangani oleh Dewan Komisaris untuk masa jabatan tahun 2014.

Affiliation with members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and the Controlling Shareholders

No member of Bakrieland's Board of Commissioners is affiliated with any member of the Board of Directors, among members of the Board of Commissioners, and with the Controlling Shareholders. This is expressed through the Statement of No Conflict of Interest, which is signed by the members of the Board of Commissioners for the work tenure of 2014.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komisaris

Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perusahaan maupun usaha Perusahaan, dan memberi nasihat kepada Direksi. Pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris dilaksanakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris akan selalu mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Pengawasan dilakukan oleh Dewan Komisaris terhadap pengelolaan Perusahaan oleh Direksi.
3. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris bertindak sebagai majelis dan tidak dapat bertindak sendiri-sendiri mewakili Dewan Komisaris.
4. Pengawasan tidak boleh berubah menjadi pelaksanaan tugas-tugas eksekutif, kecuali dalam

Work Charter of the Board of Commissioners

The Board of Commissioners shall supervise the policies in management, the course of management in general, both of the Company and the Company's business, and provide advice to the Board of Directors. The supervision and the provision of advice by the Board of Commissioners is conducted with the following principles:

1. In performing supervision, the Board of Commissioners will always comply with the Articles of Association and the applicable regulations
2. Supervision is conducted by the Board of Commissioners on the management of the Company by the Board of Directors.
3. In performing supervision, the Board of Commissioners acts as an assembly and cannot act on their own on behalf of the Board of Commissioners.
4. Supervision cannot transform into the implementation of executive tasks, except in

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Corporate Governance

hal Perusahaan tidak mempunyai Direksi, dengan kewajiban dalam waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah tidak ada Direksi harus memanggil RUPS untuk mengangkat Direksi.

5. Pengawasan dilakukan tidak hanya dengan sekedar menyetujui atau tidak menyetujui terhadap tindakan-tindakan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris, tetapi pengawasan dilakukan secara pro-aktif, mencakup semua aspek bisnis Perusahaan. Dewan Komisaris dapat menggunakan jasa profesional yang mandiri dan/ atau membentuk Komite untuk membantu tugas Dewan Komisaris.

KOMISARIS INDEPENDEN

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang:

1. Berasal dari luar Perusahaan
2. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan
3. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perusahaan, Dewan Komisaris, Direksi atau pemegang Saham Utama Perusahaan.
4. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.

Kriteria Penentuan Komisaris Independen

Untuk dapat diangkat menjadi Komisaris Independen, selain harus memenuhi persyaratan formal dan material, juga harus memenuhi persyaratan independensi sebagai berikut:

1. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Pengendali Perusahaan.
2. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Direktur dan/atau Dewan Komisaris lainnya di Perusahaan.
3. Tidak menjabat sebagai Direksi di Perusahaan yang terafiliasi dengan Perusahaan.
4. Memahami peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
5. Tidak bekerja di Perusahaan atau afiliasinya dalam kurun waktu enam bulan terakhir.
6. Tidak mempunyai keterkaitan finansial, baik langsung maupun tidak langsung dengan Perusahaan atau Perusahaan lain yang menyediakan jasa dan produk kepada Perusahaan dan afiliasinya.

the event the Company does not have a Board of Directors, with the obligation not later than 60 (sixty) days after the absence of the Board of Directors, the Board of Commissioners must request for a General Meeting of Shareholders to appoint new members of the Board of Directors.

5. Supervision not only is performed by simply approving or disapproving the actions that require the approval of the Board of Commissioners, supervision is performed proactively, covering all aspects of the Company's business. The Board of Commissioners can use the services of an independent professional and/ or establish Committees to assist the Board of Commissioners.

INDEPENDENT COMMISSIONER

The Independent Commissioner is a member of the Board of Commissioners who:

1. Comes from outside the Company
2. Does not own Company shares, either directly or indirectly
3. Is not affiliated with the Company, the Board of Commissioners, Board of Directors or shareholders of the Company.
4. Does not have any business relationship, directly or indirectly related to the business of the Company.

Criteria of the Independent Commissioner

To be appointed as Independent Commissioner, in addition to must meet the formal and material requirements, the following requirements of independence must also be fulfilled:

1. Not affiliated with the controlling shareholders of the Company.
2. Not affiliated with the Director and/ or the Board of Commissioners of the Company.
3. Does not serve as Director of a Company that is affiliated with the Company.
4. Understands the laws and regulations in the capital market.
5. Has not worked in the Company or its affiliates within the past six months year.
6. Does not have financial relations, either directly or indirectly with the Company or any other companies that provide services and products to the Company and its affiliates.

- | | |
|--|---|
| <p>7. Bebas dari kepentingan dan aktivitas bisnis atau hubungan lain yang dapat menghalangi atau mengganggu kemampuan Komisaris Independen untuk bertindak atau berpikir secara bebas di lingkup Perusahaan.</p> <p>8. Jumlah Komisaris Independen harus dapat menjamin agar mekanisme pengawasan berjalan efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu dari Komisaris Independen harus mempunyai latar belakang akuntansi atau keuangan.</p> <p>9. Pemilihan Komisaris Independen harus memperhatikan pendapat pemegang saham minoritas yang dapat disalurkan melalui Komite Nominasi dan Remunerasi.</p> | <p>7. Free of the business interests and activities or other relations which could impede or interfere with the ability of the independent commissioner to act or think freely in the scope of the Company.</p> <p>8. The scope of the Independent Commissioner should have the ability to ensure that the control mechanism is effective and in accordance with the legislations. One of the Independent Commissioners must have an accounting or finance background.</p> <p>9. The election of an Independent Commissioner shall also consider the opinions of the minority shareholders to be channeled through the Nomination and Remuneration Committee.</p> |
|--|---|

Pernyataan Independensi Komisaris Independen

Dewan Komisaris Bakrieland tidak ada yang memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, antar sesama anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Pengendali. Hal ini dinyatakan melalui Surat Pernyataan Tidak Memiliki Benturan Kepentingan yang telah ditandatangani oleh Dewan Komisaris untuk masa jabatan tahun 2014.

Komisaris Independen telah menandatangani Surat Pernyataan Benturan Kepentingan untuk masa jabatan tahun 2014. Surat tersebut berisi pernyataan, termasuk namun tidak terbatas pada:

1. Tidak menerima atau memberikan suatu hal dalam bentuk apapun kepada pihak lain yang dapat mempengaruhi independensi.
2. Tidak ikut serta dalam proses pengambilan keputusan yang mengandung unsur benturan kepentingan oleh pemegang saham independen Perusahaan.
3. Mendahulukan kepentingan ekonomis Perusahaan di atas kepentingan ekonomis pribadi, keluarga, dan pihak lainnya.

KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris telah membentuk komite-komite sebagai pendukung dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, serta untuk merumuskan kebijakan Dewan Komisaris sesuai ruang lingkup tugas komite yang bersangkutan. Penetapan pembentukan komite-komite dilakukan melalui Surat Keputusan Dewan

Statement of Independence by the Independent Commissioner

None of the members of the Board of Commissioners of Bakrieland have affiliated relations to the members of the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners, and the Controlling Shareholders. This is expressed through the Statement of No Conflict of Interest, which has been signed by the Board of Commissioners for the work tenure of 2014.

The Independent Commissioners have signed a Statement of Conflict of Interest for the work tenure of 2014. The letter contains the statements, including but not limited to:

1. Does not accept or give anything in any form to any other party that may affect independence.
2. Does not participate in the decision-making process that contains elements of conflict of interest by the independent shareholders of the Company.
3. Prioritize the economic interests of the Company above personal and family economic interests as well as the economic interests of other parties.

COMMITTEES UNDER THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners has established committees in support of carrying out its duties and obligations, and to formulate the policies of the Board of Commissioners based on the scope of the tasks of the committees. The formation of the committees is conducted based on the Decree of the Board of

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Corporate Governance

Komisaris dan setiap komite diketuai oleh Komisaris Independen. Dewan Komisaris Bakrieland dibantu oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi, serta Komite Kebijakan *Corporate Governance* dalam menjalankan tugasnya.

Komite Audit

Komite Audit Bakrieland dibentuk berdasarkan Surat Keputusan No. 01/SK/Kom-BLD/X/13 tentang Pemberhentian, Pengangkatan dan Pengesahan Komite Audit masa bakti kepengurusan tanggal 1 Oktober 2013 sampai dengan selambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS tahun 2015.

Tugas utama Komite Audit adalah mendorong diterapkannya tata kelola Perusahaan yang baik, terbentuknya struktur pengendalian internal yang memadai, meningkatkan kualitas keterbukaan dan pelaporan keuangan serta mengkaji ruang lingkup, ketepatan, kemandirian dan objektivitas auditor eksternal.

Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dan membantu Dewan Komisaris dengan melakukan tugas-tugas antara lain:

1. Menyampaikan laporan tertulis kepada Dewan Komisaris paling sedikit sekali dalam satu kuartal, yang menyajikan aktivitas dan rekomendasi Komite Audit serta masalah-masalah signifikan yang membutuhkan perhatian Dewan Komisaris, jika ada;
2. Menyiapkan laporan yang akan dimasukkan ke dalam laporan tahunan yang antara lain memuat aktivitas Komite Audit;
3. Membuat laporan khusus kepada Dewan Komisaris jika diminta;
4. Melakukan *oversight* atas ketaatan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perusahaan;
5. Melakukan *oversight* atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perusahaan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya;
6. Melakukan *oversight* terhadap perencanaan Audit Eksternal serta memonitor pelaksanaan kerja Auditor Eksternal;

Commissioners and each committee is chaired by an Independent Commissioner. Bakrieland's Board of Commissioners is assisted by the Audit Committee, Risk Monitoring Committee, Nomination and Remuneration Committee, and Corporate Governance Committee in carrying out its duties.

Audit Committee

The Audit Committee of Bakrieland was established based on the Decree No. 01/SK/Kom-BLD/X/13 on the Termination, Appointment and Approval of the Audit Committee with the work period of 1st October 2013 until no later than 30 (thirty) days after the AGM in 2015.

The main tasks of the Audit Committee are to encourage the implementation of good corporate governance, the establishment of an adequate internal control structure, improve the quality of transparency and financial reporting, and review the scope, accuracy, independence and objectivity of the external auditor.

The Audit Committee is responsible to the Board of Commissioners and assists the Board of Commissioners by performing the following tasks:

1. Deliver written reports to the Board of Commissioners at least once a quarter, which presents the activities and recommendations of the Audit Committee as well as the significant issues that require the attention of the Board of Commissioners, if any;
2. Prepare the report that will be included in the annual report which shall include the activities of the Audit Committee;
3. Formulate special report to the Board of Commissioners if requested;
4. Perform oversight on the Company's compliance with the laws and regulations in capital market and other laws related to the Company's business;
5. Conduct oversight of the financial information that will be issued by the Company as the financial statements, projections, and other financial information;
6. Conduct oversight of the External Audit planning and monitor the implementation of tasks by the External Auditor;

7. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Auditor Eksternal;

7. Provide recommendations to the Board of Commissioners on the appointment of External Auditor;

Profil Komite Audit

Susunan Komite Audit per 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

Nama Name	Jabatan Position	Keputusan Dewan Komisaris Decree of the BOC	Bidang Keahlian Field of Expertise
Kanaka Puradiredja	Ketua Komite Chairman	No. 01/SK/Kom-BLD/X/13	Keuangan Finance
Mohammad Hassan	Anggota Member	No. 01/SK/Kom-BLD/X/13	Manajemen Risiko Risk Management
Indra Safitri	Anggota Member	No. 01/SK/Kom-BLD/X/13	Hukum Legal

Audit Committee's Profile

The composition of the Audit Committee as of December 31, 2014 are as follows:

Kanaka Puradiredja

Daftar riwayat hidup selengkapnya dapat dilihat pada bagian riwayat hidup Dewan Komisaris.

Kanaka Puradiredja

His complete resume can be seen in the Board of Commissioners' Profile.

Mohammad Hassan

Daftar riwayat hidup selengkapnya dapat dilihat pada bagian riwayat hidup Profil Komite Audit.

Mohammad Hassan

His complete resume can be seen in the Audit Committee Profile.

Indra Safitri

Daftar riwayat hidup selengkapnya dapat dilihat pada bagian riwayat hidup Profil Komite Audit.

Indra Safitri

His complete resume can be seen in the Audit Committee Profile.

Agenda Rapat dan Kehadiran Komite Audit

Penyelenggaraan rapat sepanjang tahun 2014 tersebut meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

Audit Committee's Meeting and Attendance

Organizing meetings throughout 2014 includes the following activities:

Tanggal Date	Agenda Agenda	Kehadiran Attendance		
		Kanaka Puradiredja	Mohammad Hassan	Indra Safitri
21 Jan 2014	Pembahasan Progress Audit Laporan Keuangan per tanggal 31 Des 2013 PT BLD Tbk. Discussion on the Progress of the Audit of PT BLD Tbk Financial Statements as of 31st December, 2013.	√	√	√
3 Feb 2014	Pembahasan <i>Audit Issue</i> terkait proses audit Laporan Keuangan per tanggal 31 Des 2013 yang dilakukan di SBU. Discussion on the audit issues related to the process of audit of the Financial Statements as of 31st December, 2013 performed in SBU.	√	√	√
7 Feb 2014	Pembahasan <i>Audit Issue</i> terkait proses audit Laporan Keuangan per tanggal 31 Desember 2013 yang dilakukan di PT Graha Andrasentra Propertindo. Discussion on the audit issues related to the process of audit of the Financial Statements as of 31st December, 2013 performed in PT Graha Andrasentra Propertindo.	√	√	√

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Corporate Governance

Tanggal Date	Agenda Agenda	Kehadiran Attendance		
		Kanaka Puradiredja	Mohammad Hassan	Indra Safitri
24 Feb 2014	Progress Audit Laporan Keuangan 31 Desember 2013 Progress of the Audit of Financial Statements as of 31st December, 2013	√	√	√
4 Mar 2014	Progress Audit Laporan Keuangan 31 Desember 2013 bersama Management PT GAP, PT BSU, dan PT BNS. Progress of the Audit of Financial Statements as of 31st December, 2013 together with the Management of PT GAP, PT BSU, and PT BNS.	√	√	√
13 Mar 2014	Pembahasan Progress Audit Laporan Keuangan Per 31 Desember 2013 bersama Management PT GAP, PT BSU dan PT BNS. Discussion on the Progress of the Audit of Financial Statements as of 31st December, 2013 together with the Management of PT GAP, PT BSU, and PT BNS.	√	√	√
24 Mar 2014	Pembahasan Progress Audit Laporan Keuangan Per 31 Desember 2013 bersama Management PT GAP, PT BSU dan PT BNS. Discussion on the Progress of the Audit of Financial Statements as of 31st December, 2013 together with the Management of PT GAP, PT BSU, and PT BNS.	√	√	√
25 Apr 2014	Pembahasan Draft Laporan Audit Perusahaan Per 31 Desember 2013. Discussion on the Draft of the Company's Audit Report as of 31st December, 2013.	√	-	√
26 Aug 2014	Pembahasan Draft Laporan Keuangan Perusahaan per 30 Juni 2014. Discussion on the Draft of the Financial Statements of Bakrieland as of 30th June, 2014.	√	√	√
29 Oct 2014	Pembahasan Draft Laporan Keuangan Perusahaan per 30 September 2014. Discussion on the Draft of the Financial Statements of Bakrieland as of 30th September, 2014.	√	√	√
17 Dec 2014	Pembahasan Progress Audit Laporan Keuangan Perusahaan per 31 Desember 2014. Discussion on the Progress of the Audit of Financial Statements of Bakrieland as of 31st December, 2014.	√	-	√

Independensi Komite Audit

Sejalan dengan Piagam Komite Audit, Komite menjalankan tugas dan tanggung jawab secara profesional dan independen. Komite mendukung Dewan Komisaris dalam melakukan evaluasi dan pengawasan tentang proses pelaporan keuangan, proses Audit Internal dan eksternal serta praktik *Good Corporate Governance* berjalan dengan baik dan sesuai prosedur.

Independence of the Audit Committee

In line with the Charter of the Audit Committee, the Committee performs its duties and responsibilities in a professional and independent manner. The Committee supports the Board of Commissioners in the evaluation and supervision of the financial reporting process, internal and external audit processes and ensuring that the practices of good corporate governance runs smoothly according to the procedure.

Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko Bakrieland dibentuk berdasarkan SK Dewan Komisaris No. 158/SK/Kom-BLD/HIS/X/07 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Komite Pemantau Risiko.

Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko sebagai berikut:

- Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris tentang masalah-masalah pengelolaan risiko.
- Mengevaluasi sistem pengelolaan risiko dan pengawasan internal.
- Menyediakan informasi kepada Dewan Komisaris terkait masalah-masalah sebagai langkah melakukan antisipasi risiko.

Profil Komite Pemantau Risiko

Susunan Komite Pemantau Risiko per 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

Nama Name	Jabatan Position	Keputusan Dewan Komisaris Decree of the BOC	Bidang Keahlian Field of Expertise
Lukman Purnomosidi	Ketua Komite Chairman of The Committee	158/SK/Kom-BLD/HIS/IX/07	Ekonomi Economic
Supartono	Anggota Member	158/SK/Kom-BLD/HIS/IX/07	Manajemen Management

Lukman Purnomosidi

Daftar riwayat hidup selengkapnya dapat dilihat pada bagian riwayat hidup Dewan Komisaris.

Supartono

Daftar riwayat hidup selengkapnya dapat dilihat pada bagian riwayat hidup Dewan Komisaris.

Agenda Rapat dan Kehadiran Komite Pemantau Risiko

Tanggal Date	Agenda Agenda	Kehadiran Attendance	
		Lukman Purnomosidi	Supartono
21 Januari 2014	Pembahasan Rencana Kerja Komite Pemantau Risiko Discussion on the Work Plan of the Risk Monitoring Committee	√	-
25 Apr 2014	Pemaparan Progres Rencana Kerja Divisi Risk Management & Compliance tahun 2014 Explanation of the Progress of the 2014 Work Plan of the Risk Management & Compliance Division	√	√

Risk Monitoring Committee

The Risk Monitoring Committee of Bakrieland was established based on the Decree of the Board of Commissioners No. 158/SK/Kom-BLD/HIS/X/07 on the Establishment and Appointment of Risk Monitoring Committee.

The duties and responsibilities of the Risk Monitoring Committee are:

- Provide input to the Board of Commissioners on risk management issues.
- Evaluate the risk management and internal control system.
- Provide information to the Board of Commissioners related to issues as measures to anticipate risks.

Risk Management Committee's Profile

The composition of the Risk Management Committee as of December 31, 2014 are as follows:

Lukman Purnomosidi

His complete resume can be seen in the Board of Commissioners' Profile.

Supartono

His complete resume can be seen in the Board of Commissioners' Profile.

Risk Management Committee's Meeting and Attendance

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Corporate Governance

Tanggal Date	Agenda Agenda	Kehadiran Attendance	
		Lukman Purnomosidi	Supartono
25 Aug 2014	Pemaparan Divisi RMC terkait pembuatan Kebijakan dan Revisi Kebijakan Perusahaan Explanation by the RMC Division on the policy-making and the revision of the Company's policies	√	-
25 Nov 2014	Pembahasan Analisa Risiko pada Unit Usaha atas aktivitas penting di Unit Usaha Discussion on the Risk Analysis in the Business Units and important activities in the Business Units	√	-

Penyelenggaraan rapat sepanjang tahun 2014 tersebut meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Pembahasan mengenai penerapan *Quality Management System* sebagai implementasi dari ISO 9001:2008.
2. Pembahasan mengenai aktivitas pembuatan kebijakan baru dan revisi kebijakan
3. Pembahasan mengenai *Task Monitoring System* sebagai aktivitas/fungsi *reminder* atas dokumen-dokumen yang mengandung unsur jatuh tempo.
4. Pembahasan mengenai aktivitas analisa risiko atas transaksi penting Perusahaan yang dilihat dari aspek risiko keuangan, operasional, dan hukum.

Independensi Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko menjalankan tugas dan tanggung jawab secara profesional dan independen. Komite mendukung Dewan Komisaris dalam mengevaluasi sistem pengelolaan risiko dan pengawasan internal, serta tugas-tugas lainnya.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi dibentuk berdasarkan SK Dewan Komisaris No.001/SK/Kom-BLD/X/07 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Komite Nominasi dan Remunerasi, dan pada tahun 2009 dilakukan perubahan susunan keanggotaan melalui SK Dewan Komisaris No. 02A/SK-KOM/BLD/VII/2009 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi.

Tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

1. Menyusun kriteria seleksi dan prosedur nominasi anggota Dewan Komisaris, Direksi dan para eksekutif, sampai dengan satu tingkat di bawah Direksi.

Meetings held throughout 2014 include the following activities:

1. The discussion of the application of the Quality Management System as the implementation of ISO 9001: 2008.
2. Discussion of policy-making activities of new and revised policies
3. Discussion of Task Monitoring System as an activity/ function of reminder on documents that contain elements of maturity.
4. Discussion of risk analysis activities on the Company's important transactions viewed from the aspects of financial risk, operational, and legal.

Independence of the Risk Monitoring Committee

The Risk Monitoring Committee performs its duties and responsibilities in a professional and independent manner. The Committee supports the Board of Commissioners in evaluating the risk management and internal control system as well as other tasks.

Nomination and Remuneration Committee

The Nomination and Remuneration Committee was established based on the Decree of the Board of Commissioners No.001/SK/Kom-BLD/X/07 on the Establishment and Appointment of Nomination and Remuneration Committee, and in 2009 changes were made to the membership of the Board of Commissioners through the Decree No. 02A/SK-KOM/BLD/VII/2009 on the Change of Membership of the Nomination and Remuneration Committee.

The duties and Responsibilities of the Nomination and Remuneration Committee are:

1. Formulate the criteria for the procedures to select and nominate the members of the Board of Commissioners, Board of Directors and the Executives up to one level below the Board of Directors.

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 2. Membuat sistem penilaian dan memberikan rekomendasi tentang jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi. 3. Terlibat dalam proses perekrutan (wawancara) dan memberikan rekomendasi atas calon anggota Dewan Komisaris, Direksi dan para Eksekutif sampai dengan satu tingkat di bawah Direksi agar tercipta penempatan orang yang tepat pada posisi yang tepat (the right man on the right place). 4. Memberikan rekomendasi tentang kebijakan besaran gaji, tunjangan dan fasilitas yang kompetitif dan mengacu pada perkembangan pasar, untuk anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi. 5. Mengawasi proses pelaksanaan nominasi dan remunerasi agar tidak menyimpang dari prosedur yang telah ditetapkan. 6. Mengadakan pertemuan rutin para anggota Komite minimal 4 (empat) bulan sekali atau 3 (tiga) kali dalam setahun, masing-masing pertemuan dihadiri oleh minimal 2 (dua) anggota Komite yang salah satunya adalah Ketua Komite, dan membuat berita acara pertemuan. | <ol style="list-style-type: none"> 2. Formulate the assessment system and provide recommendations on the number of members of the Board of Commissioners and Board of Directors. 3. Get involved in the recruitment process (interview) and provide recommendations on the candidates for the Board of Commissioners, Board of Directors and the Executives up to one level below the Board of Directors in order to create appropriate placements (the right man in the right place). 4. Provide recommendations on the amount of salary, benefits and facilities for the members of the Board of Commissioners and Board of Directors which are competitive and refer to the development of the market. 5. Oversee the nomination and remuneration process in order to avoid violations against the established procedure. 6. Hold regular meetings of the Committee members at least 4 (four) months or 2 (two) times a year, in which each meeting should at least be attended by 2 (two) members of the Committee with Chief of Committee is one of the member, as well as formulate the minutes of the meeting. |
|--|--|

Profil Komite Nominasi dan Remunerasi

Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi per 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

Nama Name	Jabatan Position	Keputusan Dewan Komisaris Decision of BOC	Bidang Keahlian Expertise
Lukman Purnomosidi	Ketua Komite Chairman	02A/SK-KOM/BLD/VII/2009	Ekonomi Economic
Bambang Irawan Hendradi	Anggota Member	02A/SK-KOM/BLD/VII/2009	Teknik Engineering
Supartono	Anggota Member	02A/SK-KOM/BLD/VII/2009	Manajemen Management

Lukman Purnomosidi

Daftar riwayat hidup selengkapnya dapat dilihat pada bagian riwayat hidup Dewan Komisaris.

Bambang Irawan Hendradi

Daftar riwayat hidup selengkapnya dapat dilihat pada bagian riwayat hidup Dewan Komisaris.

Supartono

Daftar riwayat hidup selengkapnya dapat dilihat pada bagian riwayat hidup Dewan Komisaris.

Profile of Nomination and Remuneration Committee

Members of the Nomination and Remuneration Committee as of December 31 2014, are as follows:

Lukman Purnomosidi

His complete resume can be seen in the Board of Commissioners' Profile.

Bambang Irawan Hendradi

His complete resume can be seen in the Board of Commissioners' Profile.

Supartono

His complete resume can be seen in the Board of Commissioners' Profile.

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Corporate Governance

AGENDA RAPAT DAN KEHADIRAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Penyelenggaraan rapat sepanjang tahun 2014 tersebut meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE'S MEETING AGENDA AND ATTENDANCE

The meetings conducted during 2104 included several activities as follow:

No.	Tanggal Date	Agenda Agenda	Kehadiran Attendance		
			LP	IHS	SP
1	02 April 2014 02 April 2014	Pembahasan progres tahapan penyelarasan Organisasi Induk Perusahaan dan Unit Usaha. Discussion on the progress of Corporate and Business Unit organization alignment phase.	√	√	-
2	13 Mei 2014 13 May 2014	Pembahasan penyelarasan remunerasi Manajemen dan Staf Organisasi Induk Perusahaan dan Unit Usaha. Discussion on the remuneration alignment of Corporate and Business Unit Management and Staff.	√	√	√
3	17 Juni 2014 17 June 2014	Pembahasan progres penyelarasan remunerasi Manajemen dan Staf Organisasi Induk Perusahaan dan Unit Usaha. Discussion on the progress of remuneration alignment of Corporate and Business Unit Management and Staff.	√	√	-
4	09 September 2014 09 September 2014	Lanjutan pembahasan progres tahapan penyelarasan Organisasi Induk Perusahaan dan Unit Usaha sejalan dengan tinjauan-ulang strategi bisnis perusahaan. Continuous discussion on the progress of Corporate and Business Unit organization alignment phase in accordance with company's business strategy revisiting.	√	√	-

Keterangan / Note:

LP: Lukman Purnomosidi

IHS: Bambang Irawan Hendradi

SP: Supartono

Independensi Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi menjalankan tugas dan tanggung jawab secara profesional dan independen. Komite menyusun kriteria seleksi dan prosedur nominasi anggota Dewan Komisaris, Direksi dan para eksekutif, sampai dengan satu tingkat di bawah Direksi, serta tugas lainnya sesuai dengan ketentuan yang sudah ada.

Komite Kebijakan Corporate Governance

Komite Kebijakan *Corporate Governance* dibentuk berdasarkan SK Dewan Komisaris No. 07A/SK-KOM/BLD/X/2009 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Komite Kebijakan *Corporate Governance* dan mulai efektif menjalankan tugas pada awal tahun 2010. Komite ini dibentuk untuk dapat meningkatkan dan menyempurnakan praktik GCG terkait dengan tugas dan fungsi pengawasan Dewan Komisaris.

Independence of the Nomination and Remuneration Committee

The Nomination and Remuneration Committee performs its duties and responsibilities in a professional and independent manner. The Committee sets the criteria and procedures for the selection and nomination of the members of the Board of Commissioners, Board of Directors and the Executives, up to one level below the Board of Directors, as well as other tasks in accordance with the existing provisions.

The Corporate Governance Committee

The Corporate Governance Committee was established based on the Decree of the Board of Commissioners No. 07A/SK-KOM/BLD/X/2009 on the Establishment and Appointment of the Corporate Governance Committee and began to effectively carry out its tasks in early 2010. This committee was formed to improve and enhance corporate governance practices related to the supervisory duties and functions of the Board of Commissioners.

Tugas dan kewajiban Komite Kebijakan *Corporate Governance* adalah memberikan pendapat dan dukungan kepada Dewan Komisaris dalam memenuhi tanggung jawab untuk:

- Menelaah dan mengkaji ulang Anggaran Dasar.
- Memastikan penerapan prinsip-prinsip GCG.
- Memastikan penerapan prinsip-prinsip etika.
- Melakukan evaluasi atas struktur dan keanggotaan setiap komite di bawah Dewan Komisaris, khususnya jika terjadi perubahan dalam kebutuhan Perusahaan.
- Memantau kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan.
- Mengkaji kebijakan serta menilai konsistensi penerapan tanggung jawab sosial Perusahaan.

Profil Komite Kebijakan *Corporate Governance*

Susunan Komite Kebijakan *Corporate Governance* per 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

Nama Name	Jabatan Position	Keputusan Dewan Komisaris Result of Board of Commissioners	Bidang Keahlian Specialization
Kanaka Puradiredja	Ketua Komite Chairman	07A/SK-KOM/BLD/X/2009	Keuangan Finance
Bambang Irawan Hendradi	Anggota Member	07A/SK-KOM/BLD/X/2009	Teknik Engineering
Supartono	Anggota Member	07A/SK-KOM/BLD/X/2009	Manajemen Management

Kanaka Puradiredja

Daftar riwayat hidup selengkapnya dapat dilihat pada bagian riwayat hidup Dewan Komisaris.

Bambang Irawan Hendradi

Daftar riwayat hidup selengkapnya dapat dilihat pada bagian riwayat hidup Dewan Komisaris.

Supartono

Daftar riwayat hidup selengkapnya dapat dilihat pada bagian riwayat hidup Dewan Komisaris.

The duties and responsibilities of the Corporate Governance Committee is to provide opinions and support to the Board of Commissioners in fulfilling its responsibilities to:

- Examine and review the Articles of Association.
- Ensure the application of the principles of good corporate governance.
- Ensure the application of ethical principles.
- Evaluate the structure and membership of each committee under the Board of Commissioners, especially if there is a change in the needs of the Company.
- Monitor compliance to the laws and regulations.
- Review policies and assess the consistency of the application of corporate social responsibility.

Profile of the GC Committee

Members of the CGP Committee as of 31 December 2014 are as follows:

Kanaka Puradiredja

His complete resume can be seen in the Board of Commissioners' Profile.

Bambang Irawan Hendradi

His complete resume can be seen in the Board of Commissioners' Profile.

Supartono

His complete resume can be seen in the Board of Commissioners' Profile.

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Corporate Governance

Agenda Rapat dan Kehadiran Komite Kebijakan Corporate Governance

Meeting Agenda and Attendance of the CG Committee

Tanggal Date	Agenda Agenda	Kehadiran Attendance		
		Kanaka Puradiredja	Bambang Irawan Hendradi	Supartono
21 Januari 2014	Pembahasan Penyesuaian Sistem dan Prosedur Perusahaan (SOP) Discussion on the Adjustment of the Company's Systems and Procedures (SOP)	√	√	-
28 Februari 2014	Pembahasan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundangan Discussion on the Compliance to the Legislations	√	√	-
25 April 2014	Pembahasan Rencana Keikutsertaan di CGPI Discussion on the Plan to Attend CGPI	√	√	√
29 Oktober 2014	Pembahasan Infrastruktur GCG Perusahaan Discussion on the Company's GCG Infrastructure	√	√	-
17 Desember 2014	Pembahasan Mengenai program CSR Discussion on the CSR Programs	√	√	-

Penyelenggaraan rapat sepanjang tahun 2014 tersebut meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- Pemaparan proses penyesuaian *Standard Operating Procedures* (SOP) Perusahaan sesuai dengan perubahan struktur organisasi Perusahaan dan perubahan pejabat berwenang atas pengeluaran biaya.
- Pembahasan mengenai keikutsertaan dalam program pemeringkatan, yakni *Corporate Governance Perception Index* (CGPI).
- Pembahasan mengenai *softstructure* dan *infrastructure* GCG.
- Pembahasan mengenai kepatuhan atas peraturan pasar modal.
- Presentasi/pemaparan mengenai program-program CSR yang telah dilaksanakan selama tahun 2014.

The meetings conducted throughout 2014 included the following activities:

- Explanation on the adjustment process of the Company's Standard Operating Procedures (SOP) in accordance with changes in the Company's organizational structure and changes in authorities upon expenses.
- Discussion on the participation in the rating program, which is the Corporate Governance Perception Index (CGPI).
- Discussion on the softstructure and infrastructure of GCG
- Discussion on the compliance to the capital market regulations.
- Presentation/ explanation on the CSR programs conducted during 2014.

Independensi Komite Kebijakan Corporate Governance

Komite Kebijakan *Corporate Governance* menjalankan tugas dan tanggung jawab secara profesional dan independen. Di antara tugasnya, Komite melakukan penelaahan serta dan mengkaji ulang Anggaran Dasar. Selain itu, Komite juga memastikan bahwa prinsip-prinsip GCG dilaksanakan di lingkungan Perusahaan.

DIREKSI

Seluruh anggota Direksi Bakrieland telah memenuhi persyaratan formal dan material yang berlaku. Persyaratan formal bersifat umum, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan persyaratan material bersifat khusus, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan sifat bisnis Perusahaan.

Susunan Direksi Bakrieland per 31 Desember 2014 berdasarkan keputusan hasil RUPS yang diselenggarakan pada tanggal 27 Juni 2014 adalah sebagai berikut:

Nama Name	Jabatan Position	Periode Period
Ambono Janurianto	Presiden Direktur & CEO President Director & CEO	Juni 2012 - Mei 2015 June 2012 - May 2015
Agus Jayadi Alwie	Director & Chief Development Officer Director & Chief Development Officer	Juli 2013 - Mei 2015 July 2013 - May 2015
Charles Marc Dressler	Direktur Independen Independent Director	Juni 2014 - Mei 2015 June 2014 - May 2015

Lingkup Pekerjaan dan Tanggung Jawab

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tugas Direksi terutama adalah menjalankan pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan. Di lingkungan Bakrieland, setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh, baik secara pribadi maupun bersama atas kerugian Perusahaan apabila yang bersangkutan terbukti bersalah atau lalai.

Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan Perusahaan melalui pengelolaan risiko dan pelaksanaan tata kelola Perusahaan yang baik pada seluruh jenjang organisasi. Tanggung jawab Direksi juga mencakup penerapan struktur pengendalian

The Independence of the Corporate Governance Committee

The Corporate Governance Committee shall perform its duties and responsibilities in a professional and independent manner. Among its duties, the Committee shall conduct studies and reviews on the Articles of Association. In addition, the Committee shall also ensure that good corporate governance principles are being implemented in the Company.

BOARD OF DIRECTORS

All members of the Board of Directors of Bakrieland have met the applicable formal and material requirements. Formal requirements are general, in accordance with the laws and regulations in force, while the material requirements are specific, tailored to the needs and nature of the Company's business.

The Composition of the Board of Directors of Bakrieland as of 31st December, 2014 based on the decision of the GMS held on 27th June, 2014 is as follows:

Scope of Work and Responsibility

In accordance with Act No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, the main task of the Board of Directors is to run the management of the Company for the benefit of the Company and in accordance with the purposes and objectives of the Company. In Bakrieland, each member of the Board of Directors takes full responsibility for the Company's losses, both individually and collectively if he/ she is proven guilty or negligent.

The Board of Directors is responsible for the management of the Company through the implementation of risk management and good corporate governance at all levels of the organization. Responsibilities of the Board of Directors also include

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Corporate Governance

internal, pelaksanaan fungsi audit internal, dan pengambilan tindakan berdasarkan temuan-temuan Corporate Internal Audit sesuai dengan arahan Dewan Komisaris.

Direksi wajib menyusun strategi bisnis, termasuk rencana kerja dan anggaran serta pelaksanaan praktik akuntansi dan pembukuan sesuai ketentuan Perusahaan publik. Selain itu, Direksi juga wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.

Dalam hal RUPS tidak menetapkan pembedangan tugas Direksi, maka pembagian tugas Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi, sebagai berikut:

1. Ambono Janurianto (President Director & CEO) bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan operasional.
2. Charles Marc Dressler (Independent Director) bertanggung jawab atas bidang *corporate services*.
3. Agus Jayadi Alwie (Director & Chief Development Officer) bertanggung jawab atas bidang *corporate strategy & development*.

Rapat Direksi

Sepanjang tahun 2014, Direksi menyelenggarakan 13 (tiga belas) kali rapat. Berikut ini agenda rapat tersebut.

the implementation of the internal control structure, the implementation of internal audit functions, and taking actions based on the findings of the Corporate Internal Audit in accordance to the directives of the Board of Commissioners.

The Board of Directors shall prepare the business strategy, including the work plan and budget as well as the implementation of accounting and bookkeeping practices according to the provisions for a public company. In addition, the Board of Directors is also required to be accountable for the performance of its duties to the shareholders through the GMS.

In the event where the GMS did not determine the division of tasks of the Board of Directors, the division of tasks of the Board of Directors shall be determined based on the decision of the Board of Directors. The division of tasks of the Board of Directors is as follows:

1. Ambono Janurianto (President Director & CEO) is responsible for all operational activities.
2. Charles Marc Dressler (Independent Director) is responsible for corporate services.
3. Agus Jayadi Alwie (Director & Chief Development Officer) is responsible for corporate strategy and development.

Board of Directors Meeting

Throughout 2014, the Board of Directors held 13 (thirteen) meetings. Below is the agenda of the meetings.

No	Tanggal Date	Agenda Agenda	Kehadiran Attendance		
			AJ	AJA	MD
1	6-Jan-14	<ul style="list-style-type: none"> • Corporate Event Calendar 2014 • Kinerja Keuangan 2013 serta <i>Budget & Business Plan</i> 2014-2018 • Update Equity-Linked Bonds • Corporate Event Calendar 2014 • Financial Performance 2013, and also Budget & Business Plan 2014-2018 • Update Equity-Linked Bonds Restructurization 	√	√	√
2	28-Jan-14	<ul style="list-style-type: none"> • Update Equity-Linked Bonds • Integrasi Kebijakan Induk Perusahaan dan Unit Usaha • Update Equity-Linked Bonds • Bakrieland and Business Unit Policy Integration 	√	√	√

No	Tanggal Date	Agenda Agenda	Kehadiran Attendance		
			AJ	AJA	MD
3	10-Feb-14	<ul style="list-style-type: none"> Progres Penyusunan Laporan Keuangan 31 Desember 2013 Update Equity-Linked Bonds Progress of the Financial Statement as of 31 December 2013 Update Equity-Linked Bonds 	√	√	√
4	4-Mar-14	<ul style="list-style-type: none"> Progres Penyusunan Laporan Keuangan 31 Desember 2013 Update Equity-Linked Bonds Masa jabatan Komisaris Independen dan Direktur Independen Preparation of the Financial Statements as of 31st December, 2013 Update Equity-Linked Bonds Independent Commissioner and Independent Director Tenure 	√	√	√
5	21-Apr-14	<ul style="list-style-type: none"> Proses Penyusunan Laporan Keuangan 31 Desember 2013 Update Equity-Linked Bonds Preparation of the Financial Statements as of 31st December, 2013 Update Equity-Linked Bonds 	√	√	√
6	28-Apr-14	<ul style="list-style-type: none"> Progres pembuatan Annual Report Progres penyusunan Laporan Keuangan per 31 Desember 2013 Update Equity-Linked Bonds The progress on the preparation of Annual Report The progress on the preparation of Financial Statements as of 31st December 31, 2013 Update on Equity-Linked Bonds 	√	√	√
7	12-Mei-14	<ul style="list-style-type: none"> Progres pembuatan Annual Report Progres penyusunan Laporan Keuangan per 31 Desember 2013 Update Equity-Linked Bonds Email Centralized di BLD The progress on the preparation of Annual Report The progress on the preparation of Financial Statements as of 31st December 31, 2013 Update on Equity-Linked Bonds Email Centralized di BLD 	√	√	√
8	16-Juni-14	<ul style="list-style-type: none"> Finalisasi Pembahasan RUPS Bakrieland Finalization for RUPS Bakrieland 	√	√	√
9	7-Juli-14	<ul style="list-style-type: none"> Transaksi Bogor Nirwana Residence Bogor Nirwana Residence Transaction 	√	√	√
10	8-Sept-14	<ul style="list-style-type: none"> Keterbukaan Informasi Transaksi PT BNS-PT BCI Progres Laporan Keuangan Q3 per 30 September 2014 Transaction Information Disclosure PT BNS-PT BCI Progress of the Financial Statement Q3 as of 30 September 2014 	√	√	√
11	20-Okt-14	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Keuangan Q3 per 30 September 2014 The Financial Statement Q3 as of 30 September 2014 	√	√	√

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Corporate Governance

No	Tanggal Date	Agenda Agenda	Kehadiran Attendance		
			AJ	AJA	MD
12	17-Nov-14	<ul style="list-style-type: none">Pembahasan <i>Public Expose</i> Tahunan 2014Public Expose 2014 discussion	√	√	√
13	1-Des-14	<ul style="list-style-type: none"><i>Budget & Business Plan</i> 2015-2019Budget & Business Plan 2015-2019	√	√	√

Keterangan / Note :

AJ : Ambono Janurianto, **AJA** : Agus J. Alwie, **MD** : Charles Marc Dressler

Komite dan Satuan Kerja Direksi

Untuk membantu Direksi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, dibentuk 2 (dua) satuan kerja dan 1 (satu) komite, yaitu:

- Satuan Kerja Audit Internal, untuk memantau dan memastikan aktivitas pengendalian internal berjalan dengan baik.
- Satuan Kerja Manajemen Risiko, untuk memastikan bahwa kerangka kerja pengelolaan risiko telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap seluruh risiko Perusahaan.
- Komite/Panitia Tender, untuk memberikan penilaian objektif atas calon rekanan dalam proses tender pengadaan barang dan/atau jasa.

Rapat Gabungan Direksi dan Komisaris

Sepanjang tahun 2014, Direksi menyelenggarakan 7 (tujuh) kali rapat bersama Dewan Komisaris. Berikut ini agenda rapat tersebut:

Board of Directors' Committees and Working Units

To assist the Board of Directors in carrying out its functions and duties, the Company established 2 (two) work units and 1 (one) committee, namely:

- Internal Audit Unit, to monitor and ensure that the activities of internal control activities are running well.
- Risk Management Unit, to ensure that the risk management framework has provided adequate protection against the entire risks of the Company.
- Tender Committee, to provide an objective assessment on the prospective partners in the process of procurement of goods and/ or services.

Joint Meeting of the Board of Directors and Board of Commissioners

Throughout 2014, the Board of Directors held 7 (seven) joint meetings with the Board of Commissioners. Below is the agenda of the meetings:

	Tanggal Date	Agenda Agenda	Kehadiran Direksi Attendace of BOD			Kehadiran Dewa Komisaris Attendace of BOC				
			AJ	AJA	MD	IHS	LP	KP	SP	AY
1	4-Mar-14	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Laporan Keuangan 31 Desember 2013 • <i>Update</i> Equity-Link Bonds • Masa Jabatan Komisaris Independen dan Direktur Independen • Laporan Komite Audit • Preparation of the Financial Statements as of 31st December, 2013 • Update on the restructurization of Equity-Linked Bonds • Work tenure of Independent Commissioners and Independent Directors • Corporate Calender of Events 2014: Meetings of the Board of Commissioners • Others: Report of the Audit Committee 	√	√	√	√	√	√	-	√
2	1-Apr-14	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Laporan Keuangan 31 Desember 2013 • <i>Update</i> Equity-Linked Bonds • Rencana <i>Corporate Action</i> BLD • Biaya Pungutan oleh OJK dan Perubahan Biaya Pencatatan Tahunan oleh BEI • Preparation of the Annual Report as of 31st December, 2013 • Update on the restructurization of Equity-Linked Bonds • BLD Corporate Action Plan • Others: Fees charged by OJK and the changes of registering cost by the Capital Market 	√	-	√	√	√	-	-	√
3	13-Mei-14	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Laporan Keuangan 31 Desember 2013 • <i>Update</i> Equity-Linked Bonds • Rencana RUPS Bakrieland • <i>Annual Report</i> Bakrieland 2013 • Preparation of the Annual Report as of 31st December, 2013 • Update on the Equity-Linked Bonds • RUPS Bakrieland Plan • 2013 Annual Report of BLD 	√	-	√	√	√	√	-	√

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Corporate Governance

	Tanggal Date	Agenda Agenda	Kehadiran Direksi Attendance of BOD			Kehadiran Dewan Komisaris Attendance of BOC				
			AJ	AJA	MD	IHS	LP	KP	SP	AY
4	17-Jun-14	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Keuangan per 31 Desember 2013 Finalisasi Pembahasan RUPS Bakrieland Financial Statements as of 31st December, 2013 Finalization of RUPS Bakrieland 	√	√	√	√	√	√	-	√
5	8-Jul-14	<ul style="list-style-type: none"> Presentasi Transaksi BNR Presentation on the BNR Transaction 	√	√	√	√	√	√	-	√
6	9-Sept-14	<ul style="list-style-type: none"> Keterbukaan Informasi Transaksi PT BNS – PT BCI Laporan Keuangan Q2 per 30 Juni 2014 Lain-lain Transparency of Information on the Transactions of PT BNS – PT BCI Financial Statements Q2 as of 30th June 30, 2014 Others 	√	√	√	√	√	√	-	√
7	2-Des-14	<ul style="list-style-type: none"> Budget & Business Plan 2015 – 2019 Budget & Business Plan 2015 – 2019 								

Keterangan / Note :

Direksi / Director : **AJ** : Ambono Janurianto, **AJA** : Agus J. Alwie, **MD** : Charles Marc Dressler,

Dewan Komisaris / Board of Commissioner : **IHS** : Bambang Irawan Hendradi, **KP** : Kanaka Puradiredja, **LP** : Lukman Purnomosidi, **AY** : Armansyah Yamin, **SP** : Supartono

Program Pelatihan Direksi

Dalam rangka meningkatkan kompetensi, sepanjang tahun 2014 Direksi telah menghadiri dan berpartisipasi dalam berbagai pelatihan dan seminar sebagai berikut:

Training for the Board of Directors

In order to improve competence, in 2014 the Board of Directors attended and participated in the following trainings and seminars:

No	Tanggal Pelaksanaan Date of Training	Penyelenggara Organizer	Materi Topic	Data Peserta Participants		Tempat Pelaksanaan Training Venue
				Nama Karyawan Name of Employee	Jabatan Position	
1	21-22 Jan	Aventedge	Retail Development & Investment Indonesia (as a Speaker)	Agus J. Alwie	Director & CDO	Hotel Sari Pan Pacific
2	21-22 Jan	IDX	Indonesia Investor Forum-3	Charles Marc Dressler	Independent Director	JCC

Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi

- Setiap Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perusahaan.
- Tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan keputusan RUPS serta memastikan seluruh

Work Rules Guidelines for the Board of Directors

- Each Member of the Board of Directors shall in good faith and with full responsibility perform his/her duties in the interests of the Company.
- Obey the provisions of the legislations in force, the Articles of Association and the decisions of GMS and ensure that all activities of the Company

- aktivitas Perusahaan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan keputusan RUPS.
- Memimpin dan mengurus Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan dan senantiasa berusaha untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perusahaan.
 - Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perusahaan.
 - Bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perusahaan dalam mencapai visi, misi dan tujuan Perusahaan.
 - Mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
 - Melakukan segala tindakan dan perbuatan, baik mengenai pengurusan maupun pemilikan serta mengikat Perusahaan dengan pihak lain dan atau pihak lain dengan Perusahaan, dengan pembatasan tertentu.
 - Menyiapkan susunan organisasi pengurus Perusahaan lengkap dengan perincian tugasnya.
 - Menerapkan *good corporate governance* secara konsisten.
 - Wajib menyelenggarakan dan menyimpan Daftar Khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Bertanggungjawab secara pribadi atas kesalahan dan kelalaiannya dalam menjalankan tugas.

Hubungan Afiliasi Anggota Direksi dan Pemegang Saham Pengendali

Direksi Bakrieland tidak ada yang memiliki hubungan afiliasi antar sesama anggota Direksi dan Pemegang Saham Pengendali. Hal ini dinyatakan melalui Surat Pernyataan Tidak Memiliki Benturan Kepentingan yang telah ditandatangani oleh Direksi untuk masa jabatan tahun 2014.

Kebijakan Suksesi Direksi

Pengangkatan dan pemberhentian para anggota Direksi dilakukan oleh RUPS dimana anggota Direksi tersebut diangkat dari calon-calon yang diusulkan oleh para Pemegang Saham Perusahaan. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. Selama jabatan

- comply to the provisions of the applicable laws, the Articles of Association and the Decisions of the GMS
- Lead and manage the Company in accordance with the purposes and objectives of the Company and constantly strive to improve the Company's efficiency and effectiveness.
 - Control, maintain and manage the Company's assets.
 - Hold full responsibility in the performance of their duties for the benefit of the Company in achieving its vision, mission and objectives.
 - Represent the Company both in and out of court.
 - Perform all acts and deeds, both regarding the maintenance and ownership and bind the Company with other parties or other parties with the Company, with certain restrictions.
 - Prepare the Company's organizational structure complete with the details of the duties.
 - Implement good corporate governance consistently.
 - Formulate and save the Special Register according to the legislations.
 - Individual responsibility for any mistakes and negligence in performing duties

Affiliate Relations between the Board of Directors and the Controlling Shareholder

None of the members of the Board of Directors of Bakrieland have affiliate relationships with fellow members of the Board of Directors and the Controlling Shareholders. This is expressed through the Statement of No Conflict of Interest signed by the Board of Directors for the period of 2014.

Policy on the Directors' Succession

The appointment and dismissal of members of the Board of Directors is conducted by the GMS where members of the Board of Directors are appointed from candidates proposed by the shareholders of the Company. If by any reason the position of one or more or all members of the Board of Directors is vacant, then within 60 (sixty) days from the occurrence of such vacancy a GMS shall be held to fill the vacancy having regard to the provisions of the law and the Articles of Association. During the vacant position of a

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Corporate Governance

seorang Direksi tersebut lowong dan penggantinya belum ada atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang Anggota Direksi lainnya yang ditunjuk Komisaris, menjalankan pekerjaan Anggota Direksi yang lowong itu dengan kekuasaan dan wewenang yang sama. Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang berhenti dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Direksi lain yang menjabat.

MEKANISME EVALUASI KINERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Prosedur Pelaksanaan Evaluasi

Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi dievaluasi oleh Pemegang Saham dalam RUPST berdasarkan pelaksanaan tugas dan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perusahaan. Sedangkan Komite di bawah Dewan Komisaris, kinerjanya ditentukan berdasarkan pencapaian tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan Dewan Komisaris, yang akan memberikan penilaian satu tahun sekali sebelum RUPST diadakan.

Kriteria Pelaksanaan Evaluasi

Tata cara penilaian keberhasilan Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite dilakukan dengan menggunakan *Key Performance Indicator* (KPI) yang disusun bersama-sama dalam suatu rapat Dewan Komisaris yang terdiri dari Dewan Komisaris, Direksi, Komite Nominasi dan Remunerasi, dan diputuskan oleh Dewan Komisaris. Aspek KPI dapat meliputi, tetapi tidak terbatas pada perspektif keuangan, pelanggan, proses internal, pengembangan sumber daya manusia, dan kepemimpinan. Penetapan KPI harus memenuhi kriteria *Specific, Measurable, Accurate, Reliable* dan *Timeline*.

Penetapan KPI adalah berdasarkan fokus atau sasaran kerja yang harus dicapai dalam periode tertentu sesuai rencana dan target kerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan. Oleh karena itu, KPI menjadi bahan evaluasi keberhasilan kinerja Dewan Komisaris, Direksi dan Komite di akhir periode

member of the Board of Directors, in the event where the successor does not yet exist or has not yet taken office, then another member of the Board of Directors appointed by the Commissioner, shall perform the tasks of the vacant position with the same power and authority. The person who is appointed to replace the member of the Board of Directors who resigned or to fill a vacancy shall be appointed for the remaining tenure of the other members of the Board of Directors currently serving.

THE MECHANISM OF THE EVALUATION ON THE PERFORMANCE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

Evaluation Procedures

The performance of the Board of Commissioners and Board of Directors is evaluated by the shareholders in the GMS based on the performance of the duties and responsibilities as set out in the Articles of Association of the Company. Meanwhile, the performance of the Committees under the Board of Commissioners is determined based on the achievement of the duties and responsibilities assigned by the Board of Commissioners, who will provide an assessment once a year prior to the GMS.

Criteria For Evaluation

The procedure for assessing the success of the Board of Commissioners, Board of Directors, and the Committees is conducted by using the Key Performance Indicator (KPI), which is prepared together in a meeting of the Board of Commissioners attended by the Board of Commissioners, Board of Directors, Nomination and Remuneration Committee and decided by the Board of Commissioners. KPI aspects may include, but are not limited to the financial perspective, customers, internal processes, human resource development, and leadership. Determination of KPI must meet the criterias of being *Specific, Measurable, Accurate, Reliable* and *Timeline*.

Determination of KPI is based on the focus or work objectives to be achieved within a certain period according to the work plan and targets set out in the Annual Work Plan and Budget. Therefore, the KPI becomes the subject of the evaluation on the success of the performance of the Board of Commissioners,

anggaran untuk mencapai tujuan Perusahaan. KPI akan dikaji ulang secara berkala untuk menyesuaikan dengan perkembangan yang ada. Prosedur dan penetapan penyusunan KPI diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris.

Hasil evaluasi terhadap kinerja Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite secara keseluruhan dan kinerja perorangan setiap anggota merupakan bagian tak terpisahkan dalam skema kompensasi dan pemberian insentif. Hasil evaluasi kinerja perorangan merupakan salah satu dasar pertimbangan untuk memberhentikan dan/atau menunjuk kembali anggota, serta berfungsi sebagai sarana penilaian dan peningkatan efektivitas. Tata cara evaluasi kinerja Direksi, Dewan Komisaris, dan komite di bawah Dewan Komisaris diatur dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No.198/Kom-BLD/SK/ XII/09.

PERNYATAAN RANGKAP JABATAN

Setiap anggota Direksi wajib menandatangani Surat Pernyataan Rangkap Jabatan guna memenuhi prinsip independensi dan transparansi dalam GCG. Surat tersebut berisi pernyataan bahwa untuk masa satu jabatan pada satu tahun tidak menjabat sebagai Direktur, Komisaris di Perusahaan lain di luar Perusahaan dan anak Perusahaan/afiliasinya. Seluruh anggota Direksi Bakrieland telah menandatangani surat pernyataan untuk masa jabatan tahun 2014.

KEBIJAKAN REMUNERASI

Dewan Komisaris dan Direksi menerima imbalan jasa dalam bentuk gaji, tunjangan, dan fasilitas. Sesuai Anggaran Dasar Bakrieland, remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan melalui RUPS. Besaran remunerasi ditetapkan dengan memperhatikan besaran penghasilan tahun-tahun sebelumnya, bebas tugas dan tanggung jawab, serta disesuaikan dengan tingkat remunerasi eksekutif pada industri sejenis. Bakrieland telah memiliki Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 006/KOM-BLD/SK/XII/2011 yang mengatur mengenai prosedur remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris. Surat Keputusan ini merupakan penyempurnaan dari Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 19/Kom-BLD/SK/ XII/09.

Board of Directors and the Committees at the end of the budget period to achieve the Company's objectives. The KPI will be reviewed periodically to adjust to changes. The procedure and determination of the KPI is further stipulated in the Decree of the Board of Commissioners.

The results of the evaluation on the performance of the Board of Commissioners, Board of Directors, and the Committees as a whole and the individual performance of each member is an integral part of the compensation scheme and the provision of incentive. The result of the evaluation on individual performance is one of the basic considerations to dismiss and/ or reappoint members, and serves as a means of assessing and improving effectiveness. The procedure for evaluating the performance of the Board of Directors, Board of Commissioners, and committees under the Board of Commissioners is stipulated in the Decree of the Board of Commissioners No. 198/Kom-BLD/SK/ XII/09.

STATEMENT OF CONCURRENT POSITION

Each member of the Board of Directors must sign the Statement of Concurrent Position in order to meet the principles of independence and transparency in corporate governance. The letter contains a statement that in one period of a position he/ she does not serve as Director and Commissioner in other companies outside the Company and its subsidiaries/ affiliates. All members of the Board of Directors of Bakrieland have to sign a waiver for the period of 2014.

REMUNERATION POLICY

The Board of Commissioners and Board of Directors receive remuneration in the form of salary, allowances, and facilities. According to the Articles of Association of Bakrieland, the remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors is determined through the GMS. The amount of remuneration is determined by taking into account the amount of income in the previous years, free of duties and responsibilities, as well as tailored to the level of remuneration of the executives in similar industries. The Decree of the Board of Commissioners No. 006/KOM-BLD/SK/XII/2011 regulates the remuneration procedure for the Board of Directors and Board of Commissioners. This Decree is a refinement of the Decree of the Board of Commissioners No. 19/Kom-BLD/SK/XII/09.

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Corporate Governance

Tabel Remunerasi Karyawan (Perorangan) Tahun 2013 dan 2014 | Employee (Individual) Remuneration for 2013 and 2014

Komponen Remunerasi Remuneration Component	2013		2014	
	Tertinggi Highest	Terendah Lowest	Tertinggi Highest	Terendah Lowest
Gaji (Rp)/tahun Salary (Rp)/Year	813.801.440	12.600.000	849.655.040	11.700.000
Tunjangan (Rp)/tahun Allowance (Rp)/Year	404.099.520	3.276.000	389.803.840	3.042.000
Total (Rp)	1.217.900.960	15.876.000	1.239.458.880	14.742.000

KEBIJAKAN BENTURAN KEPENTINGAN

Benturan kepentingan merupakan situasi dimana terdapat konflik antara kepentingan ekonomis Perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Untuk mengatur hal ini, maka tanggal 8 Juni 2009 diterbitkan SK Direksi dan Dewan Komisaris Bakrieland No. 079/DIR-KOM/SK/VI/09 tentang Benturan Kepentingan. Kebijakan Benturan Kepentingan memuat panduan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi agar dalam menjalankan tugas dan kewajibannya mendahulukan kepentingan ekonomis Perusahaan dan tidak menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan dan keuntungan pribadi, keluarga dan pihak-pihak lain. Selain itu, kebijakan ini juga mengatur pemberian dan penerimaan hadiah dan donasi, kegiatan sampingan, dan kerahasiaan informasi.

Setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi setiap tahunnya menandatangani Surat Pernyataan Benturan Kepentingan. Surat tersebut berisi pernyataan, termasuk namun tidak terbatas pada:

- Tidak menerima atau memberikan suatu hal dalam bentuk apapun kepada pihak lain yang dapat mempengaruhi independensi.
- Tidak ikut serta dalam proses pengambilan keputusan yang mengandung unsur benturan kepentingan oleh pemegang saham independen Perusahaan.
- Mendahulukan kepentingan ekonomis Perusahaan di atas kepentingan ekonomis pribadi, keluarga, dan pihak lainnya.

Jika di kemudian hari mengalami situasi dimana terdapat benturan kepentingan, maka anggota Dewan Komisaris dan Direksi akan menarik diri untuk tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

POLICY ON CONFLICT OF INTEREST

Conflict of interest is a situation where there is a conflict between the economic interests of the Company with personal economic interests of the shareholders, members of the Board of Commissioners and Board of Directors. In order to regulate conflict of interest, on 8th June, 2009 the Company issued the Decree of Board of Directors and Board of Commissioners of Bakrieland No. 079/DIR-KOM/SK/VI/09 on Conflict of Interest. The policy on conflict of Interest contains the guidelines for the Board of Commissioners and Board of Directors so that in the performance of their duties and responsibilities, they prioritize the economic interests of the Company and do not abuse their position for personal gain and interests and the interests of family members and other parties. In addition, the policy also governs the provision and acceptance of gifts and donations, side activities, and confidentiality of information.

Each member of the Board of Commissioners and Board of Directors annually sign a Statement of Conflict of Interest. The letter contains the statement, including but not limited to:

- Does not accept or give gifts in any form to any other party that may affect independence.
- Does not participate in the decision-making process that contains elements of conflict of interest by the independent shareholders of the Company.
- Prioritize the economic interests of the company above personal economic interests as well as the economic interests of family members and other parties.

If in the future a conflict of interest occurs, the members of the Board of Directors and Board of Commissioners will withdraw and not be involved in the decision-making process.

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bakrieland telah menandatangani Surat Pernyataan Benturan Kepentingan untuk masa jabatan tahun 2014

All members of the Board of Commissioners and Board of Directors of Bakrieland have signed the Statement of Conflict of Interest for the period of 2014

TRANSPARANSI DAN PENGUNGKAPAN RANGKAP JABATAN

Seluruh anggota Direksi Bakrieland tidak ada yang menjabat sebagai Direktur, Komisaris di perusahaan lain, di luar PT Bakrieland Development Tbk dan anak perusahaan/afiliasi. Hal ini dinyatakan dalam Surat Pernyataan Rangkap Jabatan yang telah ditandatangani oleh seluruh Direksi untuk masa jabatan tahun 2014.

TRANSPARENCY AND THE DISCLOSURE OF CONCURRENT POSITION

All members of the Board of Directors of Bakrieland do not serve as Director, or Commissioner in other companies outside PT Bakrieland Development Tbk and its subsidiaries/ affiliates. This is stated in the Statement of Concurrent Position signed by the entire members of the Board of Directors for the period of 2014.

AKUNTAN PUBLIK

Bakrieland telah memiliki Kebijakan Pemilihan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Penugasan Audit Tahunan sejak tahun 2011. Kebijakan ini menjadi pedoman pokok dalam melakukan pemilihan KAP yang melakukan audit atas laporan keuangan tahunan untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan independensi atas proses tersebut. Kebijakan mengatur siapa saja pihak yang terkait dalam proses pemilihan, aspek penilaian beserta persyaratan dan kriterianya.

PUBLIC ACCOUNTANT

Bakrieland established a policy on the Selection of Public Accounting Firm (KAP) for the Assignment of Annual Audit since 2011. This policy becomes the principal guidelines in the selection of Public Accounting Firm that will audit the annual financial statements in order to ensure transparency, accountability, and independence over the process. The policy regulates the parties that shall be involved in the selection process, aspects of assessment and the requirements and criteria.

Kebijakan disusun sesuai dengan Peraturan OJK dan Menteri Keuangan RI yang mengatur mengenai independensi akuntan yang memberikan jasa audit di pasar modal, laporan keuangan yang disampaikan kepada OJK wajib diaudit oleh akuntan yang terdaftar di OJK, serta jasa Akuntan Publik. Pada tahun 2012 dilakukan penyempurnaan untuk lebih meningkatkan objektivitas proses pemilihan KAP.

The policy was prepared in accordance with the Regulation of the FSA and the Minister of Finance of RI concerning the independence of the accountants who provide audit services in the capital markets, the financial statements submitted to the FSA must be audited by a registered accountant in the FSA, as well as the services of the Certified Public Accountants. In 2012, enhancement was performed to further ensure the objectivity of the selection process of the Public Accounting Firm.

Secara prosedur, penetapan KAP diawali melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham yang memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk KAP serta remunerasinya. Dalam prosesnya, Dewan Komisaris menetapkan proses pemilihan dengan sistem tender.

In the procedure, the determination of the Public Accounting Firm begins through the mechanism of the General Meeting of Shareholders authorizing the Board of Commissioners to appoint the Public Accounting Firm as well as its remuneration. In the process, the Board sets the election process with the tender system.

Komite Seleksi memberikan penilaian atas kandidat KAP. Setelah itu, Komite Audit merekomendasikan KAP yang dipilih kepada Dewan Komisaris serta

The Selection Committee provides an assessment of the candidates of Public Accounting Firm. Then the Audit Committee will recommend the selected Public

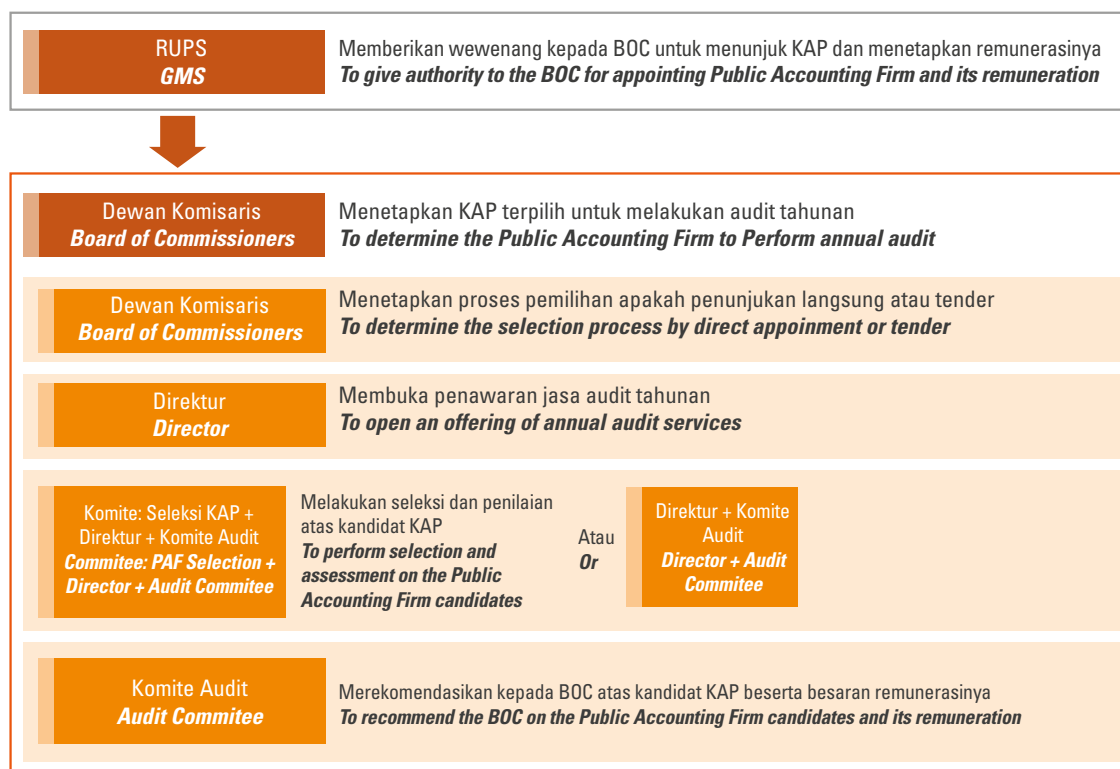
TATA KELOLA PERUSAHAAN

Corporate Governance

besaran remunerasinya. Selanjutnya, persetujuan Dewan Komisaris diserahkan kepada Direksi untuk ditindaklanjuti.

Accounting Firm as well as the amount of remuneration to the Board of Commissioners. Furthermore, the approval of the Board of Commissioners is submitted to the Board of Directors for further actions.

Bagan Proses pemilihan Kantor Akuntan Publik untuk Penugasan Audit Tahunan
Chart of Selection Process of Public Accounting Firm for Annual Audit Assignment



Untuk tahun 2014 ini, akuntan yang ditunjuk sudah 4 kali melakukan audit Laporan Keuangan. Sedangkan besaran biayanya adalah Rp3.604.500.000.

In 2014, the accountant appointed by the Company performed financial statements audit as many as 4 times. The fee for the audit work was Rp3,604,500,000.

KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

Bakrieland memiliki Kebijakan Pengadaan Barang dan/ atau Jasa untuk menciptakan suatu sistem pengadaan yang handal dimana barang dan/atau jasa diadakan sesuai dengan kebutuhan operasional, proses yang berlaku, dilaksanakan tepat waktu, terkendali dan dengan biaya yang wajar. Kebijakan ini berlaku efektif sejak tahun 2011.

POLICY ON THE PROCUREMENT OF GOODS AND/OR SERVICES

Bakrieland's policy on the Procurement of Goods and/ or Services was established to create a reliable procurement system where goods and/ or services are provided according to the operational needs, the applicable process, and timely execution, controlled as well as at a reasonable cost. This policy became effective in 2011.

Tujuan penyusunan kebijakan ini adalah agar menjadi panduan bagi karyawan Perusahaan dalam

The purpose of the establishment of this policy is to be the guideline for employees in implementing and

melaksanakan dan mengelola kegiatan pengadaan di Perusahaan dapat dilakukan dengan efektif dan efisien sesuai peraturan yang berlaku dan mengacu pada prinsip GCG. Kebijakan ini antara lain mengatur prinsip umum pengadaan, kategori barang dan/atau jasa, metode pengadaan, pengaturan penerbitan kontrak/perjanjian.

Di dalam kebijakan ini setiap calon rekanan diharuskan melampirkan dokumen Pakta Integritas Eksternal, yang antara lain berisi:

- Pernyataan untuk menghindari praktik benturan kepentingan.
- Pernyataan untuk melaporkan apabila mengetahui adanya indikasi benturan kepentingan.
- Pernyataan larangan pemberian hadiah atau hiburan lainnya kepada karyawan Perusahaan yang berhubungan dengan pengadaan proyek/ pekerjaan.
- Pernyataan untuk mengikuti proses pelelangan yang mengacu kepada prinsip keadilan (fair competition).
- Pernyataan untuk memberikan informasi yang akurat dan benar kepada pihak Bakrieland.
- Pernyataan untuk tidak memberikan atau memberitahukan (menyebarkan/membocorkan) informasi yang bersifat rahasia mengenai Bakrieland.

KEBIJAKAN EMAIL

Bakrieland memiliki Kebijakan Email untuk mengatur mengenai penggunaan seluruh email di lingkungan Bakrieland dengan domain www.bakrieland.com dalam hal pengiriman dan penerimaan email, serta keamanan penggunaan dan pengawasan email. Kebijakan ini berlaku efektif sejak tahun 2011.

Tujuan penerbitan kebijakan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memastikan penggunaan yang tepat dari sistem email Bakrieland.
2. Membuat karyawan Bakrieland menyadari komponen-komponen yang dapat diterima dan tidak dapat diterima pada sistem email Bakrieland.

Dalam kebijakan ini, diantaranya diatur mengenai ketentuan penggunaan email untuk kepentingan perusahaan dan pribadi, pembuatan dan penghapusan akun email, informasi rahasia, risiko hukum, serta sistem pengawasan email.

managing the Company's procurement activities effectively and efficiently according to the regulations and referring to the principles of corporate governance. This policy, among others, regulates the general principles of procurement, the category of goods and/ or services, the method of procurement, and preparation of the issuance of contracts/ agreements.

Within this policy each prospective partner is required to attach the document of External Integrity Pact, which, among other things, contains:

- Statement to avoid conflict of interest.
- Statement to report the indication of the existence of a conflict of interest.
- Statement on the prohibition to accept gifts or other entertainment to the employees of the Company related to the procurement of a project/ job.
- Statement to follow the process of auction, which refers to the principle of fairness (fair competition).
- Statement to provide information that is accurate and true to Bakrieland.
- Statement to not give or notify (spread/ leak) confidential information on Bakrieland.

EMAIL POLICY

Bakrieland's email policy governs the use of email within Bakrieland with the domain www.bakrieland.com namely in the sending and receiving emails, as well as the security and surveillance of the use of email. This policy has been effective since 2011.

The purpose of the issuance of this policy is:

1. To ensure proper use of Bakrieland's email system.
2. To ensure Bakrieland's employees are aware of the acceptable and unacceptable components in Bakrieland's email system.

This policy among others regulates the use of email for corporate and personal interests, creation and deletion of email accounts, confidential information, legal risk, as well as an e-mail monitoring system.

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Corporate Governance

KEBIJAKAN PENGELOLAAN DAN BACKUP DATA

Dalam era informasi saat ini, data sebagai sumber daya informasi adalah merupakan aset perusahaan yang vital. Bakrieland sebagai perusahaan yang memahami peran data tersebut dan juga memahami kebutuhan pengelolaan data memandang bahwa pengelolaan dan perlindungan terhadap data sangat penting dalam mengantisipasi risiko kehilangan data. Untuk lebih memastikan pengelolaan data yang baik dan mengoptimalkan manfaat sistem *backup* data yang telah diimplementasikan di Bakrieland, disusunlah Kebijakan Pengelolaan dan *Backup* Data yang disahkan melalui SK Direksi No. 024/DIR-Perusahaan/SKD/XII/2012.

PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Dewan Komisaris dan Direksi setiap awal tahun membuat Surat Pernyataan Kepemilikan Saham dan dimuat dalam Laporan Tahunan Perusahaan. Surat pernyataan tersebut menyatakan jumlah lembar saham yang dimiliki anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi beserta keluarga (istri dan anak).

Seluruh Dewan Komisaris dan Direksi beserta keluarga per 31 Desember 2014 tidak memiliki saham pada Bakrieland dan perusahaan lain.

LAPORAN PUBLIKASI PEMBAYARAN PAJAK 2014

Bakrieland dan unit usahanya telah terdaftar sebagai wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak dan Dinas Pendapatan Daerah sesuai dengan domisili masing-masing Perusahaan. Kewajiban perpajakan yang dilakukan selama tahun 2014 berhubungan dengan kegiatan usaha yang dilakukan dengan perincian sebagai berikut:

1. Pajak Penghasilan Pasal 21/26
2. Pajak Penghasilan Pasal 23/26
3. Pajak Penghasilan Pasal 4 (2)
4. Pajak Penghasilan Pasal 25/29
5. Pajak Pertambahan Nilai
6. Pajak Penjualan atas Barang Mewah
7. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
8. Pajak Bumi dan Bangunan

THE POLICY ON DATA MANAGEMENT AND BACK UP

In today's information era, data as a source of information is a vital corporate asset. Bakrieland is a company that understands the role of data and also understands the need for good data management and considers data management and protection very important in order to anticipate the risk of data loss. To further ensure good data management and optimize the benefits of the data backup system that has been implemented in Bakrieland, the Company formulated the Policy on the Management and Backup Data through the Decree of the Board of Directors No. 024/DIR-Perseroan/SKD/XII/2012.

SHARE OWNERSHIP PROGRAM OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

At the beginning of the year, the Board of Commissioners and Board of Directors formulated the Statement Letter regarding a statement on Share Ownership contained in the Company's Annual Report. The statement letter states the number of shares allowed to be owned by members of the Board of Commissioners and Board of Directors and their families (wife and children).

As of 31st December, 2014, all members of the Board of Commissioners and Board of Directors and their families do not own shares in Bakrieland and other companies.

TAX PAYMENT RELEASE REPORT 2014

Bakrieland and its business units have been registered as taxpayers in the Tax Office and the Department of Regional Revenue in accordance with the respective domicile of the Company. The tax obligations fulfilled during 2014 related to the business activities conducted include:

1. Income Tax Article 21/26
2. Income Tax Article 23/26
3. Income Tax Article 4 (2)
4. Income Tax Article 25/29
5. Value Added Tax
6. Sales Tax on Luxury Goods
7. Local Taxes and Levies
8. Land and Building Tax

IMPLEMENTASI PSAK BERBASIS IFRS

Sejak diterbitkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (SAK) yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi (PSAK & ISAK) sebagaimana terakhir ditetapkan dalam SAK per 1 Juni 2012 oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Ikatan Akuntan Indonesia, Bakrieland telah melakukan penerapan terhadap laporan posisi keuangan konsolidasian dan entitas anak terkait.

Adapun beberapa standar akuntansi keuangan yang telah efektif dan diterapkan adalah sebagai berikut:

- Standar yang telah efektif berlaku di tahun 2012, seperti:
 - PSAK No. 10 (Revisi 2010): Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing
 - PSAK No. 13 (Revisi 2011): Properti Investasi
 - PSAK No. 16 (Revisi 2011) Aset Tetap
 - PSAK No. 18 (Revisi 2010): Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya
 - PSAK No. 24 (Revisi 2010): Imbalan Kerja
 - PSAK No. 26 (Revisi 2011): Biaya Pinjaman
 - PSAK No. 30 (Revisi 2011): Sewa
 - PSAK No. 34 (Revisi 2010): Akuntansi Kontrak Konstruksi
 - PSAK No. 46 (Revisi 2010): Pajak Penghasilan
 - PSAK No. 50 (Revisi 2010): Instrumen Keuangan: Penyajian
 - PSAK No. 53 (Revisi 2010): Pembayaran Berbasis Saham
 - PSAK No. 55 (Revisi 2011): Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran
 - PSAK No. 56 (Revisi 2011): Laba per Saham
 - PSAK No. 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan
 - ISAK No. 13: Lindung Nilai Investasi Neto Dalam Kegiatan Usaha Luar Negeri
 - ISAK No. 15: PSAK 24 – Batas Aset Imbalan Pasti, Persyaratan Pendanaan Minimum dan Interaksinya
 - ISAK No. 20: Pajak Penghasilan - Perubahan dalam Status Pajak Entitas atau Para Pemegang Saham
 - ISAK No. 25: Hak atas Tanah

IMPLEMENTATION OF PSAK BASED ON IFRS

Since published in the Indonesian Financial Accounting Standards (SAK) which includes the Statements and Interpretations (PSAK & ISAK) as set in the SAK as of 1st June, 2012 by the Financial Accounting Standards Board (DSAK) of the Indonesian Institute of Accountants, Bakrieland has applied to the consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries.

Some of the financial accounting standards that have become effective and applied include the following:

- The standards that became effective in 2012, among others:
 - PSAK No. 10 (Revision of 2010): The Effects of the Changes in Foreign Exchange Rates
 - PSAK No. 13 (Revision of 2011): Investment Property
 - PSAK No. 16 (Revision of 2011): Fixed Assets
 - PSAK No. 18 (Revision of 2010): Accounting and Reporting of the Retirement Benefit Plan
 - PSAK No. 24 (Revision of 2010): Employee Benefits
 - PSAK No. 26 (Revision of 2011): Cost of Loan
 - PSAK No. 30 (Revision of 2011): Rental
 - PSAK No. 34 (Revision of 2010): Accounting for Construction Contracts
 - PSAK No. 46 (Revision of 2010): Income Taxes
 - PSAK No. 50 (Revision of 2010): Financial Instruments: Presentation
 - PSAK No. 53 (Revision of 2010), Share-based Payment
 - PSAK No. 55 (Revision of 2011): Financial Instruments: Recognition and Measurement
 - PSAK No. 56 (Revision of 2011): Earnings per Share
 - PSAK No. 60: Financial Instruments: Disclosures
 - ISAK No. 13: Hedges Net Investment in Foreign Operations
 - ISAK No. 15: PSAK 24 – Limit on a Defined Benefit Asset, Minimum Funding Requirements and its Interaction
 - ISAK No. 20: Income Taxes - Changes in the Tax Status of an Entity or its Shareholders
 - ISAK No. 25: Land Rights

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Corporate Governance

2. Standar lainnya yang efektif berlaku di tahun 2013, seperti:
 - PSAK No. 38 (Revisi 2012): Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali
 - ISAK No. 21: Perjanjian Konstruksi Real Estat
 - PPSAK No. 7: Pencabutan PSAK No. 44: Akuntansi Aktivitas Pengembangan Real Estate
 - PPSAK No. 10: Pencabutan PSAK No. 51: Akuntansi Kuasi-Reorganisasi
2. Other standards that became effective in 2013, such as:
 - PSAK No. 38 (Revision of 2012): Business Combinations of Entities Under Common Control
 - ISAK No. 21: Real Estate Construction Agreement
 - PPSAK No. 7: Revocation of PSAK No. 44: Accounting for Real Estate Development Activities
 - PPSAK No. 10: Revocation of SFAS No. 51: Accounting for Quasi-Reorganization

Atas penerapan ISAK No. 21 dan PPSAK No. 7 telah ditunda sampai tanggal yang akan ditentukan kemudian berdasarkan surat DSAK-IAI No. 0643/DSAK/IAI/IX/2012 tanggal 21 September 2012.

Upon the implementation of ISAK No. 21 and PPSAK No. 7 has been postponed until a date to be determined later based on the letter DSAK-IAI No. 0643/DSAK/IAI/IX/2012 dated 21st September 2012.

Standar-standar revisi yang signifikan tersebut dibuat berdasarkan International Financial Reporting Standard (IFRS 2009) dan telah diimplementasikan dalam laporan keuangan tahun 2014.

Significant revised standards were made based on the International Financial Reporting Standard (IFRS 2009) and have been implemented in the 2014 financial statements.

Selain itu pada tahun 2013, OJK telah merevisi Peraturan VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik melalui Keputusan Ketua Bapepam-LK No: KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012. Peraturan tersebut direvisi untuk memberikan kepastian hukum bagi emiten dan perusahaan publik dalam hal penyajian dan pengungkapan laporan keuangan sebagai bentuk penyesuaian atas penerapan revisi PSAK. Penyempurnaan atas peraturan ini mempermudah entitas dalam mengimplementasikan PSAK revisi yang terkait dan mengurangi risiko ketidakpatuhan atas standar revisi yang telah ditetapkan.

Additionally in 2013, the FSA has revised Regulation VIII.G.7 on the Presentation and Disclosure of Financial Statements for Listed or Public Companies through the Decree of the Head of Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 dated 25th June, 2012. The regulation was revised to provide legal certainty for listed companies and public companies in terms of the presentation and disclosure of financial statements as the adjustment upon the revision of PSAK. Completion of the regulation eases the entity to implement the revised PSAK and reduce the risk of non-compliance on the revised standards that have been set.

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI

Berbagai penghargaan dan pengakuan lain yang diterima dalam hal tata kelola perusahaan mencerminkan upaya Bakrieland untuk secara terus menerus meningkatkan penerapan GCG di lingkungan Perusahaan.

AWARDS AND CERTIFICATION

Various awards and other recognitions received in terms of corporate governance reflect Bakrieland's effort to continually improve the application of GCG in the Company.

Beberapa penghargaan dan sertifikasi yang berhasil didapatkan Bakrieland dapat dilihat pada halaman 43, salah satunya adalah Bakrieland berhasil mempertahankan sertifikasi ISO 9001:2008 tanpa adanya temuan yang bersifat major dan minor.

Several awards and certifications achieved by Bakrieland can be seen on page 48, one of which is Bakrieland managed to maintain the certification of ISO 9001: 2008 without any major and minor findings.

PERKARA PENTING YANG SEDANG DIHADAPI

Sepanjang tahun 2014, terdapat gugatan perbuatan melawan hukum atas perkara transaksi waran terhadap Perusahaan, yakni tuntutan hukum kepada PT Bakrieland Development Tbk ("BLD") yaitu Perkara perdata yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah register Nomor: 99/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel dalam perkara antara Bpk. Igan Bismayudha Dkk selaku Para Penggugat melawan BLD sebagai Tergugat 1 dan Bpk Hiramshyah Sambudhy Thaib (Presiden Direktur BLD periode 2007-2012) sebagai Tergugat 2 berdasarkan Surat Gugatan tertanggal 13 Februari 2013. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah menolak gugatan Para Penggugat tersebut. Namun, para penggugat masih melakukan banding pada tanggal 13 Maret 2014.

IMPORTANT CASES FACED

Throughout 2014, a lawsuit charged against the Company over the case of warrant transaction, namely the lawsuit against PT Bakrieland Development Tbk ("BLD") a civil case filed in the South Jakarta District Court under the register number: 99/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel, between Mr. Igan Bismayudha and his friends as the Prosecutors against BLD as Defendant 1 and Mr. Hiramshyah Sambudhy Thaib (President Director of BLD period of 2007-2012) as Defendant 2 the lawsuit dated 13th February, 2013. The South Jakarta District Court rejected the lawsuit of the Prosecutors. However, the prosecutors made an appeal on 13th March 2014.

RENCANA TAHUN 2015

Untuk meningkatkan penerapan GCG di Perusahaan, Bakrieland akan terus menyempurnakan kebijakan dan praktik-praktik GCG melalui internalisasi GCG kepada seluruh pemangku kepentingan, mendayagunakan komite-komite yang ada baik di tingkat Direksi maupun Dewan Komisaris, dan menyempurnakan sistem dan implementasi manajemen risiko. Kelengkapan dalam pengungkapan GCG pada laporan tahunan juga menjadi salah satu prioritas Bakrieland demi memelihara keterbukaan kepada para pemangku kepentingan.

PLANS FOR 2015

To improve the implementation of GCG, Bakrieland will continue to refine GCG policies and practices through the internalization of GCG to all stakeholders, utilizing existing committees both at the level of the Board of Directors and Board of Commissioners, and refine the system and the implementation of risk management. Completeness of the disclosure of GCG in the annual report is also one of the priorities of Bakrieland to preserve transparency to stakeholders.

MANAJEMEN RISIKO & KEPATUHAN

Risk Management & Compliance

Bagi Perusahaan, manajemen risiko dan kepatuhan merupakan unsur penting dalam mendukung tujuan bisnis yang sudah ditetapkan. Melalui penerapan manajemen risiko, Perusahaan mampu mendeteksi masalah yang berpotensi menjadi penghalang dalam mencapai tujuan tersebut.

Dalam pelaksanaan kegiatannya, fungsi kerja Corporate Risk Management & Compliance (RMC) pada Induk Perusahaan secara berkala melakukan koordinasi dengan RMC Unit Usaha. Faktor penting yang menjadi pembahasan dalam koordinasi tersebut adalah efektivitas terhadap pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan kepatuhan di lingkungan Perusahaan.

RMC di Bakrieland berfungsi memantau implementasi tata kelola perusahaan yang baik dan pelaksanaan penilaiannya, sebagai Penyusun dan Reviewer Kebijakan, pengelola Task Monitoring System (TMS), serta Quality Management Representative (QMR) untuk penerapan, pelaksanaan, dan pengawasan implementasi sertifikasi ISO 9001:2008 tentang Sistem Manajemen Mutu.

Efektivitas Manajemen Risiko

Selama ini, alur kerja Manajemen Risiko yang diterapkan di lingkungan Perusahaan berjalan secara efektif. Pola desentralisasi atau pengelolaan dan penerapan terhadap prinsip-prinsip Manajemen Risiko dan Kepatuhan oleh masing-masing Unit Usaha, membuat Perusahaan lebih mudah melakukan deteksi dini atas potensi masalah yang dihadapi. Sebab pada intinya, Manajemen Risiko yang efektif merupakan usaha untuk sadar risiko serta merupakan salah satu bagian dari implementasi tata kelola Perusahaan yang baik.

Sebagai upaya memenuhi tujuan tersebut, Perusahaan mengelola risiko yang di antaranya melalui *Transaction Based Risk Management* yang bertujuan untuk mengidentifikasi risiko dan memberikan rekomendasi mitigasi agar tujuan transaksi dapat tercapai. Setiap

For the Company, risk management and compliance is an integral element in supporting the Company's business objectives. Through the committed application of risk management, the Company will be able to detect problems that could potentially be an obstacle in achieving the Company's objectives.

Through the implementation of its activities, the work function of the Corporate Risk Management & Compliance (RMC) Division of the Parent Company is to periodically coordinate with the RMC of the subsidiary entities. An important factor discussed in the coordination is the effectiveness of the implementation of risk management and compliance policies throughout the Company.

At Bakrieland, RMC serves to monitor the implementation of good corporate governance and the implementation of its assessment, as the Policy Establisher and Reviewer, manager of the Task Monitoring System (TMS), and as the Quality Management Representative (QMR) for the application, and monitoring of the implementation of ISO 9001: 2008 regarding the Quality Management System.

Effectiveness of Risk Management

During this time, the Risk Management workflow that was applied within the Company has been running effectively. The pattern of decentralization of management and the implementation of the risk management and compliance principles by each business unit enables the Company to easily perform early detection of the potential problems that may occur. In essence, effective risk management is a conscious effort to minimize risks and naturally becomes a part of the implementation of good corporate governance.

In an effort to meet these objectives, the Company also manages the risks through the Transaction Based Risk Management system, which aims to identify risks and provide recommendations on mitigation so that all transaction objectives can be achieved. Every

M

elalui fungsi Risk Management & Compliance, Bakrieland senantiasa mendeteksi potensi risiko yang ada, serta memantau penerapan GCG di lingkungan Perusahaan.

Through the function of Risk Management & Compliance, Bakrieland continually strives to identify potential risks involved, and to monitor the implementation of GCG within the Company.

transaksi dan rencana strategis lainnya terlebih dahulu mendapatkan tinjauan dan rekomendasi dari RMC, sebelum akhirnya diajukan kepada manajemen untuk pengambilan keputusan.

Selama tahun 2014, RMC telah menyelesaikan tinjauan terhadap 108 transaksi yang terdiri dari proposal proyek, transaksi keuangan, data pelaporan kepada instansi eksternal dan regulator, kontrak/perjanjian, investasi, divestasi, dan lain-lain.

Setelah *Transaction Based Risk Management* dilaksanakan oleh RMC, maka Corporate Internal Audit Division melakukan audit berbasis risiko yang dapat memberikan masukan dan melakukan pengawasan terhadap efektivitas proses manajemen risiko, termasuk di dalamnya evaluasi pengendalian risiko. Evaluasi dilakukan atas seluruh rangkaian proses manajemen risiko, sehingga menghasilkan suatu rekomendasi yang berguna bagi proses pembaruan pengendalian risiko berikutnya.

Kepatuhan

Budaya kepatuhan merujuk kepada nilai, perilaku, dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan Perusahaan. Kepatuhan juga merupakan aspek penting dalam menjalankan usaha untuk menjamin kelancaran kegiatan operasional serta menjaga reputasi Perusahaan.

transaction and all other strategic plans initially obtain a review and recommendation from the Division of RMC, before being finally submitted to Management for a decision.

Throughout 2014, the RMC Division completed reviews on 108 transactions consisting of project proposals, financial transactions, reporting data to external agencies and regulators, contracts/agreements, investments, divestments, and others.

After the *Transaction Based Risk Management* has been implemented by RMC, the Corporate Internal Audit Division conducts a risk-based audit, which can provide further inputs and monitor the effectiveness of the risk management process, including the evaluation of risk control. Evaluation is conducted on the complete process of risk management, resulting in recommendations useful for future risk control reform processes.

Compliance

The compliance culture refers to the values, behaviors, and actions that support compliance to the Company's laws and regulations. Compliance is also an important aspect of conducting business, particularly to ensure smooth operations and maintain the Company's reputation.

MANAJEMEN RISIKO & KEPATUHAN

Risk Management & Compliance

Sebagai salah satu bentuk penerapan aspek kepatuhan, sejak tahun 2009 Bakrieland telah menerapkan Task Monitoring System (TMS). Penerapan TMS bertujuan untuk dapat meminimalisir risiko dan meningkatkan kelancaran kegiatan operasional. Selama tahun 2014, masing-masing divisi semakin aktif melakukan tindak lanjut atas hasil tinjauan dari TMS.

Penyusun & Reviewer Kebijakan

Fungsi lain Divisi RMC adalah sebagai penyusun *reviewer* kebijakan, hal ini berhubungan erat dengan pelaksanaan manajemen risiko. Dengan adanya kebijakan-kebijakan Perusahaan, maka jalannya operasional Perusahaan menjadi lebih tertib, disiplin dan terarah sehingga dapat meminimalisir risiko yang dihadapi Perusahaan.

Pencapaian 2014

Sepanjang tahun 2014, kegiatan yang dilakukan RMC ada sebagai berikut;

1. Mengkaji dan menyesuaikan kebijakan *Financial Authorization Approval* (FAA), Kebijakan Sirkulasi Review Transaksi dan Dokumen, Kebijakan Tanggung Jawab Pelaporan kepada Instansi Eksternal dan Regulator, sejalan dengan adanya perubahan, antara lain perubahan struktur organisasi dan perubahan persyaratan lainnya.
2. Memonitor implementasi *Standard Operating Procedures* (SOP).
3. Melakukan kajian atas transaksi-transaksi perbankan, investasi, divestasi, laporan regulator dan kontrak/perjanjian, baik dari Induk Perusahaan maupun Unit Usaha.
4. Melanjutkan implementasi TMS yang dapat meningkatkan proses kerja operasional Perusahaan.
5. Sertifikasi ISO 9001:2008 dari Badan Sertifikasi SGS Indonesia untuk 2 (dua) kali masa *surveillance*, yaitu pada Maret dan September 2014.

Rencana 2015

RMC akan melaksanakan analisa risiko atas transaksi-transaksi signifikan yang dilakukan oleh Perusahaan. Selain itu, RMC juga melakukan koordinasi dengan fungsi kerja manajemen risiko yang ada di Unit Usaha.

As one of the important aspects of compliance, Bakrieland has applied the Task Monitoring System (TMS) since 2009. The application of the TMS aims to minimize risk and improve operations. Throughout 2014, each division was more active in following up on the results of the review by TMS.

Originator and Policy Reviewer

Other functions that RMC Division manages are composing and reviewing policies, which relates to the implementation of risk management. With policies, the Company's operations are more systematic, disciplined, and focused, thus minimizing the risks faced by the Company.

Achievement in 2014

RMC activities in 2014 are as follows:

1. Review and adjust Financial Authorization Approval (FAA) policy, Transaction and Document Review Circulation Policy, Responsibility in Reporting to External Agencies and Regulators, in line with the changes occurring in the Company, among others, change in the organizational structure and in other requirements.
2. Monitor the implementation of Standard Operating Procedures (SOP).
3. Conduct a study on banking transactions, investment, divestment, regulatory reports and contracts / agreements, both of the Parent Company and of Business Units.
4. Continue the implementation of TMS that can improve the Company's operational processes.
5. Certification ISO 9001: 2008 from SGS Indonesia for two (2) times the surveillance period, ie in March and September 2014.

Plans for 2015

RMC will perform risk analysis of all significant transactions carried out by the Company. In addition, RMC will also coordinate with the risk management work functions in the Business Units.

Risiko Usaha dan antisipasi

Risiko-risiko usaha yang dihadapi oleh Bakrieland dan anak Perusahaan antara lain:

Risiko Keuangan

1. Risiko Mata Uang

Merupakan risiko kerugian pada saat terjadinya apresiasi atau depresiasi mata uang asing yang disebabkan oleh adanya posisi transaksi yang masih terbuka. Kinerja keuangan Perusahaan dapat dipengaruhi oleh perubahan kurs, mengingat beberapa komponen dalam konstruksi bangunan diimpor dari luar negeri.

Untuk mengurangi risiko atas perubahan mata uang asing, Perusahaan memberlakukan kebijakan *hedging*, yaitu lindung nilai untuk pinjaman dalam mata uang non-rupiah. Dalam kegiatan operasional, Perusahaan juga mengutamakan penggunaan material bangunan produksi dalam negeri.

2. Risiko Suku Bunga

Merupakan risiko yang timbul akibat fluktuasi tingkat suku bunga pinjaman yang dilakukan oleh kreditur. Risiko ini akan sangat berdampak pada besarnya pembiayaan yang diperlukan oleh unit usaha, karena biaya yang dikeluarkan akan meningkat, sehingga mempengaruhi kegiatan operasional dan kinerja keuangan Perusahaan.

Untuk mengurangi dampak risiko perubahan tingkat suku bunga, Bakrieland melakukan metode pembayaran bertahap dengan jangka waktu yang lebih panjang ataupun pinjaman dengan bunga tetap.

3. Risiko Kredit

Risiko kredit yang merupakan risiko kerugian sehubungan dengan pihak peminjam tidak dapat dan/atau tidak mau memenuhi kewajiban untuk membayar kembali dana yang dipinjamnya secara penuh pada saat jatuh tempo.

Untuk mengurangi dampak risiko ini, Bakrieland sangat selektif dalam memberikan kredit dengan sistem penjualan tunai bertahap kepada

Corporate Risk and Anticipation

The business risks faced by Bakrieland and its Subsidiary Entities, include:

Financial Risk

1. Currency Risk

Currency Risk is the risk of loss in the event of an appreciation or depreciation of the foreign currency caused by the change in position while the transaction is still open. The company's financial performance may be affected by the changes in exchange rates, given that some of the materials in building construction are being imported from overseas.

To reduce the risk of changes in exchange rates, the Company has implemented a policy of hedging, namely hedging for loans denominated in foreign currencies. In its operations, the Company also prioritizes the use of building materials produced domestically.

2. Interest Rate Risk

This is the risk arising from the fluctuations in interest rates of loans carried out by money lenders. This risk will greatly affect the amount of financing required by each business unit because the costs will increase, thus affecting the operations and financial performance of the Company.

To reduce the impact of the fluctuations in interest rates, Bakrieland has carried out the phased payment method with a longer term or loans with a fixed interest rate.

3. Credit Risk

Credit risk is the risk of loss with respect to the inability or unwillingness of borrowers to fulfill the obligation to repay the borrowed funds in full at maturity.

To reduce the impact of this risk, Bakrieland is very selective in giving credit using the gradual cash sales system for its customers. This begins

MANAJEMEN RISIKO & KEPATUHAN

Risk Management & Compliance

konsumen. Hal itu dimulai dari strategi penetapan uang muka, pemilihan segmen pasar hingga pemenuhan persyaratan-persyaratannya.

Risiko Pasar

Pangsa pasar yang cukup besar dan tumbuh secara signifikan menjadi daya tarik bagi banyak pihak untuk terlibat ke dalam industri yang sama dengan Unit Usaha. Situasi ini memberikan dampak meningkatnya persaingan usaha dan kemungkinan terjadinya kelebihan pasokan di pasar yang dapat menurunkan penjualan produk dan berkurangnya permintaan terhadap produk Perusahaan.

Untuk mengantisipasi hal ini, Bakrieland selalu mengeluarkan produk yang inovatif sehingga dapat memenuhi kebutuhan pasar dan memfokuskan pengembangan pada proyek-proyek yang telah memiliki kinerja yang telah terukur selama ini.

Risiko Operasional

Risiko ini dibagi menjadi tiga tipe, yaitu:

1. Risiko Kinerja Unit Usaha

Sebagai Induk Perusahaan non-operasional, penghasilan dan laba operasi Perusahaan merupakan kontribusi dari kinerja unit usaha. Faktor-faktor yang dapat berdampak negatif terhadap kinerja keuangan Unit Usaha diantaranya adalah ketidakmampuan memenuhi target yang ditetapkan, kondisi makro ekonomi yang tidak stabil, kerugian usaha dan sebagainya. Penurunan kegiatan usaha dan penghasilan Unit Usaha secara langsung akan menurunkan tingkat penghasilan Perusahaan.

Sebagai upaya mitigasi, Perusahaan secara aktif melakukan pemantauan terhadap Unit Usahnya, seperti memberlakukan seleksi ketat terhadap seluruh kontraktor, menerapkan sistem usaha yang baik untuk mengurangi risiko bisnis, sekaligus secara aktif memperbaharui informasi dan memperkuat akuntabilitas untuk pengambilan keputusan bisnis di lingkungan Unit Usaha. Salah satu acuan dalam persetujuan terhadap proyek adalah penetapan *Internal Rate of Return* (IRR) >20%.

from the determination of the down payment, the selection of the market segment and the fulfilment of all requirements.

Market Risk

Significant market share and growth becomes an attraction for many other parties to be engaged in the same industry, this has caused the rise of competition and also the possibility of an oversupply in the market which can lower product sales and reduce demand for the Company's products.

In anticipation of this, Bakrieland continues to launch innovative new products that can meet the needs of the market and focuses on the development of projects with a measured performance.

Operational Risk

This risk consists of three types, which are:

1. Business Unit Performance Risk

As a non-operating Parent Company, the income and operating profit of the Company consists of the contributions from the performance of the business units. Factors that could adversely affect the financial performance of the business units include the inability to meet the targets, unstable macroeconomic conditions, loss of business and others. The decline in the business activities and income of the Subsidiary Entities will directly reduce the level of the Company's income.

As a mitigation measure, the Company actively monitors all of the business units, including imposing a strict selection of contractors, applying the appropriate business systems to reduce any business risks, as well as actively providing updated information and strengthening accountability for decision making in each business unit. One of the references in the approval of projects is the determination of *Internal Rate of Return* (IRR) >20%.

2. Risiko Usaha

Bakrieland sebagai Perusahaan properti yang terintegrasi mempunyai lini bisnis yang beragam dalam bidang landed residential, kondominium, perkantoran, perhotelan, hiburan dan rekreasi serta pusat perbelanjaan. Faktor keberagaman usaha tersebut menimbulkan dampak pada meningkatnya risiko usaha.

Untuk mengantisipasi risiko tersebut, dalam memulai pengembangan usahanya Bakrieland selalu menerapkan evaluasi yang seksama dan melakukan uji tuntas dengan penetapan IRR yang sangat ketat.

3. Risiko Sistem & Teknologi

Risiko sistem & teknologi timbul sebagai akibat adanya ketidakseragaman sistem dan teknologi dalam operasional Perusahaan. Kompleksitas sistem yang belum terintegrasi penuh antara Perusahaan dan Unit Usaha dapat menimbulkan gangguan terhadap sinkronisasi bisnis satu sama lain.

Bakrieland meminimalisasi potensi masalah ini dengan menetapkan bahwa Unit Usaha tetap mengacu pada kebijakan penetapan sistem dan teknologi sesuai yang diacu oleh Perusahaan.

Risiko Sumber Daya Manusia (SDM)

Risiko SDM berkaitan dengan penyimpangan hasil dari tingkat produktivitas yang diharapkan, karena adanya variabel yang mempengaruhi produktivitas kerja. Sebagai Perusahaan besar yang mengelola jumlah tenaga kerja yang banyak dengan berbagai macam latar belakang usia dan pendidikan, Bakrieland akan mengalami tantangan dalam mencapai tujuan Perusahaan jika SDM tersebut tidak dikelola dengan baik. Indikator keberhasilan pengelolaan SDM di Bakrieland dapat dilihat antara lain dari tingkat produktivitas yang tinggi, tingkat pergantian karyawan yang rendah, serta tingkat absensi yang rendah.

Dalam mengelola risiko SDM, Bakrieland selalu menempatkan SDM sebagai aset utama dalam mencapai tujuan Perusahaan. Usaha yang telah dilakukan, antara lain selalu mengadakan penilaian

2. Business Risk

Bakrieland operates as an integrated property company with diversified business lines in landed residential, condominiums, offices, hotels, entertainment and recreation facilities, as well as shopping centers. Such business diversity has a direct impact on the increase of business risks.

To anticipate these risks, Bakrieland is always cautious in its initial development plan by applying thorough evaluation and due diligence with a set of strict IRR.

3. System and Technology Risk

System & technology risks arise as a result of the diverse systems and technologies existing in the Company's units' operations. The complexity of the systems which are not fully integrated among the Parent Company and the Business Units may cause disruption in synchronizing all of the units' businesses.

Bakrieland minimizes this potential problem by specifying that each business unit still refers to the determination of the system and technology referred to by the Company.

Human Resources (HR) Risk

The HR risk is related with the deviations of the expected productivity levels due to the existence of variables that affect work productivity. As a large Company that manages a great number of employees with a variety of ages and educational backgrounds, Bakrieland will experience challenges in achieving company objectives if HR is not managed properly. Bakrieland's indicators of the success of its HR management can be seen, among others, from the high level of productivity, low employee turnover, and lower truancy rates.

In managing the HR risk, Bakrieland always places human resources as a major asset in achieving the company's objectives. The measures taken include, applying two direction performance appraisals

MANAJEMEN RISIKO & KEPATUHAN

Risk Management & Compliance

kinerja karyawan berbasis dua arah antara atasan dan bawahan, dan memberikan remunerasi yang kompetitif dengan Perusahaan lain dalam industri yang sejenis untuk menjaga rendahnya tingkat pergantian karyawan.

Risiko Eksternal

Risiko eksternal ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Risiko Lingkungan, Sosial dan Politik

Risiko yang timbul dalam pengembangan properti dapat terdiri dari berbagai jenis, di antaranya peraturan pemerintah tentang pembatasan kepemilikan properti oleh warga negara asing, aturan perpajakan, bencana alam, kejahatan dan terorisme yang seluruhnya berada di luar kendali Perusahaan. Bakrieland selalu berusaha memenuhi ekspektasi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) sebelum memulai suatu proyek.

Hal itu dilakukan melalui implementasi standar-standar terbaik dan terencana, risiko-risiko yang mungkin timbul dapat diminimalisasi dengan tetap memperkirakan *force majeure* yang mungkin terjadi. Seluruh proyek diasuransikan, serta senantiasa memperhatikan faktor lingkungan, sehingga terjadi keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan.

2. Risiko Hukum

Dalam hubungan bisnis dengan pihak ketiga, selalu terdapat potensi timbulnya sengketa atau perkara hukum. Dalam hal kondisi tersebut terjadi dan bernilai material, maka dapat mempengaruhi kegiatan usaha dan pencapaian target laba Perusahaan. Selanjutnya, adanya perubahan kebijakan hukum yang ditetapkan oleh regulator yang harus dipatuhi oleh obyek hukum, juga dapat memberikan risiko hukum bagi Perusahaan.

Untuk meminimalisasi risiko hukum, Bakrieland secara seksama mengikuti semua peraturan yang berlaku dan memastikan bahwa setiap proyek telah memenuhi seluruh unsur hukum. Segala risiko tuntutan hukum masyarakat terhadap dampak lingkungan yang mungkin terjadi telah

between superiors and subordinates, and by providing a competitive remuneration as compared to other companies in similar industries to maintain a low level of employee turnover.

External Risk

External Risk is also divided into three, as follows:

1. Environmental, Social and Political Risks

The risks arising in property development sector can comprise of various types, including the government regulation on the restriction for foreigners to own properties, taxation rules, natural disasters, crime and terrorism which are entirely beyond the control of the Company. Bakrieland always strives to meet the expectations of all stakeholders before starting a project.

This is achieved through the implementation of best standards and planning. The risks that may arise can be minimized while still considering the force majeure that may occur. The entire project is insured and Bakrieland always pays attention to environmental factors, resulting in a balance between development and environmental sustainability.

2. Legal Risk

In the business relationships with a third party, there is always the potential for disputes or lawsuits. In the event where this occurs and related to material value, business activities and the achievement of the Company's profit target may be affected. Furthermore, the change in a legal policy set by the regulator and which it is obliged to be followed by a legal entity, can also provide a legal risk for the Company.

To minimize legal risks, Bakrieland carefully follows all applicable laws and ensures that each project meets all legal requirements. All risk lawsuits against the environmental impact that may occur has been minimized through the fulfillment of all the requirements set by the Government,

diminimalisir melalui pemenuhan seluruh persyaratan pemerintah, terutama yang berkaitan dengan penanganan dampak lingkungan.

3. Risiko Reputasi

Risiko reputasi merupakan potensi hilang atau melemahnya nama baik Perusahaan. Hal itu mungkin terjadi akibat adanya publikasi negatif atau rendahnya penerimaan lingkungan eksternal, yang disebabkan ketidakmampuan Perusahaan dalam mengambil tindakan terhadap isu eksternal yang terkait dengan Perusahaan serta ketidakmampuan dalam mengelola komunikasi dengan pihak eksternal yang berkepentingan. Situasi ini dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap Perusahaan.

Bakrieland selalu menjaga reputasi dan citra produk-produk yang dikeluarkan oleh unit usaha. Disamping itu, Bakrieland juga selalu menjaga hubungan baik dengan masyarakat luas maupun masyarakat sekitar dimana suatu proyek dibangun, baik melalui program tanggung jawab sosial perusahaan maupun partisipasi dalam berbagai proyek atau kegiatan masyarakat sekitar. Hubungan dengan publik dan media juga selalu dibina melalui Corporate Affairs Directorate.

especially with regard to the handling of any subsequent environmental impacts.

3. Reputation Risk

Reputation risk is the potential loss or weakening of the Company's good name and community standing which may occur as a result of negative publicity or lack of acceptance of the external environment, which is caused by the inability of the Company to take action against external issues related to the Company as well as the inability to manage communication with all related external parties. This situation can lead to a negative perception of the Company.

Bakrieland always aims to maintain the good reputation and image of the products issued by each of the business units. In addition, Bakrieland also always maintains good relations with the wider community and the communities surrounding the Company's projects, either through corporate social responsibility programs and participation in various projects or activities of the surrounding communities. The relationship with the public and the media has always been fostered through the Corporate Affairs Directorate.

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS PENGENDALIAN
INTERNAL DAN MANAJEMEN RISIKO**

**STATEMENT LETTER OF THE BOARD OF
DIRECTORS' RESPONSIBILITY ON INTERNAL
CONTROL AND RISK MANAGEMENT**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

The undersigned :

Ambono Janurianto, dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Presiden Direktur dari dan oleh karenanya sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi PT Bakrieland Development Tbk ("Perseroan"), suatu Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Jakarta, Wisma Bakrie I Lantai 6 & 7, Jalan HR. Rasuna Said Kav. B-1, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut "Yang Membuat Pernyataan".

Ambono Janurianto, acting as President Director and duly authorized on behalf of the Board of Directors of PT Bakrieland Development Tbk ("Company"), a Limited Liability Company, located in Jakarta, Wisma Bakrie I, 6th & 7th Floor, Jalan HR Rasuna Said Kav. B-1, Jakarta Selatan, here onwards referred to as "Person In Charge of Asserting The Statement".

Dengan ini menyatakan bahwa :

Hereby states that :

1. PT Bakrieland Development Tbk selama tahun 2014 telah menerapkan suatu sistem manajemen risiko yang sehat dan memenuhi aturan dalam pengendalian internal Perseroan serta melaksanakan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Direksi
2. Selain itu, pengelolaan manajemen risiko Perseroan dan pemenuhan aturan serta sistem pengendalian internal telah dilaksanakan secara efektif dan efisien dalam seluruh aspek yang material.

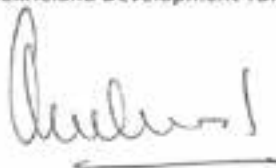
1. PT Bakrieland Development Tbk during the year 2014, has implemented a risk management system in satisfactory and in compliance to the regulations over the Company's internal control and has applied policies setforth by the Board of Directors.
2. Additionally, the management of the Company's risk management and regulatory compliance as well as the internal control system have been implemented effectively and efficiently in all material aspects.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya guna memenuhi prinsip tanggung jawab dalam Tata Kelola Perusahaan yang baik di Perseroan.

This Statement Letter is made in sincerity to comply with the principle of responsibility within the Company's Good Corporate Governance.

Jakarta, 1 Februari 2015

PT Bakrieland Development Tbk



Ambono Janurianto
President Director & CEO

AUDIT INTERNAL

Internal Audit

Jordan Lubis

Beliau memulai karirnya sejak tahun 1990 pada berbagai institusi keuangan dan properti di Indonesia. Selama bergabung di Bakrieland, beliau pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Hubungan Investor dan Pemerintah, Chief Financial Officer di Unit Usaha dan sebagai Corporate Secretary Perusahaan.

Lahir di Padang, 7 Oktober 1962, beliau meraih gelar Sarjana Teknik Mesin dari Universitas Sumatera Utara dan Sarjana Ekonomi dari Universitas Medan Area. Beliau juga memiliki sertifikat *Qualified Internal Audit* (QIA).

Struktur dan Kedudukan

Corporate Internal Audit dipimpin oleh seorang Kepala Divisi yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Direktur & CEO atas persetujuan Dewan Komisaris, serta bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur & CEO. Pertanggung jawaban disampaikan secara berkala dalam bentuk laporan kepada Presiden Direktur & CEO serta melalui Komite Audit kepada Dewan Komisaris.

Dalam melaksanakan dan menjalankan fungsinya, Corporate Internal Audit Perusahaan telah dilengkapi dengan Piagam Audit Internal, sebagai mana diatur oleh Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) melalui surat keputusan No. 496/BL/2008. Piagam Audit Internal yang telah disetujui Direksi dan Dewan Komisaris digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan Audit Internal. Piagam Audit Internal senantiasa dikomunikasikan kepada karyawan sehingga memberikan pemahaman terhadap visi dan misi Audit Internal dalam mengedepankan manajemen risiko, pengendalian internal, dan proses tata kelola perusahaan yang baik.

Jordan Lubis

Mr Lubis began his career in 1990 in various financial and property institutions in Indonesia. During his work with Bakrieland, he has held various positions including Head of Investor and Government Relations, Chief Financial Officer at the Business Unit level and Corporate Secretary of the Company.

Born in Padang, 7th October, 1962. He earned a Bachelor's degree in Mechanical Engineering from the University of North Sumatra and Bachelor of Economics from the University of Medan. He is also certified as a Qualified Internal Audit (QIA).

Structure and Position

The Corporate Internal Audit is led by a Division Head who is appointed and dismissed by the President Director & CEO based on the approval of the Board of Commissioners, and is directly responsible to the President Director & CEO. Accountability is submitted periodically in the form of a report to the President Director and CEO as well as through the Audit Committee to the Board of Commissioners.

In implementing and carrying out its function, the Company's Internal Audit has been equipped with the Internal Audit Charter, as regulated by the Capital Market Supervisory Agency and Financial Institution (Bapepam-LK) through decree No. 496/BL/2008. The Internal Audit Charter that has been approved by the Board of Directors and Board of Commissioners is used for guidance in conducting Internal Audit activities. The Internal Audit Charter continually communicated to employees to give an understanding of the Internal Audit vision and mission in promoting risk management, internal control, and good corporate governance.

AUDIT INTERNAL

Internal Audit

Pada tahun 2014, Audit Internal telah menguji efektivitas pengendalian internal, manajemen risiko, tata kelola atas program kode etik dan tata kelola komunikasi, transaksi keuangan, serta kerja sama dengan pihak ketiga.

In 2014, Internal Audit has examined the effectiveness of internal control, risk management, code of ethics governance and communication governance, financial transactions, as well as cooperation with third parties.

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas Corporate Internal Audit Bakrieland adalah memberikan keyakinan bahwa manajemen risiko, pengendalian internal dan tata kelola perusahaan telah berjalan sesuai regulasi dan peraturan Perusahaan. Hal tersebut dapat terlaksana dengan dilakukannya langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan.
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan manajemen risiko, pengendalian internal dan tata kelola yang telah sesuai dengan kebijakan Perusahaan.
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya.
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen.
5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikannya kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
6. Memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.

Duties and Responsibilities

The duty of the Corporate Internal Audit of Bakrieland is to provide assurance of risk management, control, and good corporate governance are running according to the Company's rules and regulations. To that end, the following measures should be performed:

1. Prepare and implement an annual internal audit plan.
2. Examine and evaluate whether the implementation of risk management, internal control and governance is in accordance with the Company's policy.
3. Perform inspections and assessments of the efficiency and effectiveness of finance, accounting, operations, human resources, marketing, information technology, and other activities.
4. Provide suggestions for improvements and objective information on the activities examined at all levels of management.
5. Prepare the audit report and submit the audit report to the President Director and the Board of Commissioners through the Audit Committee.
6. Monitor, analyze, and report on the follow-up of the improvement suggestions.

7. Bekerja sama dengan Komite Audit.
8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukan.
9. Mengevaluasi ketaatan Perusahaan terhadap hukum dan peraturan perundangan yang berlaku, serta kebijakan dan prosedur Perusahaan.
10. Melaksanakan penugasan khusus yang relevan dengan ruang lingkup pekerjaan audit.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan

Sepanjang tahun 2014, Corporate Internal Audit memfokuskan kegiatan auditnya terhadap kegiatan yang mengandung risiko dan berpengaruh signifikan bagi pencapaian tujuan Perusahaan. Diantara kegiatan yang dilakukan adalah menguji efektivitas pengendalian internal, manajemen risiko dan tata kelola atas program kode etik dan tata kelola komunikasi, transaksi keuangan, serta kerjasama dengan pihak ketiga dan melakukan survei pengendalian internal.

Corporate Internal Audit telah membahas hasil audit tersebut dengan pihak yang diaudit dan bersama-sama merumuskan langkah perbaikan.

7. Work closely with the Audit Committee.
8. Develop a program to evaluate the quality of internal audit activities performed.
9. Evaluate the Company's compliance to the applicable laws and regulations, as well as the Company's policies and procedures.
10. Conduct special assignments relevant to the scope of audit work.

Report on Activities

Throughout 2014, the Corporate Internal Audit focused its audit activities on the activities that carry risks and significant influence to the achievement of the Company's objectives. The activities performed include testing the effectiveness of internal control, risk management, code of ethics and communications governance programs, financial transactions, as well as cooperation with third parties and a survey on internal control.

The Corporate Internal Audit unit has discussed the results of the audit with the audited parties and together formulated corrective measures.

CORPORATE AFFAIRS

Corporate Affairs

Direktorat Corporate Affairs (CA) Bakrieland membawahi Internal Communication (IC), External Communication (EC) dan Corporate Social Responsibility (CSR) yang masing-masing mempunyai tugas dan tanggung jawab tersendiri.

Program komunikasi internal maupun eksternal di Perusahaan dilaksanakan oleh CA yang mengatur alur komunikasi antara Induk Perusahaan, Unit Usaha dan pihak eksternal agar dapat terjalin lebih lancar dan konsisten sehingga membawa dampak positif bagi citra Perusahaan.

INTERNAL COMMUNICATION

Sesuai dengan namanya, maka Internal Communication (IC) berfungsi mengelola jalur dan meningkatkan alur komunikasi dalam lingkup internal Induk Perusahaan dengan Unit Usaha dan Kelompok Bakrie melalui media komunikasi. Di antaranya, i-News, email & flyer blast, e-Newsletter (e-News), majalah dinding, situs, materi komunikasi korporasi seperti kartu ucapan dan kalender dalam format cetak maupun elektronik serta cinderamata.

Jalur komunikasi juga dilakukan dengan memanfaatkan website Perusahaan, baik yang berbasis web maupun berbasis mobile. IC dibantu Corporate Information Technology Division mengelola website Perusahaan agar semua informasi terkini mengenai Perusahaan secara terpadu tersedia melalui media tersebut.

KEGIATAN 2014

Perusahaan menggunakan beragam saluran komunikasi untuk kegiatan komunikasi internal, di antaranya email, majalah dinding, atau yang bersifat khusus semacam kartu ucapan. Kegiatan ini dilakukan untuk membangun komunikasi yang baik dan produktif di lingkungan karyawan, baik dalam Entitas Induk maupun Unit Usaha.

Berbagai topik yang menjadi tema komunikasi internal sepanjang tahun 2014, di antaranya kegiatan CSR yang dijalankan oleh Perusahaan, pembukaan

Bakrieland's Corporate Affairs has been established since 2010. This Unit is responsible for Internal Communication(IC), External Communication (EC) and Corporate Social Responsibility (CSR), each of which has its own duties and responsibilities.

The Company's internal and external communications programs are performed by the Directorate of Corporate Affairs (CA). CA regulates the flow of communication between the Parent Company, Business Units and external parties in order to function more smoothly and consistently, thus providing positive impacts on the Company's image.

INTERNAL COMMUNICATION

As the name implies, Internal Communication (IC) functions to manage the paths and improve the flow of internal communication between the Parent Company, the business units and the Bakrie Group through communication media, among others i-News, email and flyer blasts, e-newsletter (e-News), bulletin boards, websites, corporate communications materials such as printed or electronic greeting cards, calendars and souvenirs.

Communication utilizes the Company's website, both web-based and mobile based. IC is assisted by the Corporate Information Technology Division to manage the Company's website so that the latest information about the Company is available in an integrated manner through the available media.

2014 ACTIVITIES

The Company uses a variety of communication channels for conducting internal communication, including email, bulletin boards, or such specific means as greeting cards. This activity is performed to establish a good and productive communication among employees, both in the Parent Company and the business units.

Throughout 2014, there were numerous topics of internal communication themes, including CSR activities undertaken by the Company, such as those

Hasil audit persepsi media terhadap Perusahaan untuk tahun 2014 menunjukkan bahwa reputasi Bakrieland relatif dianggap “Baik” dalam pandangan 68,4% responden.

Result from the media perception audit on the Company in 2014 indicates that Bakrieland’s reputation is considered “Good” in the view of 68.4% of respondents.

JungleFest, serta kegiatan terkait Earth Hour & Earth Day: Taman Sekolah BNR, Green Office 5R dan Pohon Untuk Negeri. Selain itu, ada juga berbagai *event* promosi Unit Usaha: Festival Kuliner Bogor di JungleFest, Open House Sentra Timur Residence, Launching dan Penjualan Perdana Brown Tower Sentra Timur Residence, Peluncuran Apartemen Akasa Development Bintaro, The Jungle Waterpark Gelar Marching Kids Competition, Sporty & Healthy Cooking Class bersama Rizal Djibran di Sentra Timur.

EXTERNAL COMMUNICATION

Sejalan dengan perkembangan situasi serta arah dan tujuan Perusahaan, program komunikasi eksternal selama tahun 2014 fokus pada support terhadap komunikasi korporat sesuai misi dan visi perusahaan serta membantu meningkatkan brand awareness seluruh produknya.

REALISASI KEGIATAN 2014

Dalam menjalankan kegiatannya, CA Bakrieland pada Induk Perusahaan menjadi koordinator pelaksanaan program komunikasi di lingkungan Perusahaan. CA juga bekerjasama dengan Tim Marketing dan Public Relations Unit Usaha Bakrieland dalam menjalankan tiap program komunikasi eksternal.

related to Earth Hour & Earth Day, Taman Sekolah at BNR, 5R Green Office and Trees For the Nation. Moreover, promotional events conducted by the Business Units were also exposed, such as Bogor Culinary Festival at the Jungle Festival, Open House of Sentra Timur Residence, Launching and Initial Selling of Brown Tower in the Sentra Timur Residence, Launching of Akasa Development Apartment in Bintaro, The Jungle Waterpark Gelar Marching Kids, and Sporty & Healthy Cooking Class with Rizal Djibran in the Sentra Timur Residence.

EXTERNAL COMMUNICATION

In line with prevailing developments in the situation as well as in the Company’s direction and objectives, in 2014, the External Communications programs focused on supporting corporate communication in accordance with the Company’s vision and mission, as well as in improving product brand awareness.

2014 ACTIVITIES

In carrying out its activities at the Parent Company, Bakrieland CA functions as the coordinator of communication program implementation within the Company. CA also works closely with Marketing and Public Relations Teams of the Business Units in conducting any external communication programs.

CORPORATE AFFAIRS

Corporate Affairs

KEGIATAN MEDIA (MEDIA RELATIONS)

Bekerja sama dengan konsultan media eksternal serta berkoordinasi dengan berbagai divisi di Induk Perusahaan maupun Unit Usaha, berikut adalah ringkasan hasil liputan atas kegiatan program *media relations* Induk Perusahaan dan Unit Usaha selama tahun 2014.

MEDIA AUDIT

Perusahaan melalui CA melakukan pemantauan informasi terkait dengan Perusahaan yang tersebar di sejumlah media nasional. Pada bulan Januari 2015 telah dilakukan media audit oleh pihak konsultan *media relations*. Audit tersebut dilakukan dengan metodologi survei terhadap 40 responden (anggota media) guna melihat persepsi mereka terhadap Bakrieland.

40 responden tersebut adalah:

- 5 orang redaktur pelaksana, 8 orang redaktur, 5 orang asisten redaktur dan 22 reporter;
- 39 media lokal dan 1 media asing
- 25 media koran, 9 media majalah dan 6 media online

Responden diajukan dengan 40 pertanyaan yang merupakan pertanyaan serial atau pertanyaan yang sama sudah ditanyakan pada tahun sebelumnya serta beberapa pertanyaan baru yang dilihat mempunyai nilai strategis dan perlu dipantau untuk memberikan arahan penting bagi perusahaan. Berikut beberapa hal penting yang telah dicatat, antara lain sebagai berikut:

- Produk Bakrieland yang paling diketahui selama tahun 2014 adalah JungleLand, Epicentrum, Sentra Timur, OCEA Condotel dan BNR.

MEDIA RELATIONS

In cooperation with external media consultants and coordinating with various divisions in Bakrieland and the Business Units, the following is the summary of the coverage result under Bakrieland Group's media relations during 2014.

MEDIA AUDIT

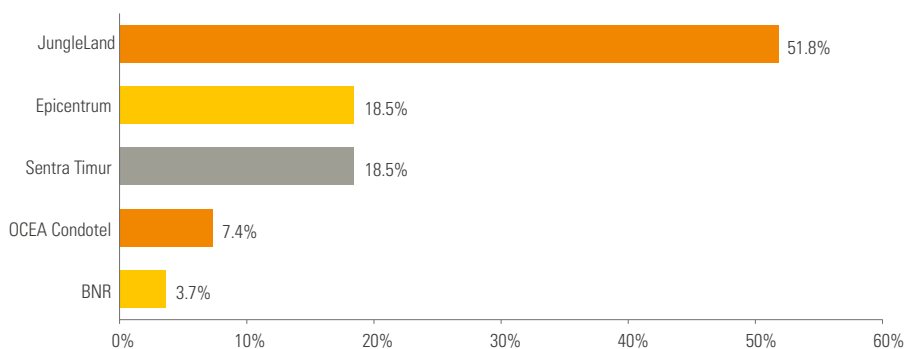
Through CA, Bakrieland monitors information related to the Company published in the national media. In January 2015, the media audit was carried out by a media relations consultant. The audit was conducted using a Methodology survey of 40 respondents (members of the media) to see their perceptions of Bakrieland.

The 40 respondents were:

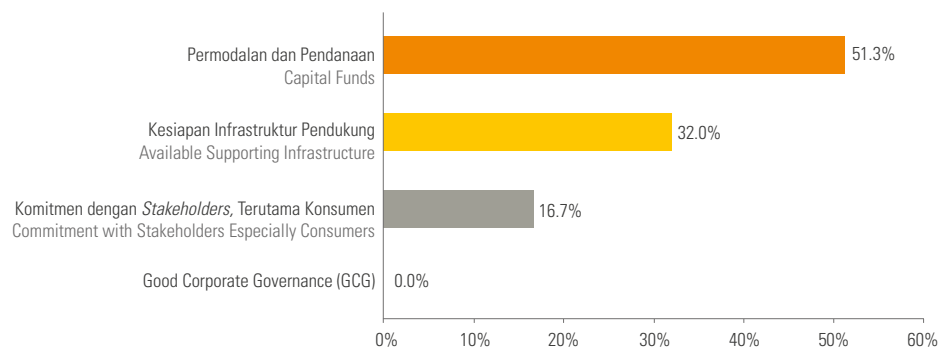
- 5 managing editors, 8 editors, 5 assistant of editors, and 22 reporters
- 39 local media and a foreign media;
- 25 newspapers, 9 magazines, and 6 online media.

Of the 40 questions, of which some questions were repeated from the previous media audits and some were new questions regarded as strategic and necessary to be monitored as feedback for the Company. Several important points were recorded, among others as follows:

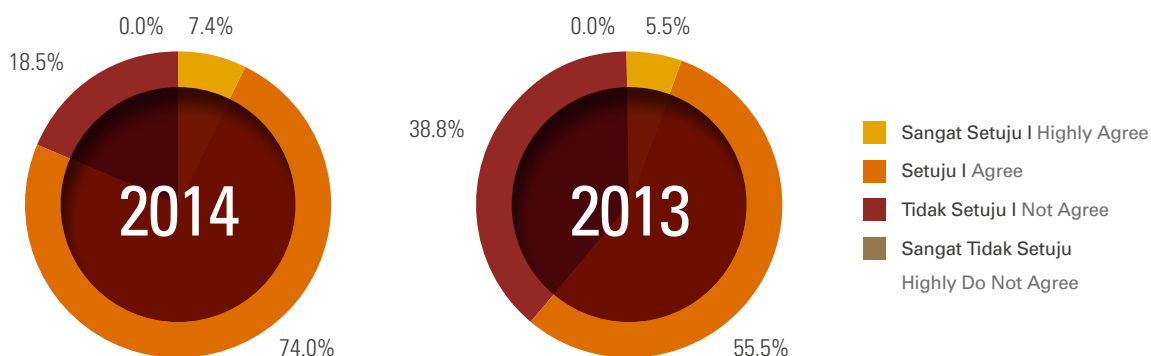
- Bakrieland products that are most known in 2014 were the JungleLand, Epicentrum, Sentra Timur, OCEA Condotel, and BNR.



- Hal yang paling penting bagi Bakrieland dalam mengembangkan usahanya adalah Permodalan dan Pendanaan, Kesiapan Infrastruktur Pendukung, Komitmen dengan *Stakeholders*, terutama Konsumen.
- The most important thing for Bakrieland in developing its business are capital and funding, supporting infrastructure, and a commitment to stakeholders, particularly its consumers.



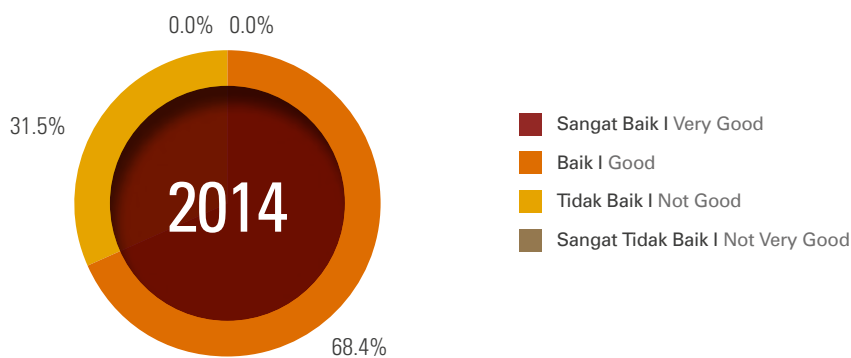
- 74,0% responden "Setuju" Manajemen Bakrieland periode 2014 sudah profesional, meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 55,5%. Hal ini menandakan kepercayaan meningkat pada Manajemen untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam mengoptimalkan kinerja perusahaan.
- 74.0% of respondents "Agrees" the new management of Bakrieland demonstrate a professional attitude compared to 55.5% in previous year. This indicates there is an increase trust toward the Management in taking necessary steps to optimize the Company's performed.



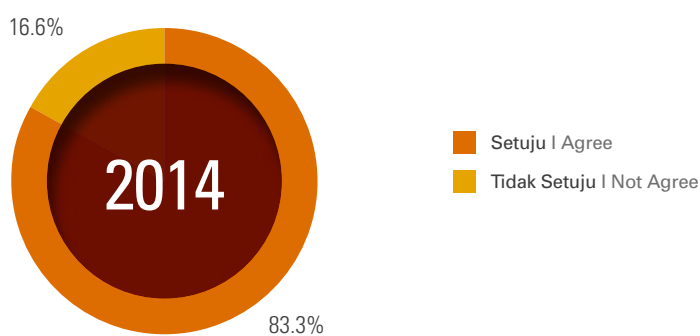
CORPORATE AFFAIRS

Corporate Affairs

- 68,42% responden menganggap reputasi Bakrieland relatif “Baik”. Properti Perusahaan tumbuh dan berkembang seiring pasar properti serta mempunyai produk berdaya saing.
- 68.42% of respondents considered Bakrieland’s reputation is relatively “Good”. Bakrieland’s property grew in line with the market development and its products increasingly competitive.

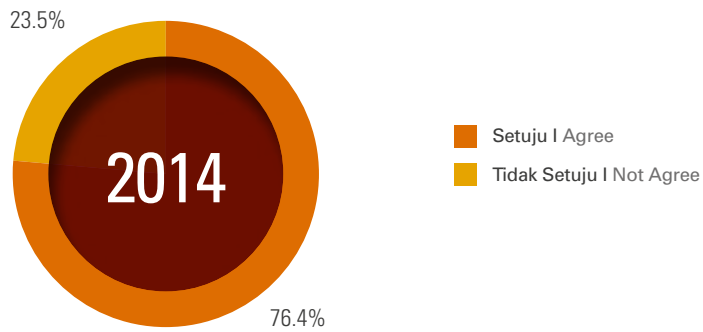


- 83,3% responden “Setuju” penjualan sejumlah aset oleh Bakrieland mempengaruhi reputasi dan performa Perusahaan. Performa Perusahaan ditentukan bukan dari seberapa banyak penjualan aset, tetapi dari seberapa tinggi pertumbuhan kinerja yang dicapai Perusahaan.
- 83.3% of respondents “Agrees” the sale of assets by Bakrieland affected the Company’s reputation and performance. The Company’s performance is not determined from how high the sales of assets, but from how high the Company’s performance growth is achieved.



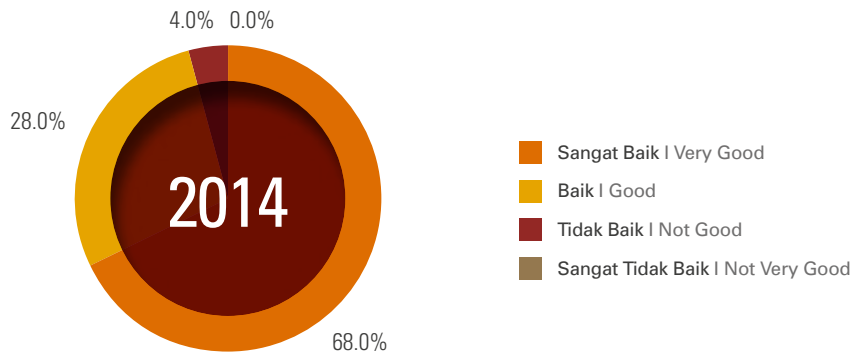
- 76,4% responden “Setuju” langkah Bakrieland padat ahun 2014 yang melakukan *realignment* aset dan kembali ke usaha inti di bidang properti berdampak positif terhadap kinerja Perusahaan. Sektor properti terus bertumbuh menjadi indikasi positif untuk tetap fokus bisnis di sektor ini.

- 76.4% of respondents “Agrees” Bakrieland’s initiative to realign assets back to the core business in the property sector in 2014 had a positive impact on the Company’s performance. The property sector continuous growth is a positive indication for Bakrieland to remain focus in this business sector.



- 68% responden menilai “Sangat Baik” strategi Manajemen Perusahaan mengambil alih kepemilikan JungleLand untuk mengembangkan bisnis *theme park* dan rekreasi.

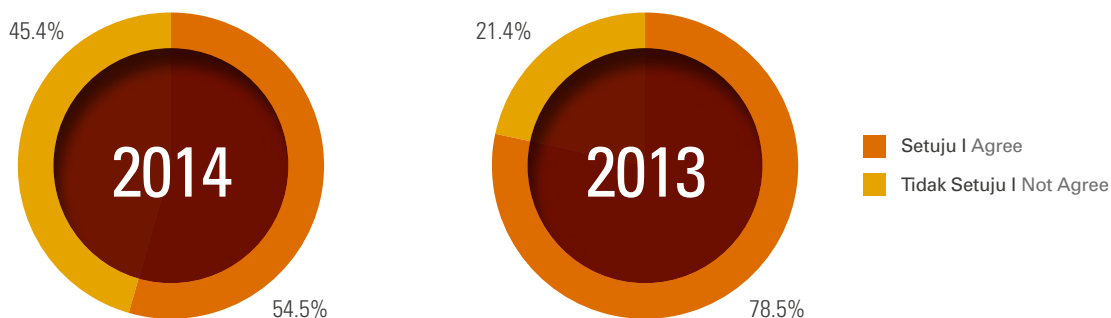
- 68% of respondents considers “Very Good” that Bakrieland’s management implemented the strategy to take over JungleLand’s ownership, to develop and expand the theme park and recreation business.



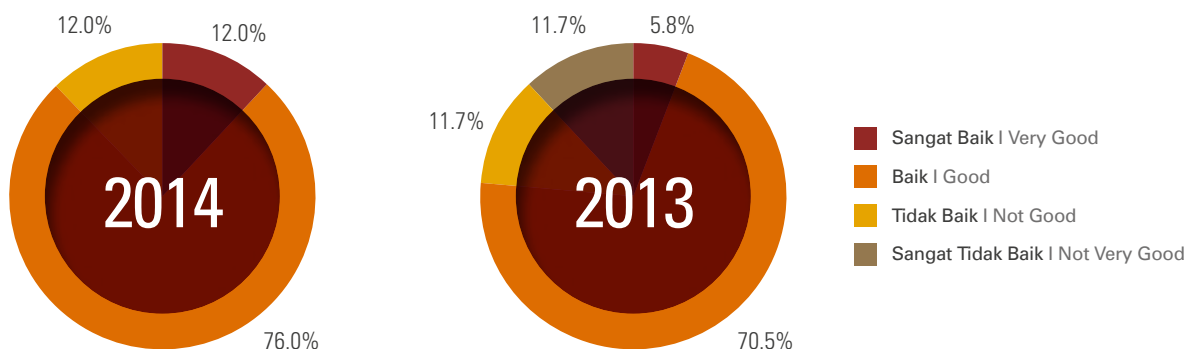
CORPORATE AFFAIRS

Corporate Affairs

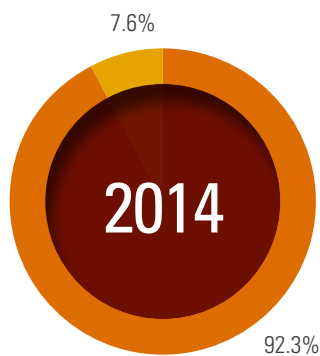
- 54,5% responden "Setuju" bahwa produk properti Bakrieland memiliki kelengkapan fasilitas dan infrastruktur pendukung yang terintegrasi. Dalam hal ini, terjadi penurunan prosentase dari tahun sebelumnya akibat dari lini bisnis infrastruktur tidak lagi menjadi lini bisnis Perusahaan. Akan tetapi, Perusahaan optimis persepsi responden akan meningkat pada tahun mendatang dikarenakan bisnis properti Perusahaan menjadikan aspek kemudahan akses sebagai salah satu faktor pemilihan lokasi properti.
- 54.5% of respondents "Agrees" with the perception that the property products of Bakrieland have integrated and complete facilities and supporting infrastructure. In this respect, a decrease in the percentage from the previous year was because Bakrieland was no longer in the infrastructure line of business. Nevertheless, Bakrieland is optimistic that such perception will improve as Bakrieland's property business focus its main factor of selecting their property locations on accessibility.



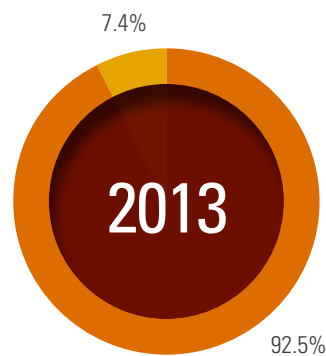
- 76% responden menilai hubungan Perusahaan dengan media "Sangat Baik".
- 76% of respondents considers the relationship between Bakrieland and the media "Very Good".



- 92,3% responden menyatakan sesuai kualitas produk Perusahaan sesuai dengan standar yang dijanjikan.



- 92.3% of respondents considers Bakrieland's product quality matches with standards as promised.



■ Sesuai | Appropriate
■ Tidak Sesuai | Not Appropriate

RENCANA 2015

Pada prinsipnya, yang dilakukan oleh CA adalah menjaga dan meningkatkan reputasi Perusahaan, sehingga tercipta iklim yang kondusif dalam hubungan internal Perusahaan maupun antara Perusahaan dengan pemangku kepentingan eksternal.

Adapun rencana program kerja tahun 2015 disusun dengan mengacu kepada tujuan Perusahaan. Sejalan dengan strategi tersebut, kegiatan yang direncanakan di antaranya adalah:

- Mengkomunikasikan aksi korporasi Perusahaan.
- Mendukung dan ikut mengkomunikasikan kegiatan pemasaran yang dilakukan Unit Usaha.
- Menyebarkan informasi program CSR Bakrieland, baik yang dilakukan oleh Induk Perusahaan maupun Unit Usaha.
- Mengadakan berbagai kegiatan *Media Relations* yang mendukung upaya menjaga relasi positif antara Perusahaan dengan pemangku kepentingan dari unsur media.
- Melakukan Media Audit 2015.

PLANS FOR 2015

In principle, the function of CA is to maintain and enhance the Company's reputation, thus creating a conducive internal environment as well as between the Company and stakeholders.

The 2015 work plan is prepared based on the Company's objectives. Along with the strategy, planned activities include:

- Communicating the Company's corporate actions;
- Supporting and participating in communicating marketing activities conducted by the Business Units;
- Deploying information of Bakrieland's CSR programs, conducted by the Parent Company and Business Units;
- Conducting various Media Relations activities to maintain positive relations between the Company and stakeholders (media).
- Conducting a 2015 Media Audit.

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Corporate Secretary

Dasar Hukum Penunjukan

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor : 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten Atau Perusahaan Publik dan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor : Kep-00001/BEI/01-2014 perihal Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, Perusahaan telah menunjuk Sekretaris Perusahaan/Corporate Secretary melalui Surat Keputusan Direksi PT Bakrieland Development Tbk Nomor 015/DIR-Perusahaan/SKD/VII/2014 tertanggal 18 Juli 2014

Pelaksanaan Tugas

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka tugas Sekretaris Perusahaan adalah :

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - 3.1. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik.
 - 3.2. Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu.
 - 3.3. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham.
 - 3.4. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
 - 3.5. Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. Sebagai penghubung antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.

Basis of Appointment

Based on the Regulation of the Financial Services Authority (OJK) No: 35/POJK.04/2014 on the Corporate Secretary of Listed or Public Company and the Decision of the Board of Directors of the Indonesia Stock Exchange: Kep-00001/BEI/01-2014 regarding the amendment on the Regulation No. I-A on the Registration of the Shares and Equity Securities besides the Shares Issued by the Listed Company, the Company appointed Corporate Secretary through the Decision of the Board of Directors of PT Bakrieland Development Tbk No. 015/DIR-Perusahaan/SKD/VII/2014 dated July 18, 2014.

Implementation of Duties

Based on the above provisions, the duties of the Corporate Secretary include:

1. Follow the development of the capital markets, especially on regulations applied in the capital market.
2. Advise the Board of Directors and Board of Commissioners of the Listed or Public Company to comply with the laws and regulations in the capital markets.
3. Assist the Board of Directors and the Board of Commissioners in the implementation of corporate governance, including:
 - 3.1 Transparency of information to the public, including the availability of information on the website of the Listed or Public Company.
 - 3.2 Submission of reports to the Financial Services Authority in a timely manner.
 - 3.3 Implementation and documentation of the General Meeting of Shareholders.
 - 3.4 Implementation and documentation of the Board of Directors/ Board of Commissioners meetings.
 - 3.5 Implementation of the Company's orientation program for the Board of Directors and/ or Board of Commissioners.
4. Act as a liaison between the Listed or Public Company with the shareholders of the Listed or Public Company, the Financial Services Authority, and other stakeholders.

5. Menyiapkan daftar khusus yang berkaitan dengan Direksi, Dewan Komisaris dan keluarganya baik dalam Perusahaan Tercatat maupun afiliasinya yang antara lain mencakup kepemilikan saham, hubungan bisnis dan peranan lain yang menimbulkan benturan kepentingan dengan Perusahaan Tercatat.
 6. Membuat daftar pemegang saham termasuk kepemilikan 5% (lima per seratus) atau lebih.
 7. Membantu Direksi dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.
5. Prepare a special list containing the Board of Directors, the Board of Commissioners and their families both in the Listed Company and its affiliates which include the ownership, business relations and other roles that may cause the occurrence of a conflict of interest with the Listed Company.
 6. Prepare a list of shareholders, including the 5% (five percent) or more ownership.
 7. Assist the Board of Directors in the implementation of the General Meeting of Shareholders.

Laporan Aktifitas

Selama 2014 Sekretaris Perusahaan melakukan berbagai kegiatan, yang di antaranya adalah :

1. Memandu Perusahaan untuk senantiasa patuh terhadap peraturan pasar modal, dan mengikuti perkembangan peraturan baru untuk selanjutnya memastikan bahwa Perusahaan mengimplementasikan peraturan-peraturan tersebut. Perusahaan menerbitkan 3 (tiga) Laporan Keuangan Triwulan dan 1 (satu) Laporan Keuangan Tahunan Teraudit 2013 serta 1 (satu) Laporan Tahunan 2013.
2. Melakukan korespondensi dengan regulator Pasar Modal (OJK dan BEI) Korespondensi yang dilakukan selama 2014 sebanyak 70 (tujuh puluh) kali.
3. Memberikan keterbukaan informasi terkait Perusahaan yang disampaikan melalui pelaporan, baik yang diatur maupun tidak, antara lain dalam bentuk siaran pers, website, dan melayani setiap kebutuhan informasi terkait kondisi Perusahaan. Siaran pers yang diterbitkan selama 2014 sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada tanggal 27 Juni 2014 dan 5 Desember 2014.
4. Mengkoordinasikan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada tanggal 27 Juni 2014.
5. Mengkoordinasikan pelaksanaan Paparan Publik (Public Expose) Tahunan sebanyak 1 (satu) kali, yaitu tanggal 5 Desember 2014.

Activity Report

During 2014 the Corporate Secretary performed various activities which included:

1. Guided the Company's adherence to the rules of the capital market, and remained updated on the new regulations to further ensure that the Company is implementing these regulations. The Company published 3 (three) Quarterly Financial Statements and the Audited Annual Financial Statements for 2013 and the 2013 Annual Report.
2. Performed correspondence with the Capital Market regulators (OJK and BEI). In 2014, the Company posted 70 pieces of correspondence.
3. Provided disclosure of relevant Company information in press releases and on the website, as well as providing information needs in other manners. In 2014, the Company conducted 2 press releases on June 27, 2014 and December 5, 2014.
4. Coordinated the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) on June 27, 2014.
5. Coordinated the Annual Public Expose on December 5, 2014.

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Corporate Secretary

Akses Informasi Publik

Perusahaan senantiasa memberikan kesempatan kepada masyarakat umum dan investor untuk memperoleh informasi mengenai Perusahaan, melalui beragam sumber informasi berbasis elektronik. Kegiatan publikasi Perusahaan dapat diakses melalui situs www.bakrieland.com yang memuat informasi terkini seperti kemajuan proyek, pergerakan harga saham, aksi korporasi, dan informasi penting lainnya. Bakrieland juga memberikan informasi terkini kepada pihak-pihak yang berkepentingan melalui surat elektronik (email).

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai Perusahaan, masyarakat umum dan investor dapat menghubungi Sekretaris Perusahaan Bakrieland, Tel. (62-21) 5257835, Fax. (62-21) 5225063, Email: corporate.info@bakrieland.com.

Perusahaan juga senantiasa melakukan pelaporan informasi dan fakta material melalui surat kepada OJK dan electronic reporting kepada Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id).

Rencana 2015

Pada tahun 2015, Sekretaris Perusahaan akan lebih aktif mengikuti berbagai kegiatan sosialisasi, workshop, dan pelatihan terkait peraturan-peraturan baru terkait Pasar Modal yang diselenggarakan oleh regulator, Asosiasi Emiten Indonesia dan Indonesian Corporate Secretary Association (ICSA).

Profil Sekretaris Perusahaan

Erry Zulamri Djaelani

Sekretaris Perusahaan dijabat oleh Erry Zulamri Djaelani. Beliau memulai karirnya sejak tahun 1983 pada berbagai institusi keuangan.

Menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan PT Bakrieland Development Tbk sejak tanggal 18 Juli 2014. Selama bergabung di Bakrieland, Beliau pernah menjabat sebagai Chief Financial Officer di Unit Usaha serta Kepala Divisi Risk Management & Compliance Bakrieland.

Menyelesaikan pendidikan Jurusan Perbankan di Universitas Pembangunan Nasional Veteran.

Public Information Access

The Company provides opportunities to the general public and investors to obtain information about the Company, through a variety of electronic-based information sources. The Company's publication activities can be accessed through the website www.bakrieland.com, containing the latest information such as project progress, the movement of stock prices, corporate actions, and other important information. Bakrieland also provides updated information to specific parties by electronic mail (e-mail).

To obtain more information about the Company, the general public and investors can contact the Corporate Secretary, Phone (62-21) 5257835, Fax. (62-21) 5225063, Email: corporate.info@bakrieland.com.

The Company also reports information and material facts through letters to the OJK and electronic reporting to the Indonesia Stock Exchange (www.idx.co.id).

Plans for 2015

In 2015, the Corporate Secretary will actively participate in various socialization activities, workshops, and training related to new regulations by the capital market regulators, the Association of Indonesian Issuers and the Indonesian Corporate Secretary Association (ICSA).

Profile of Corporate Secretary

Erry Zulamri Djaelani

The position of Corporate Secretary is held by Erry Zulamri Djaelani. He started his career in 1983, working in various financial institutions.

He has served as Corporate Secretary of PT Bakrieland Development Tbk since July 18, 2014. During his tenure at Bakrieland, he has served as the Chief Financial Officer and Head of the Risk Management & Compliance.

He graduated from the Faculty of Banking at the Universitas Pembangunan Nasional Veteran.

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi

Selama 2014, Sekretaris Perusahaan telah mengikuti sejumlah pelatihan, yang di antaranya:

Training and Competence Development

During 2014, the Corporate Secretary attended a number of training courses which include:

Tanggal Date	Kegiatan Activity	Penyelenggara Organizer
27 Jan 2014	Sosialisasi Perubahan Peraturan Bursa No. I-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat Socialization on the Changes of the Regulation of the Capital Market No. I-A on the Registration of Shares and Equity Securities Besides the Shares Issued by the Listed Company	PT Bursa Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange
21 Feb 2014	Sosialisasi Implementasi XBRL di BEI Socialization on the implementation of XBRL in BEI	PT Bursa Efek Indonesia Indonesia Stock Exchange
13 Mar 2014	<i>Workshop</i> Bulanan <i>The Roadmap and Implementation of Good Corporate Governance</i> Monthly Workshop: The Roadmap and Implementation of Good Corporate Governance	Indonesian Corporate Secretary Association (ICSA) Indonesian Corporate Secretary Association (ICSA)
24 April 2014	<i>Workshop</i> Bulanan <i>The Enterprise Risk Management</i> Monthly Workshop: The Enterprise Risk Management	Indonesian Corporate Secretary Association (ICSA) Indonesian Corporate Secretary Association (ICSA)
22 Mei 2014	<i>Workshop</i> Bulanan <i>The Mediation and Arbitration as the Alternative Dispute Resolution</i> Monthly Workshop: The Mediation and Arbitration as the Alternative Dispute Resolution	Indonesian Corporate Secretary Association (ICSA) Indonesian Corporate Secretary Association (ICSA)
17 Juli 2014	<i>Workshop</i> Bulanan <i>Great is You</i> Monthly Workshop: Great is You	Indonesian Corporate Secretary Association (ICSA) Indonesian Corporate Secretary Association (ICSA)
26 Sept 2014	<i>Workshop</i> Bulanan <i>Corporate Website</i> Monthly Workshop: Corporate Website	Indonesian Corporate Secretary Association (ICSA) Indonesian Corporate Secretary Association (ICSA)
24 Okt 2014	<i>Workshop</i> Bulanan <i>The Corporate Governance and Corporate Secretaries Toolkit</i> Monthly Workshop: The Corporate Governance and Corporate Secretaries Toolkit	Indonesian Corporate Secretary Association (ICSA) Indonesian Corporate Secretary Association (ICSA)
24 Nov 2014	Sosialisasi Kepatuhan Penegakan Hukum dan PSAK Socialization on the Compliance to the Law and SFAS	Otoritas Jasa Keuangan Financial Services Authority
3-4 Des 2014	<i>The Corporate Governance</i> The Corporate Governance	Indonesian Corporate Secretary Association (ICSA) Indonesian Corporate Secretary Association (ICSA)

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Corporate Secretary

KORESPONDENSI OJK & BEI TAHUN 2014 CORRESPONDENCE WITH OJK & BEI IN 2014

No	Perihal Surat	Kepada	Peraturan
1	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek Per 31 Desember 2013	BEI	Peraturan Bursa No. I-E Item III.3.4.2
2	Informasi Data Hutang/Kewajiban Dalam Valuta Asing per 31 Desember 2013	OJK	Surat Edaran Ketua OJK No.: SE-02/BL/2009
3	Informasi Data Hutang/Kewajiban Dalam Valuta Asing per 31 Januari 2014	OJK	Surat Edaran Ketua OJK No.: SE-02/BL/2009
4	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek Per 31 Januari 2014	BEI	Peraturan Bursa No. I-E Item III.3.4.2
5	Konfirmasi Pemberitaan di Surat Kabar	OJK	Surat OJK Nomor : S-92/PM.221/2014
6	Informasi Data Hutang/Kewajiban Dalam Valuta Asing per 28 Februari 2014	OJK	Surat Edaran Ketua OJK No.: SE-02/BL/2009
7	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek Per 28 Februari 2014	BEI	Peraturan Bursa No. I-E Item III.3.4.2
8	Penjelasan Atas Volatilitas Transaksi Efek	BEI	Surat BEI No. : S-00736/BEI.PGI/03-2014
9	Informasi Data Hutang/Kewajiban Dalam Valuta Asing per 31 Maret 2014	OJK	Surat Edaran Ketua OJK No.: SE-02/BL/2009
10	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek Per 31 Maret 2014	BEI	Peraturan Bursa No. I-E Item III.3.4.2
11	Informasi Data Hutang/Kewajiban Dalam Valuta Asing per 30 April 2014	OJK	Surat Edaran Ketua OJK No.: SE-02/BL/2009
12	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek Per 30 April 2014	BEI	Peraturan Bursa No. I-E Item III.3.4.2
13	Permintaan Penjelasan Bursa	BEI	Surat BEI No. : S-01831/BEI.PGI/05-2014
14	Informasi Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT BLD, Tbk	OJK cc BEI, KSEI & BAE	Peraturan OJK No. IX.1.1
15	Konfirmasi Pemberitaan di Media Massa	OJK	Surat OJK Nomor : S-339/PM.221/2014
16	Bukti Iklan Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT BLD, Tbk	OJK cc BEI, KSEI, BAE & Notaris	Peraturan Bursa No. I-E Item IV.5
17	Informasi Data Hutang/Kewajiban Dalam Valuta Asing per 31 Mei 2014	OJK	Surat Edaran Ketua OJK No.: SE-02/BL/2009
18	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek Per 31 Mei 2014	BEI	Peraturan Bursa No. I-E Item III.3.4.2
19	Pengumuman Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT BLD, Tbk	OJK cc BEI, KSEI, BAE & Notaris	Peraturan Bursa No. I-E Item IV.5

KORESPONDENSI OJK & BEI TAHUN 2014
CORRESPONDENCE WITH OJK & BEI IN 2014

No	Perihal Surat	Kepada	Peraturan
20	Bukti Iklan	BEI	IDXnet
21	Laporan Keuangan Tahunan 31 Desember 2013 PT Bakrieland Development Tbk dan Bukti Iklan	OJK	Peraturan OJK No. X.K.2
22	Bukti Iklan	BEI	IDXnet
23	Laporan Tahunan 2013 PT Bakrieland Development Tbk	OJK cc BEI	Peraturan OJK No. X.K.6 dan Peraturan Bursa No. I-E
24	Laporan Keuangan Tahunan 31 Desember 2013 PT Bakrieland Development Tbk dan Bukti Iklan	BEI	Peraturan OJK No. X.K.2 dan Peraturan Bursa No. I-E
25	Laporan Keuangan Auditan 2013 PT BLD, Tbk	BEI cc OJK	Peraturan Bursa No. I-E
26	Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT BLD, Tbk	OJK cc BEI, KSEI, BAE & Notaris	Peraturan OJK No. IX.I.1 & No. X.K.1 dan Peraturan Bursa No. I-E
27	Bukti Iklan	BEI	IDXnet
28	Keterbukaan Informasi Transaksi Afiliasi Dan Transaksi Material	OJK	Peraturan OJK No. IX.E.1 & No. IX.E.2
29	Bukti Iklan	BEI	IDXnet
30	Laporan Keuangan Triwulan I per 31 Maret 2014 PT BLD, Tbk	BEI cc OJK	Peraturan Bursa No. I-E Item III.1.1.2
31	Informasi Data Hutang/Kewajiban Dalam Valuta Asing per 30 Juni 2014	OJK	Surat Edaran Ketua OJK No.: SE-02/BL/2009
32	Informasi Pergantian Corporate Secretary	OJK cc BEI	Peraturan OJK No. X.K.1 dan Peraturan Bursa No. I-E
33	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek Per 30 Juni 2014	BEI	Peraturan Bursa No. I-E Item III.3.4.2
34	Permintaan Penjelasan atas Pemberitaan di Media Massa	BEI	Surat Bursa No : S-02849/BEI.PGI/07-2014
35	Bukti Iklan	BEI	IDXnet
36	Pertanyaan Terkait Transaksi Surat Utang Konversi	BEI	Surat Email Bursa tanggal 11 Juli 2014
37	Permintaan Penjelasan	BEI	Surat Bursa No : S-03052/BEI.PGI/07-2014
38	Permohonan Tambahan Waktu Bagi Penyampaian Surat Penjelasan	BEI	Surat Bursa No : S-03263/BEI.PGI/07-2014

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Corporate Secretary

KORESPONDENSI OJK & BEI TAHUN 2014 CORRESPONDENCE WITH OJK & BEI IN 2014

No	Perihal Surat	Kepada	Peraturan
39	Konfirmasi Pemenuhan Ketentuan Peraturan Bursa Terkait Komisaris Independen dan Direktur Independen	BEI	Surat Bursa No : S-03255/BEI.PGI/07-2014
40	Informasi Data Hutang /Kewajiban Dalam Valuta Asing per 31 Juli 2014 PT Bakrieland Development Tbk	OJK	Surat Edaran Ketua OJK No.: SE-02/BL/2009
41	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek per 31 Juli 2014	BEI	Peraturan Bursa No. I-E Item III.3.4.2
42	Tanggapan Atas Permintaan Penjelasan	BEI	Surat Bursa No : S-03263/BEI.PGI/07-2014
43	Tanggapan Atas Permintaan Penjelasan Atas Pemberitaan di Media Massa	BEI	Surat Bursa No : S-03547/BEI.PGI/08-2014
44	Tanggapan Atas Permintaan Penjelasan	BEI	Surat Bursa No : S-03771/BEI.PGI/08-2014
45	Laporan Keuangan Tengah Tahunan per 30 Juni 2014 PT Bakrieland Development Tbk	OJK cc BEI	Peraturan OJK No. X.K.2 dan Peraturan Bursa No. I-E
46	Bukti Iklan	BEI	IDXnet
47	Tanggapan Atas Permintaan Penjelasan	BEI	Surat Bursa No : S-03987/BEI.PGI/09-2014
48	Informasi Data Hutang /Kewajiban Dalam Valuta Asing per 31 Agustus 2014 PT Bakrieland Development Tbk	OJK	Surat Edaran Ketua OJK No.: SE-02/BL/2009
49	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek per 31 Agustus 2014	BEI	Peraturan Bursa No. I-E Item III.3.4.2
50	Tanggapan Atas Permintaan Penjelasan	OJK	Surat OJK Nomor : S-605/PM.221/2014
51	Keterbukaan Informasi Transaksi Afiliasi	BEI	Peraturan OJK No. IX.E.1
52	Keterbukaan Informasi Transaksi Afiliasi	OJK	Peraturan OJK No. IX.E.1
53	Informasi Data Hutang /Kewajiban Dalam Valuta Asing per 30 September 2014 PT Bakrieland Development Tbk	OJK	Surat Edaran Ketua OJK No.: SE-02/BL/2009
54	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek per 30 September 2014	BEI	Peraturan Bursa No. I-E Item III.3.4.2
55	Konfirmasi Keterlambatan Laporan Transaksi Afiliasi	OJK	Surat OJK Nomor : S-776/PM.221/2014
56	Keterbukaan Informasi Terkait divestasi 35% Saham PT Bukit Jonggol Asri dan Pembelian 100% Saham PT Jungleland Asia	OJK cc BEI	Peraturan OJK No. X.K.1 dan Peraturan Bursa No. I-E
57	Laporan Keuangan Interim per 30 September 2014 PT Bakrieland Development Tbk	BEI cc OJK	Peraturan Bursa No. I-E Item III.1.1.2.

KORESPONDENSI OJK & BEI TAHUN 2014
CORRESPONDENCE WITH OJK & BEI IN 2014

No	Perihal Surat	Kepada	Peraturan
58	Informasi Data Hutang /Kewajiban Dalam Valas per 31 Oktober 2014 PT Bakrieland Development	OJK	Surat Edaran Ketua OJK No.: SE-02/BL/2009
59	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek per 31 Oktober 2104	BEI	Peraturan Bursa No. I-E Item III.3.4.2
60	Penyampaian Dokumen	OJK	Surat OJK Nomor : S-819/PM.221/2014
61	Informasi Rencana <i>Public Expose</i> Tahunan PT BLD, Tbk	BEI cc OJK	Peraturan Bursa No. I-E Item V.
62	Materi <i>Public Expose</i> Tahunan PT Bakrieland Development Tbk	BEI	Peraturan Bursa No. I-E Item V.4.2
63	Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek Per 30 November 2014	BEI	Peraturan Bursa No. I-E Item III.3.4.2
64	Informasi Data Hutang/Kewajiban Dalam Valas Per 30 November 2014 PT Bakrieland Development	OJK	Surat Edaran Ketua OJK No.: SE-02/BL/2009
65	Laporan Pelaksanaan Publik Expose Tahunan PT Bakrieland Development Tbk	BEI	Peraturan Bursa No. I-E Item V.4.4.
66	Data NPWP Terkini	BEI	Surat Bursa No : S-05986/BEI.PGI/12-2014
67	Tanggapan Atasan Permintaan Penjelasan Pemberitaan di Media Massa	BEI	Surat Bursa No : S-05981/BEI.PGI/12-2014
68	Peringatan Tertulis II dan Denda	BEI	Surat Bursa No : S-06014/BEI.PGI/12-2014
69	Tanggapan Atas Penelahaan Laporan Keuangan Tengah Tahunan 2014 PT BLD Tbk	OJK	Surat OJK Nomor : S-883/PM.221/2014
70	Tanggapan Atas Permintaan Penjelasan Pemberitaan di Media Massa	BEI	Surat Bursa No : S-06323/BEI.PGI/12-2014

HUBUNGAN INVESTOR

Investor Relations

Sebagai perusahaan publik, Perusahaan menyadari tanggung jawabnya untuk memberikan informasi terkait Perusahaan kepada masyarakat keuangan (investor, analis, dan media). Pengelolaan komunikasi dengan masyarakat keuangan tersebut dijalankan oleh Investor Relations Division yang memiliki tugas utama untuk melakukan komunikasi yang efektif antara Perusahaan dan masyarakat keuangan dan pihak-pihak lain terkait perkembangan Perusahaan dan prospek Perusahaan ke depan.

Secara umum cakupan tugas Investor Relations yaitu:

1. Menjalin komunikasi dan hubungan yang baik dengan masyarakat keuangan (investor, analis, dan media).
2. Mengikuti perkembangan bursa saham dan memberikan saran kepada manajemen terkait dengan saham perusahaan.
3. Menyediakan informasi mengenai perkembangan perusahaan serta prospek ke depan kepada masyarakat keuangan.
4. Memberikan jawaban atas berbagai pertanyaan khususnya bidang keuangan

Sebagai perusahaan publik yang menjunjung tinggi aspek keterbukaan informasi, Bakrieland senantiasa berusaha meningkatkan kualitas dan akses informasi kepada para analis dan investor. Perusahaan berusaha membangun citra yang baik melalui pengembangan hubungan dengan investor dan analis baik secara interaktif, maupun penyampaian informasi berkala, terutama yang berkaitan dengan kinerja dan prospek Perusahaan.

Penyampaian informasi kepada investor/analis dilakukan melalui kegiatan *roadshow*, *analyst meeting*, *investor conference*, *website* Perusahaan dengan alamat www.bakrieland.com dan media komunikasi lainnya. Kehadiran CEO dan/atau CFO Perusahaan dalam setiap *roadshow* dengan para analis/*fund manager* merupakan bentuk kepedulian yang tinggi terhadap kegiatan Hubungan Investor.

As a public company, Bakrieland is fully aware of its responsibility to provide information related to the Company to the financial community (investors, analysts, and the media). The management of communication with the financial community is conducted through the Investor Relations Division, which has the primary task of performing effective communication between the Company and the financial community and also other parties who are related to the development of the Company and the Company's future prospects.

Generally, the scope of functions of the investor relations unit includes:

1. Fostering effective communication and good relations with the financial community (investors, analysts and the media).
2. Keeping track of stock market developments and providing advice on company shares to the management.
3. Providing information on the Company's development as well as its prospects to the financial community.
4. Responding to enquiries related specifically to financial matters involving the Company.

As a public company that upholds the important principle of information transparency, Bakrieland is consistently striving to improve the quality of information and its dissemination to analysts and investors. The Company is also constantly working towards building a positive image by nurturing good relationships with investors and analysts in an interactive manner, while regularly releasing information, mainly related to the performance and prospects of the Company.

Information is released to investors/analysts through road shows, analyst meetings, investor conferences and also various other forms of media communication. The presence of the CEO and or CFO of the Company alongside analysts/fund managers at every road show reflects the Company's firm commitment in cultivating good investor relations.

Hubungan Investor selalu mengoptimalkan komunikasi antara Perusahaan dengan para investor dan analis terkait dengan kinerja Perusahaan.

Investor Relations always optimize the communication between the Company with investors and analysts, regarding the Company's performance.

Sepanjang tahun 2014, strategi pelaksanaan kegiatan Divisi Hubungan Investor lebih aktif dibandingkan dengan tahun 2013. Dalam penyampaian informasi misalnya, Hubungan Investor tidak hanya pasif menunggu respon para analis maupun investor atas informasi Perusahaan yang disampaikan ke publik namun secara aktif, Perusahaan juga menyampaikan informasi melalui *mailing list* investor yang dimiliki Perusahaan.

Sejumlah kegiatan yang terealisasi sepanjang tahun 2014, di antaranya adalah:

1. Penyampaian informasi terkait kinerja Perusahaan (kinerja keuangan, progres proyek Perusahaan dll)
2. Melakukan korespondensi dengan para analis maupun investor terkait informasi keuangan maupun aksi korporasi yang sudah didistribusikan.
3. Secara reguler melakukan *conference call* dengan analis dan investor.

Throughout 2014, the activities of the Investor Relations Division were applied more actively compared to 2013. For example, in the release of information, instead of waiting passively for responses from the analysts and investors to the information released to the public, the Company proactively conveyed information through the investor mailing list.

Some of the activities performed throughout 2014 were:

1. Release of information related to the Company's performance (financial performance, progress of the Company's projects etc).
2. Correspondence with analysts and investors on financial information and corporate actions.
3. Regularly perform conference calls with analysts and investors.

HUBUNGAN INVESTOR

Investor Relations

Rencana 2015

Untuk lebih meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan terhadap bisnis Perusahaan, Divisi Hubungan Investor berencana merealisasikan sejumlah strategi yang menunjang persepsi positif tentang Perusahaan.

Adapun rencana yang akan direalisasikan tersebut, di antaranya:

1. Meningkatkan distribusi informasi yang relevan tentang aktivitas Perusahaan kepada para investor, analis, dan media.
2. Meningkatkan kualitas laporan kepada investor, analis, media dan manajemen Perusahaan sehingga mampu memberikan dampak positif bagi Perusahaan.
3. Meningkatkan keterbukaan informasi terkait kinerja Perusahaan.
4. Memberikan respon yang cepat dengan informasi memadai atas pertanyaan-pertanyaan para investor.

Melalui berbagai kegiatan di atas diharapkan mampu memberikan efek positif terhadap penilaian harga saham Perusahaan, serta memberikan kontribusi yang positif bagi para investor.

Plans for 2015

To further enhance the stakeholders' understanding regarding the Company's business, the Investor Relations Division plans to perform a number of strategies, which support a positive perception towards the Company.

The plans include:

1. Improving the distribution of relevant information on the Company's activities to investors, analysts, and the media.
2. Improving the quality of reports to investors, analysts, media and the management of the Company so as to give a positive impact on the Company.
3. Increase the transparency of information related to the Company's performance.
4. Providing a quick response with adequate information to the questions asked by investors.

These activities are expected to provide a more positive impact on the valuation of the company's share price, as well as contribute positively to investors.

LAPORAN KOMITE AUDIT

Audit Committee Report

Kepada Yth:

Dewan Komisaris
PT Bakrieland Development Tbk
Wisma Bakrie 1, Lantai 7
Jalan HR Rasuna Said Kav B-1
Jakarta 12920

Laporan Tahunan Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014

Dengan hormat,

Komite Audit adalah sebuah Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan Bapepam-LK No. KEP-643/BL/2012 dan peraturan-peraturan lainnya yang terkait.

Sesuai dengan peraturan diatas, tugas utama Komite Audit di PT Bakrieland Development Tbk (Perusahaan) adalah :

- a. Melakukan oversight atas laporan keuangan Perusahaan yang diterbitkan untuk kepentingan publik.
- b. Melalui hasil kerja Auditor Eksternal melakukan oversight atas efektivitas pengendalian internal yang telah diterapkan oleh Manajemen dalam proses penyajian laporan keuangan Perusahaan.
- c. Melakukan kajian atas rencana dan hasil aktivitas yang dilakukan oleh Auditor Internal dalam meyakinkan bahwa aktifitas operasional telah sesuai dengan peraturan Perusahaan.
- d. Melakukan kajian atas rencana dan hasil aktivitas Auditor Eksternal dalam meyakinkan bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material.
- e. Melakukan kajian atas obyektivitas dan independensi Auditor Internal maupun Eksternal.

To:

Board of Commissioners
PT Bakrieland Development Tbk.
Wisma Bakrie 1, Floor 7
Jalan HR Rasuna Said Kav B-1
Jakarta 12920

Annual Report on the Activities of the Audit Committee For the Year Ending 31st December, 2014

With respect,

The Audit Committee is a committee that was established by the Board of Commissioners in accordance with the Regulation of Bapepam-LK No. KEP-643/BL/2012 and other related regulations.

In accordance with the above regulations, the main tasks of the Audit Committee of PT Bakrieland Development Tbk. (the Company) are as follows:

- a. Conduct oversight on the Company's financial statements issued for the interests of the public.
- b. Through the work of the External Auditor, conduct oversight on the effectiveness of the internal control applied by the Management in the process of preparing the Company's financial statements.
- c. Review the plans and results of the activities undertaken by the Internal Auditor in assuring that the operational activities are in accordance with the Company's regulations.
- d. Review the plan and the results of the activities of the External Auditor in assuring that the financial statements are free of any material misstatement.
- e. Review the objectivity and independence of the Internal and External Auditors.

LAPORAN KOMITE AUDIT

Audit Committee Report

f. Bersama-sama dengan Komite GCG melakukan oversight atas pelaksanaan Good Corporate Governance dan pemantauan atas ketaatan Perusahaan terhadap peraturan perundangan yang berlaku, benturan kepentingan, dan etika usaha.

Dan menyampaikan laporannya secara berkala kepada Dewan Komisaris.

Komite Audit Perusahaan untuk periode tahun 2014 terdiri dari seorang ketua dan 2 (dua) anggota sebagai berikut :

1. Kanaka Puradiredja (Ketua/Komisaris Independen)
2. Mohamad Hassan (Anggota/Profesional Independen)
3. Indra Safitri (Anggota/Profesional Independen)

Sepanjang tahun 2014, Komite Audit menyelenggarakan 11 (sebelas) kali pertemuan formal, dengan fokus utamanya adalah memonitor penyelesaian laporan keuangan Perusahaan, baik laporan keuangan interim maupun tahunan yang di audit oleh Auditor Eksternal. Adapun tingkat kehadiran anggota Komite adalah sebagai berikut :

1. Kanaka Puradiredja 100%
2. Mohammad Hassan 82%
3. Indra Safitri 100%

Hal-hal yang dibahas dalam rapat tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Membahas pelaksanaan dan penyelesaian audit laporan keuangan konsolidasian tahun 2013 dengan Auditor Eksternal serta isu-isu yang terkait dengan laporan keuangan tersebut. Laporan keuangan konsolidasian auditan tahun 2014 dibahas pada Triwulan I tahun 2015.
- b. Membahas perencanaan audit Auditor Eksternal atas Laporan Keuangan Perusahaan tahun 2014 dan progresnya.

f. Together with the Corporate Governance Committee, perform oversight on the implementation of good corporate governance and monitor the Company's compliance to the applicable legislations, conflicts of interest, and business ethics.

And submit reports regularly to the Board of Commissioners.

The Audit Committee of the Company for the period of 2014 consisted of a chairman and two (2) members as follows:

1. Kanaka Puradiredja (Chairman/Independent Commissioner)
2. Mohamad Hassan (Member/Independent Professional)
3. Indra Safitri (Member/Independent Professional)

Throughout 2014, the Audit Committee held 11 (eleven) formal meetings, with its main focus being to monitor the completion of the Company's financial statements, both interim and annual financial statements audited by the external auditor. The rate of attendance of the Committee members in the meetings are as follows:

1. Kanaka Puradiredja 100%
2. Mohammad Hassan 82%
3. Indra Safitri 100%

Matters discussed in the meetings, among others covered the following:

- a. Discussion on the implementation and completion of the audit of the consolidated financial statements in 2013 with the External Auditor as well as issues related to the financial statements. The audited consolidated financial statements in 2014 were discussed in the first quarter of 2015.
- b. Discussion on the audit plan of the External Auditor on the Company's 2014 Financial Statements and its progress.

- | | |
|---|--|
| <p>c. Membahas Laporan Keuangan Triwulanan Perusahaan tahun 2014 sebelum dipublikasikan.</p> <p>d. Melakukan pembahasan atas obyektivitas dan independensi Auditor Internal maupun Eksternal dan merekomendasikan penunjukan Auditor Eksternal.</p> <p>e. Bersama-sama dengan Komite GCG membahas pelaksanaan Good Corporate Governance dan pemantauan atas ketaatan Perusahaan terhadap peraturan perundangan yang berlaku, benturan kepentingan, dan etika usaha.</p> | <p>c. Discussion on the Company's 2014 Quarterly Financial Report before being published.</p> <p>d. Discussion on the objectivity and independence of the Internal and External Auditors and recommend the appointment of the External Auditor.</p> <p>e. Together with the Corporate Governance Committee discussed the implementation of good corporate governance and the monitoring of the Company's compliance to applicable legislations, conflict of interest, and business ethics.</p> |
|---|--|

Demikian laporan ini disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

We hereby submit this report, we thank you for your kind attention.

Jakarta, 17 Februari 2015



Kanaka Puradiredja
Ketua | Chairman



Mohamad Hassan
Anggota | Member



Indra Safitri
Anggota | Member

LAPORAN KOMITE PEMANTAU RISIKO

Risk Monitoring Committee Report

Kepada Yth :

Dewan Komisaris
PT Bakrieland Development Tbk
Wisma Bakrie 1, Lantai 7
Jalan HR. Rasuna Said Kav B-1, Jakarta 12920

Laporan Tahunan Pelaksanaan Kegiatan Komite Pemantau Risiko Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014 Hingga Tanggal Laporan Tahunan

Dengan hormat,

Komite Pemantau Risiko dalam melakukan tugasnya berpedoman pada Piagam Komite Pemantau Risiko (KPR) yang disahkan pada tanggal 15 November 2008. Tugas KPR adalah sebagai berikut :

1. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris tentang masalah-masalah pengelolaan risiko.
2. Mengevaluasi sistem pengelolaan risiko dan pengawasan intern.
3. Menyediakan informasi kepada Dewan Komisaris terkait langkah melakukan antisipasi risiko.

Komite Pemantau Risiko diketuai oleh seorang Komisaris Independen. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, KPR bertindak secara obyektif dan independen, tanpa campur tangan dari pihak manapun.

Susunan Komite Pemantau Risiko untuk periode 2014 ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 158/SK/KOM-BLD/HIS/X/07 sebagai berikut:

1. Lukman Purnomosidi (Ketua/Komisaris Independen)
2. Supartono (Anggota /Komisaris)

Kegiatan yang dilakukan KPR dalam membantu Dewan Komisaris adalah melakukan pemantauan atas pembahasan berbagai potensi risiko usaha, yang meliputi antara lain risiko operasional, keuangan, hukum, dan risiko pasar, berikut rekomendasi langkah-langkah mitigasi. Secara fungsional, kegiatan pengelolaan risiko Perusahaan dilakukan oleh Divisi Corporate Risk Management & Compliance (CRMC).

To:

Board Of Commissioners
PT Bakrieland Development Tbk.
Wisma Bakrie 1, Floor 7
Jalan HR. Rasuna Said Kav B-1, Jakarta 12920

Annual Report on the Activities of the Risk Monitoring Committee for the Period Ending December 31, 2014 to the date of the Annual Report

With respect,

In performing its duties, the Risk Monitoring Committee is guided by the Charter of the Risk Monitoring Committee, which was ratified on November 15, 2008. The tasks of the Risk Monitoring Committee are as follows:

1. Provide input to the Board of Commissioners on issues related to risk management.
2. Evaluate the risk management and internal control system.
3. Provide information to the Board of Commissioners related to the measures to anticipate risks.

The Risk Monitoring Committee is chaired by an Independent Commissioner. In carrying out its duties and responsibilities, the Risk Monitoring Committee acts objectively and independently, without interference from any party.

The composition of the Risk Monitoring Committee for the period of 2014 was determined based on the Decision No. 158/SK/KOM-BLD/HIS/X/07 as follows:

1. Lukman Purnomosidi (Chairman/Independent Commissioner)
2. Supartono (Member/Commissioner)

In assisting the Board of Commissioners, the Risk Monitoring Committee monitors the discussion of potential business risks, which include, among others, operational risk, financial risk, legal risk, and market risk, and its recommendations on mitigation measures. Functionally, the Company's risk management activities are carried out by the Division of Corporate Risk Management & Compliance (CRMC).

Selama tahun 2014, Komite Pemantau Risiko telah mengadakan rapat sebanyak 4 (empat) kali. Adapun pokok-pokok agenda rapat antara lain membahas rencana kerja Komite Pemantau Risiko, implementasi rencana kerja Divisi Risk Management & Compliance, pembuatan kebijakan dan revisi kebijakan Perusahaan, analisa risiko pada Unit Usaha atas aktivitas penting di Unit Usaha.

Komite Pemantau Risiko melakukan penelaahan atas pelaksanaan manajemen risiko dan diperoleh hasil antara lain sebagai berikut:

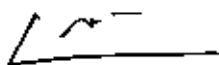
- Komite Pemantau Risiko menilai bahwa perlunya di-design suatu rencana kerja untuk aktivitas yang ada di suatu Perusahaan yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan suatu program sehingga diharapkan aktivitas-aktivitas tersebut dapat efektif.
- Komite Pemantau Risiko menilai bahwa penting untuk mempertahankan kualitas dan sertifikasi dari manajemen mutu yaitu ISO 9001:2008 yaitu mengenai Quality Management System.
- Komite Pemantau Risiko menyoroti pentingnya memonitor update atas kebijakan Perusahaan yang berlaku sesuai dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam Perusahaan, misalnya struktur organisasi dan pejabat berwenang, agar relevan dengan kondisi terkini Perusahaan.
- Komite Pemantau Risiko sangat mendukung analisa risiko terhadap aktivitas transaksi-transaksi penting dalam lingkup Perusahaan dan Unit Usaha.

During 2014, the Risk Monitoring Committee held 4 (four) meetings. The main points of the meeting agenda, among others, include the discussion on the work plan of the Risk Monitoring Committee, the implementation of the work plan of the Division of Risk Management & Compliance, formulation and revision of the Company's policies, risk analysis in the Business Units on important activities of the Business Units.

The Risk Monitoring Committee conducted a review on the implementation of risk management and the results obtained are as follows:

- The Risk Monitoring Committee considers the necessity to design the plan for the Company's activities, which can be used as the guidance in the implementation of a program in order for the activities to be performed effectively.
- The Risk Monitoring Committee considers that it is important to maintain the quality and certification of the management such as the ISO 9001:2008 on Quality Management System.
- The Risk Monitoring Committee highlighted the importance of monitoring the update on the Company's applicable policies in accordance with the changes that occur in the Company, such as the organizational structure and authorities, in order to be relevant to the current condition of the Company.
- The Risk Monitoring Committee strongly supports the risk analysis of important transactions within the scope of the Company and the Business Units.

Jakarta, 1 Februari 2015



Lukman Purnomosidi
Ketua | Chairman



Supartono
Anggota | Member

LAPORAN KOMITE NOMINASI & REMUNERASI

Nomination & Remuneration Committee Report

Kepada Yth:

Dewan Komisaris
PT Bakrieland Development Tbk
Wisma Bakrie 1, lantai 7
Jalan HR. Rasuna Said Kav. B-1,
Jakarta 12920

Laporan Tahunan Pelaksanaan Kegiatan Komite Nominasi dan Remunerasi untuk Periode yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014 hingga Tanggal Laporan Tahunan.

Dengan hormat,

Merujuk pada Anggaran Dasar Perusahaan bahwa nominasi dan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan pelaksanaannya didelegasikan kepada Dewan Komisaris. Oleh karenanya, untuk membantu Dewan Komisaris melaksanakan tugas khususnya dalam hal perumusan sistem nominasi dan remunerasi Perusahaan, maka Dewan Komisaris telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi pada tanggal 2 Oktober 2007.

Sejalan dengan dan mempertimbangkan ketentuan Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) pada Pedoman Umum Good Corporate Governance (GCG) Indonesia agar Komite Nominasi dan Remunerasi diketuai oleh Komisaris Independen dan anggotanya dapat terdiri dari Komisaris dan atau profesi dari luar Perusahaan, susunan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi selama tahun 2014 adalah sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 02A/SK-KOM/BLD/VII/2009, yaitu:

1. Lukman Purnomosidi
Ketua / Komisaris Independen
2. Bambang Irawan Hendradi
Anggota / Komisaris Utama
3. Supartono
Anggota / Komisaris

To:

Board of Commissioners
PT Bakrieland Development Tbk.
Wisma Bakrie 1, 7th floor
Jalan HR. Rasuna Said Kav. B-1
Jakarta 12920

Annual Report on the Activities of the Nomination and Remuneration Committee for the Period Ending 31st December 2014 until the date of the Annual Report.

With respect,

The Company's Articles of Association states that the nomination and remuneration of the Board of Commissioners and Board of Directors are determined by the General Meeting of Shareholders (GMS) and the implementation is delegated to the Board of Commissioners. Therefore to assist the Board of Commissioners in performing its tasks, especially in terms of the formulation of the Company's nomination and remuneration system, the Board of Commissioners has established the Nomination and Remuneration Committee, on 2nd October 2007.

In line and in consideration with the provisions of the National Committee on Governance (KNKG) in the Indonesian Good Corporate Governance (GCG) Guidelines, the Nomination and Remuneration Committee shall be chaired by an Independent Commissioner and members may consist of Commissioners and professionals from outside the Company, thus the members of the Company's Nomination and Remuneration Committee for 2014 in accordance with the Decree of the Board of Commissioners No. 02A/SK-KOM/BLD/VII/2009 are:

1. Lukman Purnomosidi
Chairman/ Independent Commissioner
2. Bambang Irawan Hendradi
Member/ President Commissioner
3. Supartono
Member/ Commissioner

Sepanjang tahun 2014, Komite Nominasi dan Remunerasi telah menyelenggarakan rapat sebanyak 4 (empat) kali dengan kehadiran hampir 100% seluruh anggotanya.

Adapun pokok bahasan dalam rapat-rapat tersebut diantaranya adalah:

- a. Progres tahapan dalam proses penyesuaian organisasi Bakrieland Group.
- b. Rencana dan progres penyesuaian remunerasi khususnya tingkat Manajemen dan Staf di Bakrieland Group.
- c. Tahap lanjutan dari proses penyesuaian organisasi terkait dengan tinjauan-ulang strategi bisnis perusahaan.

Sebagaimana fungsi dan wewenangnya, maka Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki tugas utama untuk:

- Menyusun kriteria seleksi dan prosedur nominasi anggota Dewan Komisaris, Direksi, Eksekutif lainnya, dan anggota Komite-Komite dibawah Dewan Komisaris.
- Memberikan rekomendasi tentang jumlah Direksi dan Dewan Komisaris.
- Memberikan rekomendasi kebijakan tentang remunerasi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan anggota Komite-Komite Dewan Komisaris.

Throughout 2014, the Nomination and Remuneration Committee held 4 (four) meetings with the following rate of attendance of its members of nearly 100%.

The topics discussed in the meetings included:

- a. The progress of the organizational alignment process of the Bakrieland Group.
- b. The plan and progress of the remuneration alignment, in particular within the Management and staff of Bakrieland Group.
- c. Advanced stages of the organizational alignment process related to the review over the Company's business strategy.

In terms of the function and authority, the Nomination and Remuneration Committee has the primary duties to:

- Develop the criteria for the selection and nomination procedure of the members of the Board of Commissioners, Board of Directors, other executives, and members of the Committees under the Board of Commissioners.
- Provide recommendations on the number of Directors and Commissioners.
- Provide recommendations on the remuneration policy for the members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and members of the Committees under the Board of Commissioners.

LAPORAN KOMITE NOMINASI & REMUNERASI

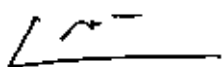
Nomination & Remuneration Committee Report

- Memberikan rekomendasi tentang besaran gaji, tunjangan, dan fasilitas yang kompetitif dan mengacu pada perkembangan pasar untuk anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.
- Memberikan rekomendasi atas penilaian kinerja, pemberian saham, sistem pensiun dan kompensasi.
- Provide recommendations on the amount of salary, allowance, and competitive facilities while referring to the development of the market, for members of the Board of Commissioners and Board of Directors.
- Provide recommendations on the assessment of performance, stock administration, and pension and compensation system.

Sedangkan khusus untuk remunerasi Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Perusahaan pada tahun 2014 telah menerima kompensasi remunerasi sebesar Rp15.227.139.084 (Lima Belas Miliar Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Seratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Delapan Puluh Empat Rupiah).

In 2014, members of the Board of Commissioners, Board of Directors and the Committees of the Company received remuneration amounting to Rp15,227,139,084 (Fifteen Billion Two Hundred Twenty-Seven Million One Hundred Thirty-Nine Thousand and Eighty Four Rupiah).

Jakarta, 27 Februari 2015



Lukman Purnomosidi
Ketua | Chairman



Bambang Irawan Hendradi
Anggota | Member



Supartono
Anggota | Member

LAPORAN KOMITE KEBIJAKAN CORPORATE GOVERNANCE

Corporate Governance Policy Committee Report

Kepada Yth :

Dewan Komisaris
PT Bakrieland Development Tbk
Wisma Bakrie 1, Lantai 7
Jalan HR. Rasuna Said Kav B-1, Jakarta 12920

Laporan Tahunan Pelaksanaan Kegiatan Komite Kebijakan Corporate Governance Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014 Hingga Tanggal Laporan Tahunan

Dengan hormat,

Komite Kebijakan Corporate Governance mulai dibentuk oleh Perusahaan pada tanggal 13 Oktober 2009 melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 07A/SK-KOM/BLD/IX/2009. Komite ini dibentuk dengan tujuan untuk membantu Dewan Komisaris dalam fungsi pengawasannya terutama terkait implementasi tata kelola perusahaan.

Tugas dan kewajiban Komite Kebijakan Corporate Governance adalah memberikan pendapat dan dukungan kepada Dewan Komisaris dalam memenuhi tanggung jawabnya untuk memantau aktivitas:

1. Penelaahan dan pengkajian Anggaran Dasar.
2. Penerapan prinsip-prinsip GCG.
3. Penerapan prinsip-prinsip etika (Code of Conduct).
4. Kepatuhan terhadap perundang-undangan dan peraturan yang berlaku, bersama-sama Komite Audit
5. Penerapan tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility).

To:

Board of Commissioners
PT Bakrieland Development Tbk.
Wisma Bakrie 1, 7th Floor
Jalan HR. Rasuna Said Kav B-1, Jakarta 12920

Annual Report on the Implementation of the Corporate Governance Committee for the Period Ended 31st December, 2014 Up to the Date of the Annual Report

With respect,

The Corporate Governance Committee was established by the Company on 13th October, 2009 through the Decree of the Board of Commissioners No. 07A/SK-KOM/BLD/IX/2009. This committee was formed with the aim of assisting the Board of Commissioners in its monitoring function mainly related to the implementation of corporate governance.

The duties and responsibilities of the Corporate Governance Committee are to provide opinion and support for the Board of Commissioners in fulfilling their responsibility to monitor the following activities:

1. Review and assessment of the Articles of Association.
2. Application of the principles of good corporate governance.
3. Application of ethical principles (Code of Conduct).
4. Compliance with the laws and regulations, together with the Audit Committee
5. Implementation of corporate social responsibility.

LAPORAN KOMITE KEBIJAKAN CORPORATE GOVERNANCE

Corporate Governance Policy Committee Report

Komite Kebijakan Corporate Governance diketuai oleh seorang Komisaris Independen. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Kebijakan Corporate Governance bertindak secara profesional dan independen, tanpa campur tangan dari pihak manapun.

Anggota Komite Kebijakan Corporate Governance per tanggal 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:

1. Kanaka Puradiredja (Ketua / Komisaris Independen)
2. Bambang Irawan Hendradi (Anggota / Presiden Komisaris)
3. Supartono (Anggota / Komisaris)

Selama tahun 2014, Komite Kebijakan Corporate Governance telah mengadakan rapat sebanyak 5 (lima) kali dengan tingkat kehadiran Kanaka Puradiredja 100%, Bambang Irawan Hendradi 100%, dan Supartono 20%. Rapat yang diadakan Komite KCG termasuk rapat gabungan dengan Komite Audit. Adapun pokok-pokok pembahasan antara lain membahas mengenai penyesuaian Standard Operating & Procedure (SOP) perusahaan dengan struktur organisasi terbaru, keikutsertaan dalam indeks pemeringkatan GCG (CGPI 2013) yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute of Corporate Governance (IICG), pembahasan implementasi GCG di perusahaan, kepatuhan terhadap peraturan perundangan.

The Corporate Governance Committee is chaired by an Independent Commissioner. In carrying out its duties and responsibilities, the Corporate Governance Committee acts professionally and independently, without interference from any party.

Members of the Corporate Governance Committee as of 31st December, 2014 are:

1. Kanaka Puradiredja (Chairman/ Independent Commissioner)
2. Bambang Irawan Hendradi (Member/ President Commissioner)
3. Supartono (Member/ Commissioner)

Throughout 2014, the Corporate Governance Committee held 5 (five) meetings with the following rate of attendance Kanaka Puradiredja at 100%, Bambang Irawan Hendradi at 100%, and Supartono at 100%. The Meetings held by the Corporate Governance Committee included the joint meetings with the Audit Committee. The main topics discussed among others included discussions on the adjustments of the Standard Operating Procedure (SOP) of the Company to the latest organizational structure, participation in the corporate governance rating index (CGPI 2013) organized by the Indonesian Institute of Corporate Governance (IICG), GCG implementation in the Company, and on compliance with the laws and regulations.

Komite KCG menyoroti mengenai implementasi GCG dan menilai agar manajemen senantiasa mengedukasi karyawan untuk selalu ikut aktif dalam implementasi GCG. Dengan adanya perubahan struktur organisasi Perusahaan pada pertengahan tahun 2013, yang berdampak pada penyesuaian Standard Operating & Procedure (SOP) di awal tahun 2014, Komite KCG mendukung adanya penyesuaian atas SOP-SOP tersebut.

The Corporate Governance Committee highlighted the implementation of GCG and made the assessment that the Management should continue to educate the employees to actively participate in the implementation of GCG. Regarding the changes of the Company's organizational structure in mid-2013, which provided an impact on the adjustment of the Standard Operating Procedure (SOP) in early 2014, the Corporate Governance Committee supports the adjustment to the SOP.

Jakarta, 1 Februari 2015



Kanaka Puradiredja
Ketua | Chairman



Bambang Irawan Hendradi
Anggota | Member



Supartono
Anggota | Member